

**ANALISIS KONSTRUKSI WACANA KEBIJAKAN “144 KOMITMEN  
MARINE LE PEN” OLEH FRONT NASIONAL (FN) DALAM  
KAMPANYE PRESIDEN PRANCIS 2017**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**DEVI AGUSTIANIS FIRZA VERDIANA**

**14323043**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS KONSTRUKSI WACANA KEBIJAKAN “144 KOMITMEN  
MARINE LE PEN” OLEH FRONT NASIONAL (FN) DALAM  
KAMPANYE PRESIDEN PRANCIS 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

**DEVI AGUSTIANIS FIRZA VERDIANA**

**14323043**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Analisis Konstruksi Wacana kebijakan “144 Komitmen Marine Le Pe” Oleh  
Front Nasional (FN) dalam Kampanye Presiden 2017**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

18 Oktober 2018

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S

Dewan Penguji

1. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Devi Agustianis Firza Verdiana  
No. Mahasiswa : 14323043  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Konstruksi Wacana kebijakan “144 Komitmen Marine Le Pe” Oleh Front Nasional (FN) dalam Kampanye Presiden 2017

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 September 2018

Yang menyatakan



Devi Agustianis FV

## HALAMAN PERSEMBAHAN



### *Alhamdulillahirabbil'alamin*

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang paling berpengaruh di dalam hidup saya yaitu:

#### **Bapak dan Ibu Tercinta**

Tidak ada kata yang cukup untuk diekspresikan begitu berterimakasihnya anakmu atas segala air mata, keringat hingga darah yang telah kau tumpahkan demi selesainya studi S1 ini. Terima kasih atas doa, nasehat, teladan, dukungan, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada anak ketiganya selama ini. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga dengan selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga. Penulis ingin membuktikan bahwa suatu saat nanti, Devi Agustiani FV bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga dan saudara. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT.

#### **Adik Tersayang**

Untuk keempat adik saya, terimakasih sudah selalu menjadi penyemangat dan mendorong kesuksesan bagi saya sendiri untuk selalu membuktikan keberhasilan saya disini. Gelar S1 yang saya raih ini semoga dapat menjadi kebanggaan untuk kalian suatu saat ini dan menjadi contoh yang baik untuk kalian.. Kalian semua selalu menjadi motivasi berharga bagi saya. Semoga kalian juga selalu dipermudah dan diberi kesuksesan dalam pendidikan dan agama oleh Allah SWT.

## HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

**“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia.”**

“we are not feminists because we hate men,  
we are feminists because we respect and love men and  
we don't understandt why the do not always resturn that respect”

~ Germaine Greer ~

“The strength of a woman is not measured by the impact that all her hardships in  
lie have had on her: but the strength of a woman is measured by the extent of her  
refusal to allow those hardships to dictate her and who she becomes”

~ C. Joybell C ~

“when the whole world is dilent, even one  
voice bercome powerful”

~ Malala yousafzai ~

“we do not need magic to change the world , we carry all the power we need  
inside ourselves already : we have the power to imagine better”

~ J.K. Rowling ~

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanallahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Fuad Mashori S.Psi., M.Psi., M.Ag., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Selaku beliau yang merupakan dosen pembimbing saya selama satu tahun ini. Terimakasih telah membimbing saya selama proses awal pembuatan skripsi hingga tahap akhir dan dapat melaksanakan sidang hingga dinyatakan lulus. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama proses pembuatan skripsi saya banyak melakukan kesalahan, baik dalam hal sikap ataupun dalam proses pemberian arahan.

3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan motivasi, serta berkenan meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam pengurusan skripsi secara administrasi.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar kepada saya selaku mahasiswa. Terimakasih telah menjadi tempat untuk saya berkonsultasi terkait masalah mata kuliah, sks, atau dalam pengambilan skripsi. Begitupun selaku sebagai dosen HI UII, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan 4 tahun ini. Sehingga saya dapat memahami ilmu politik lebih baik dari sebelumnya, hingga saya bisa kuliah dengan baik. Terimakasih juga selaku sebagai dosen penguji sidang saya, yang telah memberikan arahan terkait kekurangan dari skripsi saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
5. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP.,M.A. selaku Dosen prodi HI UII yang selama ini telah memberikan ilmu dengan pemahaman yang lebih jelas dan lebih detail. Sehingga selama proses perkuliahan berlangsung saya dapat memahami pelajaran yang telah disampaikan dan menjadi pengetahuan baru. Terimakasih juga selaku sebagai dosen penguji saya yang telah memberikan banyak arahan sehingga skripsi saya bisa lebih dalam dan spesifik.
6. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP.,



M.A. yang telah memberikan pengetahuan baru setiap harinya. Terimakasih kepada Bapak Hasbi dan Ibu Een yang telah memberikan pengetahuan politik islam selama saya mengambil konsentrasi IPSA. Begitupun dengan Bapak Hangga yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu yang sangat berharga selama saya kuliah, karena beliau adalah salah satu dosen yang sangat menginspirasi bagi saya.

7. Mbak Mardiatul Khasanah cantik dan imut yang telah memberikan arahan masalah administrasi dari proses perkuliahan hingga skripsi. Terimakasih telah menjadi orang yang selalu ada di prodi sehingga kami tidak lagi merasa bingung dengan regulasi prodi.
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, terimakasih selama ini telah mendukung saya baik secara materil dan moril dalam menempu masa studi. Juga telah sabar menunggu saya selama masa proses dari awal memulai kuliah hingga sampai saat ini dengan berhasil mendapat gelar sarjana ini. Terimakasih banyak atas dukungan dan kepercayaan penuh terhadap saya sebagai anak perempuan pertama didalam keluarga. Sehingga gelar sarjana ini menjadi gelar pertama yang dirasakan baik bagi diri saya dan juga bagi kedua orang tua saya. Semoga kedepannya gelar ini bisa bermanfaat bagi diri saya, bagi adik-adik saya, bagi keluarga dan juga bagi orang lain.
9. Serta terimakasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri, telah bertahan dalam menikmati proses panjang skripsi saya. Telah melalui berbagai macam hambatan baik dalam proses pengerjaan, proses revisi dan juga proses perjalanan spiritual saya dalam bekerja keras untuk

menyelesaikannya. Saya sudah bekerja keras siang dan malam, lembur ketemu pagi sampai malam lagi untuk mengerjakan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik saya, dan memotivasi saya untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.

10. Terimakasih buat gengs Ghibah teman seperjuangan skripsi: terimakasih buat Elyana Ade P temen kemanapun dan temen curhat, yang sudah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini baik memberikan masukan, nasihat, arahan dan juga menjadi editor saya serta menjadi *google translate offline*. Terimakasih juga buat Trivida, yang telah membantu dalam editor skripsi saya juga menjadi teman curhat. Begitupula terimakasih untuk Siti Zumroh, sebagai temen untuk berbagi masalah terkait pahitnya hidup ini dan menjadi kuat dalam menghadapi banyak masalah. Dan buat mas bro gengs korban Konstruktivis Wendt, Vikram dan Bintar yang menjadi teman berbagi pengetahuan dan berdiskusi terkait konstruktivis ini yang menyusahkan ini. Terimakasih telah mendebatkan teori ini dan memberikan arahan dan pencerahan terkait analisis teori ini. Semoga mimpi untuk mengundang Alexander Wendt, ngopi bareng di angkringan Pakde bisa terwujud yak say.
11. Buat temen-temen satu DPS: Rana S, Aufa, Elyana, Trivida, Okta terimakasih untuk berjuang bareng selama satu tahun ini. Terimakasih telah berbagi suka dan duka dalam skripsi ini, juga atas dukungan dan support penuh untuk selalu bekerja keras dan mengejar ketertinggal. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan skripsi ini dan lulus di tahun yang sama.

12. Terimakasih sebesar-besarnya kepada keluarga IMMAN Yogyakarta : baik sesepuh saya, senior saya, seluruh anggota. Terimakasih atas dukungan dan support selama saya menjalani proses 4 tahun di Jogjakarta ini. Terimakasih juga buat Sopyan S, Diki, Indra, Qowi, Andri dan temen semua temen-temen ngopi saya terimakasih untuk stanby ditempat ngopi untuk menjadi teman diskusi, ngobrol, tertawa dan juga tergil. Setidaknya kalo sudah ngopi sama kalian saya melupakan skripsi sejenak.
13. Terimakasih juga buat kak \_\_\_\_ yang telah menjadi inspirasi saya, telah menjadi orang yang begitu saya kagumi, menjadi satu-satunya orang yang bisa bikin saya baper karena . Terimakasih berkat kehadiranmu dalam hidup saya membuat saya harus menjadi lebih baik lagi, sebaik-baiknya seorang wanita yang berintelektualitas.
14. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun ini. Terima kasih telah menempuh mau jalan bersama dengan tujuan dan nasib yang berbeda-beda.
15. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

**Devi Agustianis firza Verdiana**

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Signifikansi.....	9
1.5 Cakupan Penelitian.....	10
1.6 Kajian Pustaka.....	11
1.7 Landasan Teori .....	16
1.8 Metode Penelitian.....	23
1.8.1 Jenis Penelitian .....	23
1.8.2 Subjek Penelitian .....	24
1.8.3 Alat Pengumpul Data.....	24
1.8.4 Proses Penelitian.....	25
<b>BAB II</b>	
<b>FRONT NASIONAL (FN) DAN MARINE LE PEN.....</b>	<b>26</b>
2.1 Sejarah Front National (FN).....	26
2.2 Perbedaan Retorika Jean Marie Le Pen dan Marine Le Pen .....	29
2.2.1 Kepemimpinan Partai Jean Marie Le Pen.....	29
2.2.2 Kepemimpinan Partai Marine Le Pen.....	30
2.3 Peningkatan elektoral FN dibawah kepemimpinan Marine Le Pen .....	33

### **BAB III**

#### **FAKTA SOSIAL DOMESTIK DAN INTERNASIONAL..... 39**

- 3.1 Domestik ..... 39
- 3.2 Internasional ..... 43

### **BAB IV**

#### **PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS HOLISTIK TERHADAP KEBIJAKAN POPULIS FRONT NASIOANAL (FN) ..... 50**

- 4.1 Teori Konstruktivisme..... 50
  - 4.1.1 Konstruktivisme ..... 50
  - 4.1.2 Konstruktivisme holistik ..... 52
- 4.2 Partai Front Nasional (FN) sebagai Identitas dalam membentuk Wacana Populisme Proposal “Marine Le Pen 2017” ..... 54**
  - 4.2.1 Kebijakan Luar Negeri..... 57
  - 4.2.2 Reformasi Lembaga ..... 61
  - 4.2.3 Kebijakan Ekonomi..... 64
  - 4.2.4 Kebijakan Keamanan ..... 69
  - 4.2.5 Kebijakan Sosial..... 74
- 4.3 Analisis Holistik Dalam Kebijakan Proposal Marine Le Pen 2017 ..... 76
  - 4.3.1 Pengaruh Norma dan Ideologi Front Nasional (FN) sebagai basis identitas dalam membentuk wacana kebijakan..... 83
  - 4.3.2 Pengaruh Norma dan Prinsip Lembaga Uni Eropa (UE) dalam membentuk kebijakan wacana FN ..... 85
  - 4.3.3 Wacana politik populisme dalam kebijakan “144 komitmen” Marine Le Pen ..... 87

### **BAB V**

- PENUTUP ..... 91**
  - 5.1 Kesimpulan..... 91
  - 5.2 Saran dan Rekomendasi ..... 98

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 99**

## LAMPIRAN

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Front National (FN) “144 Engagements Presidentiels” .....	57
Gambar 2 : Penerapan Logika Konstruktivisme Holistic .....	79
Gambar 3 : Siklus Perilaku Negara Berbasis Norma .....	82

## DAFTAR TABLE

Table 1: Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam kebijakan luar negeri.....	61
Table 2 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam sektor reformasi konstitusi.....	64
Table 3 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Ekonomi .....	68
Table 4: Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Imigrasi .....	71
Table 5: Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Keamanan.....	73
Table 6 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Sosial .....	75
Table 7 : Poin Kebijakan Domestic dan Kebijakan Luar Negeri FN.....	90
Table 8 : Kebijakan Marine Le Pen bertolak belakang dengan prinsip UE.....	90

## ABSTRAK

Marine Le Pen adalah pemimpin partai populis Front Nasional (FN), selain itu menjadi salah satu kandidat calon Presiden Prancis 2017. Marine Le Pen mempublikasi proposal kebijakan dalam “144 engagement Marine Le Pen 2017” yang terdapat kebijakan domestik dan internasional. Kebijakan tersebut secara radikal akan mengubah arah politik Prancis diantaranya keluar dari zona euro, zona Schengen dan akan melakukan referendum terkait keanggotaan Prancis dalam UE (frexit). Melalui teori konstruktivisme holistik, terdapat dua aspek penting yaitu level domestik dan level internasional. Proses pembentukan kebijakan-kebijakan tersebut didasari beberapa faktor yang melatabelakangi Marine Le Pen membentuk wacana kebijakan dalam ‘144 Komitmen’ tersebut. Seperti terdapat nilai dan norma dari partai FN sebagai partai populis sayap kanan. Idealitas lembaga UE yang dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan tidak sesuai dengan Realitas terjadi di Prancis. Melihat bahwa norma dan nilai yang terdapat dalam lembaga UE dominan, menjadi penghalang kepentingan masyarakat Prancis dan kepentingan nasional Prancis.

**Kata Kunci :** *Prancis, Marine Le Pen, Front Nasional, Partai Populis, kebijakan pemerintah, lembaga Uni Eropa, Teori konstruktivisme holistik*

## ABSTRACT

Marine Le Pen is the leader of the National Front (NF) Populist Party, other than that she became one of the candidates for the 2017 France presidential election. Marine Le Pen published a policy proposal in “144 engagement Marine Le Pen 2017” which contains domestic and international policy. Those policy will radically change the direction of French politic including leaving the Eurozone, Schengen, and referendum regarding France’s membership in the UE (Frexit). Through holistic constructivism theory, there are two important aspects namely the unit level and the systemic level. The process of forming these policies is based on several factors that marked Marine Le Pen formed a policy discourse in the '144 engagement. As there are values and norms of NF party as the right-wing populist party. The ideality of EU institutions formed by the government through policies not in accordance with reality occurred in France. Norms and values contained in the EU are dominant, become a barrier to the interests of French society and the national interests of France.

**Keywords :** *France, Marine Le Pen, National Front, Populist Party, Government Policies, European Union, Constructivism Holistic Theory*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prancis adalah bangsa merdeka di Eropa Barat dan pusat pemerintahan yang besar, Prancis juga merupakan sebagai negara Eropa terbesar ketiga setelah Rusia dan Ukraina. Prancis adalah negara Republik semi-presidensial, dengan mengadopsi nilai-nilai "*Liberty, Equality, Fraternity*". Prancis telah menjadi negara yang terlibat dalam beberapa peristiwa paling penting dalam sejarah Eropa, bahkan menjadi salah satu negara yang turut menjadi sejarah penting lahirnya paham liberalisme di Eropa. Lahirnya paham liberalisme di Prancis tidak terlepas dengan sejarah revolusi Prancis, hingga pendirian Republik kelima yang saat ini masih diterapkan. Sehingga pasca perang dunia berakhir, Prancis aktif mempromosikan nilai-nilai liberal dan demokrasi di Eropa. Selain itu juga Prancis menjadi salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya lembaga Uni Eropa sebagai solusi pasca perang panjang di Eropa (NWE, 2018) .

Prancis saat ini telah mengalami krisis terbesar di Republik Kelima, Prancis telah mengalami krisis mencapai tahap akhir, bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi juga dalam politik dan sosial. Prancis telah mengalami stagnasi ekonomi selama bertahun-tahun dalam dekade terakhir, karena beberapa faktor tertentu dan kapitalisme negara tersebut tidak lagi berfungsi. Perekonomian Prancis telah

mengalami penurunan bertahap selama bertahun-tahun, tanpa ada Presiden yang telah melakukan perbaikan (Rohr, 2013). Setidaknya dua masa jabatan pemerintahan terakhir yang menjadi masa terburuk, dengan meninggalkan warisan dengan angka pengangguran yang tinggi, ekonomi yang terhenti dan kekacauan politik. kedua Presiden tersebut yaitu Presiden Nicholas Sarkozy dari partai UMP (2007-2012), yang kedua saat Prancis dipimpin oleh Presiden dari Partai Sosialis yaitu Francois Hollande (2012-2017) (Wall, 2014, pp. 60-61).

Pada masa pemerintahan Presiden Hollande, kondisi Prancis mengalami perpecahan politik dipemerintahannya. Selain telah menerima warisan kondisi Prancis yang buruk, Hollande juga dianggap tidak mampu memperbaiki situasi Prancis. Hingga masa jabatan ditahun pertama, Hollande sudah kehilangan popularitasnya dikalangan masyarakat bahkan para elit politik partainya. Setidaknya Presiden Hollande telah melakukan pembubaran pemerintahan dan membentuk kabinet baru, dengan keempat kalinya sejak Francois Hollande menjadi Presiden dari tahun 2012 yang lalu. Bahkan perombakan kabinet tersebut didasari atas kondisi Prancis yang mengalami stagnasi ekonomi dan menghadapi ketidakpuasaan sosial masyarakat (Chesnot, 2014). Bahkan pada masa jabatannya, pengangguran hampir 11% dan pertumbuhan pada tahun 2014 diperkirakan hanya 0,5%, sementara Hollande telah gagal memberikan tingkat pertumbuhan yang dijanjikan pada awal masa jabatannya. (Penketh, 2014).

Masalah ekonomi yang terus menurun menjadikan Prancis mengalami ketidakstabilan, yang membuat masyarakat tidak lagi mempercayai pejabat

pemerintah. Salah satu janji kampanye Hollande juga terkait program “anti-austerity”, yang pada realitasnya Hollande menjalankan kebijakan penghematan. Bahkan kebijakan pemerintah untuk penghematan hanya memperburuk, karena penghematan tersebut berimbas pada orang-orang miskin yang semakin sulit (Aldelman, 2014).

Prancis merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Uni Eropa, dibuktikan bahwa Prancis selalu terlibat dalam hampir semua sektor bersama anggota lainnya dalam merumuskan kebijakan di Uni Eropa. Prancis juga bukan hanya bagian dari ekonomi ‘regional’ Eropa dan struktur politik, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem ‘global’. Prancis telah terlibat dalam beberapa perjanjian lembaga tersebut. Seperti adanya kesepakatan *The Treaties of Paris* pada tahun 1951 dan *Rome* pada tahun 1957, *Single European Act (SEA)* pada tahun 1986 dan *Treaty on European Union (TEU)* pada tahun 1992. Kesepakatan tersebut bukan hanya membangun institusi bersama dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga telah menetapkan empat tujuan utama kebijakan seperti pertanian, serikat pabean dalam proses GATT, pasar tunggal, mata uang tunggal, banyak kebijakan lain yang telah dikembangkan dalam lembaga tersebut seperti dalam isu lingkungan, industri, keamanan, kebijakan luar negeri dan kebijakan lainnya (Caton, 2015, pp. 78-79).

Dinamika dunia internasional di era kontemporer saat ini pada kenyataannya telah memberikan banyak tantangan terhadap kinerja UE. Seperti halnya dilansir dari Eurobarometer yang menerbitkan sebuah laporan dimana beberapa tahun terakhir UE dalam situasi keadaan darurat. Laporan tersebut berisikan bagaimana masyarakat

Eropa mulai memperhatikan masalah yang ada secara jangka panjang yang akan mempengaruhi kepentingan nasional negara. Laporan tersebut melampirkan data adanya penurunan angka kepercayaan (pesimis) masyarakat terhadap kinerja UE dalam isu yang terjadi dianggap tidak terselesaikan dengan baik. Berangkat dalam fase krisis UE di tahun 2011-2012 dengan angka pesimis 46%, hingga adanya isu pengungsi dan terorisme yang pecah di tahun 2015-2016 yang masih menduduki angka pesimis yang cukup tinggi diangka 44% (Bildt, 2017).

Setelah berhasilnya Inggris keluar dari UE yang diusulkan oleh partai populis tentu telah mempengaruhi publik opini masyarakat Eropa secara keseluruhan. Adanya keputusan Brexit telah dijadikan legitimasi politik dalam strategi kampanye beberapa kelompok populis Eropa di tahun 2017. Bahkan Brexit sebagai bentuk Euroskeptis telah dijadikan momentum untuk mendorong agenda mereka. Sehingga partai-partai populis tersebut seperti *Front National* di Prancis, *Alternatif For Germany* di Jerman, *Party of Freedom* di Belanda dan partai populis lainnya telah melakukan pertemuan untuk memperkuat strategi kampanye 2017 (Connolly, 2017).

Menarik bahwa di tahun 2017 adalah tahun dimana partai sayap kanan dapat maju mengikuti serangkaian agenda pemilu di beberapa negara Eropa. Seperti halnya di Prancis, Marine Lee Pen dengan Partai Sayap kanan-jauh Front Nasional (FN) mampu berhasil maju pada putaran kedua sebagai kandidat presiden yang artinya partai tersebut telah berhasil menjadi oposisi utama di Prancis. Setelah FN didirikan pada tahun 1972 oleh Jean-Marine Lee Pen dengan poros partai yang lebih ekstrem. Sehingga pada tahun 2011, Marine Lee pen telah mengambil alih FN dengan

memberikan transformasi yang dikenal dengan '*De-demonization*' atau mengubah wajah baru FN (Ivaldi, 2014, pp. 1-4). Sebab terdapat perbedaan ideologi FN lama dibawah Jean-marine Lee Pen dengan FN baru yang dibawah oleh Marine Lee Pen. Walaupun baik Jean Marine Lee Pen ataupun Marine Lee Pen sama-sama membawa pesan populis, namun populisme dibawah Jean tidak begitu mencolok karena dia lebih membuat penekanan elemen radikal yaitu rasis dan anti-semitisme. Sebaliknya, FN dibawah pimpinan Marine Lee Pen lebih menekankan pada retorika populisme. Sejak Marine Lee Pen memimpin FN telah memberikan peningkatan secara signifikan dalam partai tersebut yaitu dalam peningkatan jumlah keanggotaan, peningkatan suara pemilu, serta peningkatan opini publik (Stockemer & Barisione, 2016, pp. 2-6).

Gerakan sayap kanan Front Nasional (FN) telah menjadi bagian yang sangat penting dalam budaya politik Perancis. Front Nasional (FN) telah menjadi partai yang lebih kuat dari sebelumnya. Menguatnya partai Front Nasional (FN) juga adanya situasi Perancis yang buruk dimasa pemerintahan Hollande. Dimana pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta angka pengangguran yang semakin tinggi, hingga adanya krisis pengungsi Eropa akibat perang Suriah dan Irak membuat masyarakat Perancis menjadi salah satu negara yang paling pesimis atas kelangsungan hidup mereka dalam dunia global. Bahkan saat warga Perancis diwawancarai, sekitar 67% mengatakan bahwa negara mereka menurun akibat dampak negatif dari globalisasi. Adanya serangan terorisme yang menewaskan 300 orang dalam jangka dua tahun menambah kekhawatiran masyarakat Perancis. Sehingga kekhawatiran masyarakat

tersebut dijadikan fokus Lee Pen dalam kampanye 2017 untuk merangkul kaum muda dan perempuan (Corre, 2017, pp. 3-6). Kebijakan tersebut dirumuskan dalam wacana 144 komitmen “Marine Le Pen 2017” yang dipublikasi langsung dalam web resmi FN (National, 2017).

Program kampanye Marine Le Pen dalam bentuk proposal “Marine Le Pen 2017” telah menuai banyak perdebatan dikalangan akademisi dan pejabat politik. Selain menampilkan beberapa program yang jelas bertolak dengan nilai-nilai liberal, program tersebut juga akan mengubah arah politik Prancis secara keseluruhan bahkan akan mengubah konstitusi Prancis sebagai negara dengan mitra lembaga UE. Sebagaimana yang sering dikampanyekan oleh Le Pen, ia ingin melakukan referendum keanggotaan Prancis dalam UE (frexit). Marine Le Pen sebagai seorang pemimpin yang mewakili suara rakyat biasa ingin secara penuh melindungi kepentingan warga pribumi terkhusus para pekerja. Marine le Pen akan berjanji mendorong kebijakan yang mana lebih memprioritaskan kepentingan nasional, dimana yang selama ini selalu bertentangan langsung dengan aturan UE.

Kebijakan yang dipublikasi oleh partai Le Pen, setidaknya berisikan kebijakan domestik dan kebijakan internasional. Kebijakan domestik yang berisikan beberapa program secara penuh untuk kepentingan rakyat dan kepentingan nasional Prancis, seperti memperoteksi ekonomi, kedaulatan moneter dan menolak perjanjian perdagangan bebas, menolak impor, keluar dari zona euro dan Schengen, membatasi imigrasi bahkan akan mengembalikan mata uang nasional Prancis.

Setelah pemilu Prancis dilaksanakan pada bulan Mei, dengan hasil polling yang telah memenangkan Emanuel Macron sebagai Presiden Prancis. Macron telah mendapatkan hampir dua pertiga suara dan berhasil mengalahkan Le Pen dengan hasil telak. Data hasil polling terakhir Macron mendapat 66%, sedangkan Le Pen hanya mendapatkan 34% suara (Association, 2017). Sebelumnya pada putaran pertama yang dilaksanakan 23 April 2017, Emanuel Macron mendapatkan 23,75% disusul dengan suara Marine Lee Pen mendapatkan hasil 21,53%. Marine Le Pen berhasil menyingkirkan kandidat dari partai lainnya yaitu Francois Fillon dari Partai Republik (LR) dengan 19,91%, Jean-Luc Melenchon dari La France insoumise (FI) dengan 19,64% dan yang terakhir diduduki oleh Partai Sosialis (PS) Benoit Hamon dengan 6,2%. Marine Le Pen setidaknya telah mendapatkan 7,6 juta pada putaran pertama yang membuat dirinya dapat berhasil maju ke putaran kedua sebagai oposisi utama (Samuel, 2017). Walaupun hasil putaran kedua tidak membawa Le Pen naik di kursi kepresidenan, namun dia mampu mengumpulkan 11 juta pemilih. Le Pen telah meraup dua kali lipat suara yang didapatkan ayahnya saat mecalonkan diri menjadi Presiden di tahun 2002 silam. Peningkatan jumlah dukungan tersebut untuk pertama kali terjadi dalam partai FN tentu hal ini menunjukkan seberapa sukses strategi normalisasi persepsi FN diopini publik (Cabanès, 2017, pp. 5-6). Sehingga bisa dikatakan bahwa kebijakan wacana “Marine Le Pen 2017” yang berisikan 144 komitmen Presiden telah berhasil mempengaruhi politik masyarakat Prancis (National, 2017).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang, dengan beberapa data yang sudah peneliti kumpulkan. Maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Bagaimana proses pembentukan wacana kebijakan “144 Komitmen Marine Le Pen“ oleh Front Nasional (FN) dalam kampanye Presiden 2017 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka peneliti mengasumsikan bahwa ada beberapa tujuan mengapa penelitian ini diperlukan untuk menjawab hipotesa atau rumusan masalah. Penulis mencoba untuk melihat bagaimana dinamika perpolitikan Prancis saat ini, mengingat benua Eropa sedang mengalami gelombang populisme di beberapa kawasan. Benua Prancis yang notabene merupakan negara yang cukup dominan dalam penerapan liberalisme saat ini sedang mengalami ketidakstabilan politik. Banyaknya isu-isu kontemporer yang tidak bisa terselesaikan dengan baik membuat masyarakat mulai khawatir dengan ancaman kepentingan nasionalnya. Adanya konsep globalisasi yang melekat serta prinsip-prinsip liberalisme dengan adanya kebebasan dan demokrasi telah memunculkan banyak masalah.

Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam partai Front Nasional sebagai partai sayap kanan dapat mempengaruhi politik masyarakat Perancis. Partai



Front Nasional (FN) telah mempublikasi kebijakan dalam proposal dokumen “Marine Le Pen 2017” sebagai program kampanye calon Presiden Prancis. Program tersebut telah mengadopsi nilai-nilai populis yang berhasil mendapat perhatian dari masyarakat, melalui pencapaian suara dukungan yang signifikan. Dalam kebijakan tersebut, setidaknya terdapat dua fokus kebijakan yaitu kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menjawab bagaimana proses pembuatan kebijakan wacana tersebut sehingga telah berhasil mendapat dukungan dari kalangan masyarakat Prancis. Serta apa faktor yang mendorong pembentukan program-program kampanye Marine Le Pen tersebut sebagai kandidat partai sayap kanan Front Nasional (FN).

#### **1.4 Signifikansi**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana proses perubahan tren politik yang terjadi di Prancis. Setelah 50 tahun Prancis didominasi oleh partai-partai yang pro dengan kelembagaan UE, baik Partai Republik dan Partai Sosialis selalu bergantian untuk berkuasa dan memimpin pemerintahan Prancis. Krisis yang terjadi di Prancis baik ekonomi, sosial dan politik menambah skeptisme masyarakat terhadap partai tersebut. Banyak kalangan dari masyarakat Prancis yang meligitimasi posisi UE sebagai pembatasan terhadap kedaulatan negara untuk kepentingan nasional. Sehingga norma dan nilai struktur UE sangat berpengaruh dalam memaksa negara anggota UE termasuk Prancis untuk mentaati aturan yang ada sesuai dengan moral yang berlaku sebagai anggota.

Partai FN sebagai aktor yang mewakili suara hak-hak populis, telah mendapat dukungan yang sangat signifikan. Terutama dalam pemilihan Presiden 2017, Marine Le Pen sebagai kandidat dari partai FN yang berhasil menyingkirkan partai mainstream pada putaran pertama. Serta pada hasil putaran terakhir, Marine Le Pen berhasil meraup 11 juta pemilih yang merupakan jumlah tertinggi sepanjang perjalanannya. Sehingga signifikansi dari penelitian ini adalah selain meneliti isu kontemporer, penelitian ini juga bagaimana FN dapat mempengaruhi dinamika politik Prancis sebagai negara anggota UE. Prancis yang merupakan salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya UE, namun isu Frexit telah menjadi perhatian kalangan akademisi dan media online. Sehingga penelitian ini akan melihat bagaimana FN sebagai partai sayap kanan membentuk sebuah wacana kebijakan sesuai dengan faktor norma-norma yang berlaku baik dalam domestik dan internasional.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, bahwa terlalu luasnya pembahasan yang akan penulis teliti oleh karenanya penulis membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini berfokus kepada arah politik (ide dan gagasan) secara umum dari Partai Sayap Kanan Front Nasional (FN) sehingga akan terlihat bagaimana ide tersebut dapat mempengaruhi politik masyarakat Perancis. Melihat bahwa sejak FN dipimpin oleh Marine Lee Pen, banyak kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat (populis). Kedua, bagaimana Proses FN membentuk kebijakan wacana partai seiring dengan pengaruh atau faktor-faktor yang melatar belakangi gagasan tersebut. Cakupan penelitian ini dimulai pada tahun 2011-2017, sesuai dengan masa

kepemimpinan Marine Le Pen yang berhasil meningkatkan suara dukungan secara signifikan.

## **1.6 Kajian Pustaka**

Pembentukan Uni Eropa (UE) merupakan suatu model dari produk liberalisme yang menjadi ideologi dominan di Benua Eropa. Uni Eropa adalah sebuah organisasi ekonomi dan politik yang cukup berpengaruh di dunia dalam tatanan sistem internasional. Selain telah mencapai perbaikan bertahap dengan perluasan keanggotaan dan bidang kerja sama, UE juga telah memperkuat posisinya sebagai aktor internasional. Langkah-langkah perkembangan ini juga adalah usaha penekanan adanya identitas politik bersama. Sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Sare Aydın Yılmaz yang menjelaskan bahwa proses perubahan EU yang luar biasa merupakan sebuah model pembentukan identitas yang dapat dianalisis dengan pendekatan konstruktivisme. Bagaimana fenomena tersebut dapat mengungkapkan pentingnya hubungan sosial dan bagaimana hubungan tersebut dapat ditempuh dengan baik. UE telah melalui perubahan dalam penciptaan sebuah identitas politik Eropa, dimana UE memberikan sebuah tanda yang jelas terkait prinsip dan norma yang diadopsi, melalui deklarasi, perjanjian, kebijakan yang dikonsolidasikan secara bersama. Hal tersebut dirancang dengan sebuah hak-hak demokrasi, kebebasan dan HAM sebagai prinsip universal dalam identitas politik Uni Eropa baik internal maupun eksternal. Sehingga identitas politik dalam bentuk seperti ini telah menjadi bagian struktur yang sangat kokoh dan konstan dalam perkembangan Uni Eropa di era kontemporer (Yılmaz, 2014, pp. 50-67).

Integrasi Uni Eropa yang telah memantapkan 70 tahun dengan prinsip demokrasi dan kapitalisme mulai mengalami ketidakstabilan. Seperti halnya dalam buku yang ditulis oleh Nora Langenbacher, tulisan tersebut terkait perkembangan ekstremisme sayap kanan dan populisme sayap kanan. Partai sayap kanan mulai bangkit dan semakin kuat sejalan tantangan era kontemporer saat ini yang menjadi tantangan bagi Uni Eropa. Eksistensi partai sayap kanan beberapa tahun mulai meningkat bahkan di negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman yang notabane negara yang sangat berpengaruh di Eropa. Dalam buku tersebut lebih menekankan pada menguatnya partai radikal sayap kanan sendiri atas dasar pemanfaatan isu sosial, penggambaran elit politik dan memberi asupan identitas nasional. Bahwa penekanan partai sayap kanan radikal bertindak sebagai pembela "masalah sosial" sesuai dengan situasi sosial di setiap negara cukup berpengaruh dalam pertumbuhan mereka (Langenbacher & Schellenberg, 2011, pp. 17-25).

Dalam politik internasional kontemporer saat ini adanya penyaluran ideologi saat ini lebih diterapkan pembentukan identitas dalam sebuah partai. Dimana partai sebagai alat untuk memegang kekuasaan dan pengontrolan terhadap kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga baik paham liberal maupun komunisme sering diidentikan dalam ideologi partai. Walaupun spektrum partai politik lebih mempunyai banyak varian, namun sering dikenalkan dengan sebutkan partai kanan dan partai kiri. Penyebutan kelompok kiri dan kelompok kanan pada era saat ini, Perlunya memahami terkait sejarah pemakaian istilah tersebut. Dalam buku yang ditulis oleh Elliot H Durham yang menjelaskan terkait bagaimana asal mula istilah

tersebut digunakan. Dalam spektrum politik adanya istilah “sayap kanan” dan “sayap kiri” lebih sering disebut sebagai label simbolis untuk kelompok liberal dan kelompok konservatif. Penggunaan kategori ini dengan tujuan pengelompokan partai yang berbeda dimana dengan demikian memetakan bidang politik. Namun dalam sejarahnya memang mengacu pada pengaturan tempat duduk politisi selama Revolusi Prancis. Pemisahan tempat duduk pada saat itu sebagai dua faksi antara kelompok pendukung raja dan penentang raja. Hingga pada abad ke-19, label tersebut terus digunakan untuk mengklasifikasi “partai sayap kanan” dan “partai sayap kiri”. hingga istilah tersebut sekarang digunakan untuk menggambarkan spektrum politik yang berlawanan seperti perbedaan ideologi. Bahkan mereka masih menggunakan pengaturan pembagian duduk dalam badan legislatif. Dalam buku tersebut juga mendukung terkait dasar pemikiran dari kedua partai tersebut. Sayap kiri ditandai dengan adanya prinsip kebebasan, kesetaraan, hak, kemajuan, reformasi dan internasionalisme. Sedangkan sayap kanan lebih menekankan pada wewenang, hirarki, tradisi, tugas dan nasionalisme. Ilmuan politik dan para analisis menganggap kaum sayap kanan seperti konservatis, fasis dan tradisional. (Durham, 2017, pp. 41-43)

Partai sayap kanan jauh merupakan partai yang memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, dimana banyak beberapa peneliti yang melihat bahwa partai sayap kanan ini telah menjadi partai yang sukses. Dalam Jurnal Matt Golden menjelaskan terdapat kebangkitan partai ini di beberapa negara belahan Eropa. Para ilmuwan telah mengklasifikasikan partai sayap kanan jauh berdasarkan pada radikalisme atau

ekstremisme, populisme, dan nasionalisme. Kebangkitan partai ini membuat alarm secara luas yang membuat gelisah para pembuat politik, akademisi dan media. Dalam jurnal tersebut, penulis membagi dua variabel dalam penelitiannya yaitu adanya sisi permintaan dan penawaran dalam analisis keberhasilan partai sayap kanan ini. Dalam sisi permintaan memusatkan pada ‘keluhan’ yang akan menciptakan sebuah ‘permintaan’. Sedangkan pada variabel penawaran dimana bagaimana pilihan keputusan yang akan dibuat oleh partai tersebut dapat mempengaruhi kesempatan politik mereka (Golder, 2016, pp. 477-97)

Salah satu partai sayap kanan jauh yang sukses berkembang adalah partai Front Nasional (FN) di Prancis. Partai sayap kanan-jauh Front Nasional (FN) telah tumbuh menjadi partai yang cukup berkembang, dalam sejarah pembentukannya memang partai tersebut adalah partai yang tidak setuju atas pembentukan Integrasi Uni Eropa, sehingga tidak heran bahwa FN sering disebut partai Euroskeptis. Dalam Tesis yang ditulis oleh Alexandra Campione yang menjaskan bagaimana faktor meningkatnya dukungan FN terutama berangkat dari isu krisis ekonomi yang melanda Eropa. Dimana dalam penelitian tersebut penulis mengasumsikan bahwa yang melatarbelakangi pertumbuhan dukungan terhadap FN adanya situasi Prancis yang tidak stabil pada masa Hollande yaitu masa pemerintahan sebelumnya. Penulis mengidentifikasi bahwa situasi Prancis yang semakin memburuk dalam ekonomi, politik dan sosial. Dibuktikan bahwa masyarakat Prancis mulai skeptis dengan kepemimpinan Hollande dan beralih mendukung FN, dimana Lee Pen mampu memainkan isu tersebut untuk untuk mendapat keuntungan popularitasnya. Fakta ini

merupakan bagian integral dari kedua strategi partai menuju ke 2017 pemilihan umum. Hal itu di buktikan adanya peningkatan dukungan FN dari 2009 ke pemilu 2014 (Campione, 2015, pp. 33-42)

Kelompok partai sayap kanan-jauh sendiri terdapat dua kelompok dengan prinsip yang berbeda. Dalam thesis yang ditulis Elise Saint-Martin, tulisan tersebut menggambarkan kelompok partai sayap kanan-jauh membagi dua kelompok yaitu 'extremisme sayap kanan' dan 'radikalisme sayap kanan'. Seringkali kedua kelompok tersebut mempunyai nilai yang sama, namun radikal sayap kanan merupakan jenis yang muncul pada era 1970-an. Para akademisi meyederhanakan kedua karakteristik tersebut dengan pandangan yang mendasar mereka terhadap demokrasi. Pihak ekstrem kanan cenderung anti-konstitusional dan anti demokratis yang dalam praktiknya seperti *anti-partyism*, *anti-parliamentarianism*, dan *anti-pluralism*. Serta ekstrem kanan sangat menolak adanya prinsip kesetaraan manusia secara fundamental yang artinya mempunyai fitur nasionalisme, rasisme, dan exclusionisme. Sedangkan dengan pihak radikal kanan masi nominal menerima demokrasi prosedural dan juga mematuhi lembaga-lembaga politik yang demokratis. dalam orientasinya radikal sayap kanan mungkin anti-demokrasi tetapi tidak benar-benara memusuhi demokrasi liberal.

Front Nasional (FN) sering kali disebut sebagai partai yang menjadi cikal bakal diantara partai-partai radikal sayap kanan di seluruh bagian Eropa. sejak didirikan pada tahun 1972, FN telah memimpin pada gelombang ketiga di awal 1980an menjadi partai yang paling mapan dari jenisnya. Hingga tahun 2000an secara

konsisten mampu mencapai 15% dari suara nasional. Bahkan banyak para akademi menjadikan partai Front Nasional (FN) sebagai “*New Radical Right*” sebagai model partai sayap kanan terkemuka di Eropa. Partai radikal kontemporer mengklaim mempromosikan xenophobia, etno-nasionalisme, otoritarianisme sosial budaya, dan anti-sistem populisme. Sehingga dalam tulisan tersebut mengkategorikan FN sebagai model partai radikal kanan atas 3 unsur dari platform politik FN. Pertama, FN terus mempromosikan anti-imigrasi sebagai bentuk melindungi hak tradisi pribumi. Kedua, FN telah membentuk kebijakan-kebijakan dengan menggunakan ancaman ketidakamanan yang menggambarkan ideologi *socioauthoritarian* dari radikal kanan. Ketiga, menciptakan isu adanya euro-globalisasi yang memperluas atas unsur-unsur strategi dari nial nasionalisme-populisme radikal kanan (Saint-Martin, 2013, pp. 1-6).

### **1.7 Landasan Teori**

Sesuai dengan masalah yang terjadi di Eropa terutama dalam analisis dinamika politik Perancis, penulis menggunakan pendekatan Konstruktivisme sebagai landasan teori. Teori ini lahir sebagai pembaharuan terhadap teori sebelumnya seperti realisme dan liberalism. Terdapat beberapa tokoh-tokoh pemikir konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional seperti Friedrich Kratochwill, John Ruggie, Nicholas Onuf dan Alexander Wendt (Jackson & Sorensen, 2007, p. 206). Teori Konstruktivisme pertama kali diterapkan dalam politik internasional oleh Nicholas Greenwood Onuf dengan istilah “Konstruktivisme” dalam hubungan internasional pada tahun 1989. Karya terkenalnya tentang konstruktivisme ada dalam buku “World



of our Making”, dia berpendapat bahwa negara selayaknya seperti manusia yang hidup (Onuf, 1989, p. 5).

Konstruktivisme sendiri merupakan teori sosial yang dikembangkan dalam studi sosiologi. Dalam studi hubungan internasional konstruktivisme digunakan untuk menjelaskan fenomena dunia pasca Perang Dingin. Melihat bahwa teori sebelumnya seperti realisme atau neorealisme dan liberalisme atau neoliberalisme sendiri hanya menjelaskan yang bersifat material. Sehingga banyak tokoh konstruktivis yang tidak puas terhadap penjelasan dari teori sebelumnya dalam menjelaskan realitas hubungan internasional. Seperti terkait bagaimana persoalan dinamika perubahan internasional, sifat dasar praktik kelembagaan ataupun lahirnya masalah hak asasi manusia (Burchill, 2001, pp. 195-196).

Beberapa pemikir yang cukup terkenal salah satunya adalah Alexander Wendt yang menulis buku terkait adanya teori sosial. Konstruktivisme sendiri lebih menekankan pada ide atau gagasan dalam memahami perilaku dunia internasional. Seperti halnya teori konstruktivisme lahir sebagai teori baru yang memperdebatkan teori sebelumnya yang hanya memahami situasi yang bersifat materil. Konstruktivisme hadir untuk meyakini bahwa adanya negara, perang, sistem internasional, nuklir dan bentuk lain yang muncul dalam dunia internasional adalah hasil dari konstruk ide. Seperti dalam buku yang terkenal Wendt bahwa kehidupan sosial adalah “*ideas all the way down*”, yang artinya bahwa ide atau gagasan akan mempengaruhi adanya pembentukan sistem dengan perilaku para aktornya. Konstruktivisme juga meyakini bahwa terkadang faktor ideasional (pemikiran)

memiliki kekuatan yang lebih besar dari kekuatan materi. Dalam buku Alexander Wendt juga terdapat dua prinsip utama dalam konstruktivisme yang pertama, adanya struktur dari asosiasi manusia bukan hanya ditentukan oleh kekuatan material namun adanya *shared ideas* yang mana dilakukan oleh interaksi para aktor. Kedua, bahwa adanya identitas dan kepentingan aktor bukan dibangun dengan sendirinya namun dibentuk atas gagasan atau ide dengan tujuan tertentu (Wendt A. , 1999, pp. 92-96). Bagi Wendt perlu menjunjung tinggi adanya peran identitas sebagai salah satu faktor membentuk kepentingan dari perilaku negara terhadap dinamika agen dan struktur. Seperti dalam asumsi dasar Wendt dalam “*Social Theory of International Politics*” dalam bukunya yang menerangkan bahwa,

*Constructivism is a structural theory of the international system that makes the following core claims: (1) states are the principal units of analysis for international political theory; (2) the key structures in the states system are intersubjective rather than material; and (3) state identities and interests are in important part constructed by these social structures, rather than given exogenously to the system by human nature [as (neo)realists maintain] or domestic politics [as neoliberals favour].*

(Wendt A. , 1999, p. 35)

Dalam klaim konstruktivisme Wendt di atas, artinya dalam menganalisa fenomena hubungan internasional adanya variable idealis merupakan kekuatan yang sangat penting yang terbentuk secara sosial. sehingga identitas yang terbentuk melalui proses interaksi menjadi penentu yang mendasari perilaku aktor dalam membentuk sebuah kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kaum konstruktivisme meyakini bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antar satu dengan lainnya

dalam proses interaksi antar aktor, agen dengan adanya fenomena yang terjadi dalam kehidupan dunia. Dimana pengetahuan yang ada saat ini merupakan konstruksi sosial. Sehingga kaum konstrutivis meyakini terdapat elemen penting diantaranya identitas, agen, struktur dan aksi yang saling berkaitan dalam pembentukan struktur sosial (Wendt A. , 1999, pp. `135-138)

Prinsip-prinsip utama konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt menekankan pada pandangannya terhadap filsosofis Thomas Hobbes, John Locke dan Immanuel Khant yang bercirikan pada 3 budaya anarki. Dalam konstruktivisme yang di kemukakan oleh Alaxnder Wendt dalam melihat sistem internasional (anarki) terdapat 3 sistem yaitu Hobbesian sistem terkait perang dan konflik, Lockean Sistem mengenai adanya rivalitas, dan Kantian Sistem mengenai kerjasama. Ketiga sistem tersebut merupakan prinsip utama Wendt dalam menggambarkan perubahan dalam isu-isu hubungan internasional. Dimana setelah Hobbesian Sistem telah gugur setelah terjadinya perang dingin yang membuat negara berhenti berkonflik dan melakukan kerjasama akibat munculnya isu-isu baru di kanca internasional. Sehingga hal tersebut membuat lahirnya aktor-aktor baru non-negara yang terlibat dalam interaksi politik (Wendt A. , 1999, pp. 246-248). Pemikiran Wendt melihat peradaban modern saat ini memusatkan pada sistem Lockean dengan adanya persaingan antar negara serta pada sistem Kantian yang melihat negara-negara saat ini memlih untuk saling bekerjasama untuk menguntungkan satu sama lainnya. sehingga pandangan tersebut melihat bahwa fenomena dunia internasional telah

mengalami dinamika perubahan dari sistem Lockean ke sistem Kantian begitupun sebaliknya.

Pada tahun 1990an, di era perkembangannya konstruktivisme di kategorikan dalam 3 bentuk yang berbeda yaitu “sistemik,” “unit level,” dan “holistic.” Dimana ketiga kategori tersebut di kelompokkan sesuai dengan aliran para pemikir konstruktivis yang berbeda.

1. konstruktivisme sistemik, dalam kategori ini mengadopsi perspektif neo-realis dalam “Third-image” dengan fokus interaksi antar aktor negara kesatuan. Lebih tepat dalam contoh model konstruktivis sistemik ini di contohkan dalam karya tulisan Alexander Wendt. Dimana dalam fokus Wendt menerangkan konstruktivis yang terjadi dalam interaksi antar negara ruang lingkup internasional. Sehingga dalam perspektif ini berfokus pada struktur ideasional dan normative dari lingkungan internasional dan mengabaikan perubahan di ranah politik luar negeri
2. konstruktivisme level unit, merupakan kategori yang sebaliknya dari sistemik dimana fokus dalam tingkat unit/domestik. Dimana aliran ini diwakili oleh Peter Katzenstein dalam melihat tingkat unit di sini berkonsentrasi pada hubungan antar sosial domestik, norma, hukum, identitas dan kepentingan negara serta strategi keamanan negara. Namun, level unit disini sebagai negara tidak begitu penting mengingat bahwa ideasional atau norma individu bisa berperan lebih penting dalam domestik. Dalam hal ini karakter individu

dapat mempengaruhi interaksi sosial di dalam negara. Sehingga individu dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara (Tamaki, 2015, p. 14).

3. konstruktivisme holistik dimana menjadi jembatan bagi kedua kategori yang sebelumnya yaitu sistemik dan level unit. Dimana aliran ini diwakili oleh pemikir John G. Ruggie dan Friedrich Kratochwil yang menjembatani antara aspek internasional dan domestik dalam menjelaskan bagaimana identitas dan kepentingan negara bisa terbentuk. Dalam perspektif analisisnya mereka berusaha untuk memperlakukan domestic dan internasional sebagai dua wajah tunggal dalam tatanan sosial dan politik (Reus-Smit, 2005, pp. 199-201)

Konstruktivis holistik ini merupakan sebuah perspektif umum yang telah menghasilkan analisis perubahan internasional yang beragam, namun keduanya saling melengkapi antara fokus pada pergeseran besar sistem internasional dan juga perubahan sistem modern. Baik Ruggie dan Kratochwil dalam karyanya sama-sama memusatkan perhatian pada bagaimana fenomena domestik dan internasional berinteraksi satu sama lain untuk menentukan peraturan untuk menyusun tatanan internasional. Sehingga konstruktivis holistik dapat menjelaskan sistem dan perubahan sistemik. Dalam pandangan holistik, perilaku kebijakan luar negeri adalah konsekuensi dari interaksi antara kedua identitas baik identitas korporasi (domestic) dan identitas sosial (internasional). Menurut pendekatan ini juga setiap transformasi dalam identitas korporasi maka akan mempengaruhi pembentukan identitas di tingkat internasional sehingga negara akan mengubah prioritas mereka ke identitas yang baru (Price & Reus Smit, 2014, pp. 262-269) . Dari perspektif di atas, penelitian ini sesuai

dengan pendekatan yang dibangun oleh konstruktivis holistik dalam menyoroti pentingnya ide dan norma-norma internal dan eksternal dalam membentuk sebuah kebijakan luar negeri. Sehingga baik identitas domestik maupun norma-norma dalam identitas masyarakat internasional memiliki dampak tersendiri dalam menganalisa kepentingan dan perilaku negara.

Perubahan dukungan masyarakat Eropa terhadap partai politik sangat mempengaruhi pergerakan ideologi partai itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi di Eropa saat ini, banyaknya partai dominan yang kehilangan dukungannya tentu membuat partai sayap kanan semakin kuat dengan memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah Marine Le Pen mengubah citra partai yang lebih populis dalam masa hampir 7 tahun, FN telah tumbuh dengan dukungan yang cukup pesat dalam perkembangannya. Hingga hasil pemilu 2017 membuat partai tersebut mampu meraup suara 11 juta masyarakat Perancis, dan menjadi oposisi utama dalam pemilihan presiden yang telah menyingkirkan para kandidat partai lainnya. Sehingga "*Shared Idea*", yang di keluarkan dalam kebijakan kampanye FN telah mampu menggubah politik masyarakat Perancis.

Dalam asumsi konstruktivisme itu sendiri yang percaya bahwa adanya politik internasional kontemporer saat ini adalah sebuah 'ide' yang dibentuk melalui sebuah identitas. Dimana identitas juga sangat berpengaruh dalam pembentukan struktur dan kepentingan. Adanya peran partai sayap kanan dalam mempengaruhi dinamika politik Perancis adalah sebuah model kekuatan dari adanya ide. Mengingat bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi dengan menganut sebuah ideologi yang di

dalamnya terdapat beberapa kelompok, tujuan dibentuknya partai politik sangat berkaitan dengan kekuasaan, serta membentuk dan mengontrol kebijakan terjadi terhadap pemerintah ataupun publik (Budiarjo, 1989, p. 159). Sehingga wacana dan usaha yang dibentuk oleh Front Nasional Perancis dalam membentuk sebuah asumsi publik sebagai satu tindakan untuk jalan mereka mendapatkan kepentingan dalam pemerintahan. Sesuai dengan perspektif konstruktivistik holistik, bahwa transformasi yang akan berubah dalam politik domestik yang sedang terjadi di Perancis akan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri Perancis di tingkat internasional.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosial yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini adalah data kualitatif (tanpa angka-angka dan bilangan), dimana akan bersifat substansif dengan interpretasikan melalui rujukan, acuan, dan referensi ilmiah. Penelitian ini juga menggunakan susunan deskriptif analisis yang merupakan metode penelitian dengan menganalisis, mengelola, meneliti data-data yang sudah terkumpul sehingga akan menghasilkan kesimpulan dan di susun dengan sistematis agar masalah tersebut dapat di pahami. Metode deskriptif juga sebagai metode untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai obyek yang akan diteliti dengan cara mengumpulkan sumber.

### 1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian ini sesuai dengan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif maka menjadikan data adalah subyek penelitian. Dimana data atau sumber yang dapat bukan hanya sebagai media pendukung tetapi juga sebagai subyek atau sumber utama penelitian. Tipe penelitian ini juga bukan hanya dalam data sistematis namun terdapat analisis hubungan antar variabel (Leng, 2002, p. 117). Sehingga penelitian ini akan menganalisis fenomena dari sejarah atau budaya dari negara tersebut melalui literatur yang telah didapat sehingga data adalah sebagai rujukan utama penelitian ini.

### 1.8.3 Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan cara pengambilan data dengan data sekunder. Data diperoleh dengan mencari sumber-sumber yang mendukung penelitian tulisan ini yaitu dengan buku-buku ilmu hubungan internasional, metodologi penelitian, dan materi-materi yang mendukung tulisan ini. Sumber-sumber tersebut didapatkan melalui studi literatur termasuk akses data melalui internet. Akses internet dilakukan dengan selektif melalui alamat situs yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Data yang telah didapatkan, kemudian akan dipilih sesuai dengan tema penelitian. (sugiyono, 2009).



#### 1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan cara analisa data. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah didapat baik jurnal, buku atau pun dari media cetak yang bersifat kredibilitas yang terpercaya. Proses penelitian akan dilakukan secara sistematis yaitu dimulai dengan mengelola data, meneliti dan menganalisis sumber yang telah terkumpul sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis teliti. Mengingat bahwa metode yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif maka kajian yang didapat hanya bersumber dari literatur atau kajian pustaka yang dapat mendukung penelitian.

## **BAB II**

### **FRONT NASIONAL (FN) DAN MARINE LE PEN**

Front Nasional (FN) merupakan salah satu partai sayap kanan jauh tertua di Eropa. Sebagai payung seluruh aliran gerakan sayap kanan Prancis seperti xenophobia, rasisme, anti-fasis, dan nasionalisme. Gerakan tersebut telah menjadi *identitas collective*, dan telah menciptakan sebuah norma baru dalam membentuk sebuah wacana kebijakan partai. Akibat adanya latar belakang tersebut, sehingga kebijakan FN saat ini sangat berpengaruh dengan norma identitasnya. Pada bab ini berkaitan dengan bagaimana perkembangan FN, dalam ranah perbaikan opini publik, serta perluasan keanggotaan dan peningkatan elektoral pemilu.

#### **2.1 Sejarah Front National (FN)**

Partai Front Nasional (FN) adalah salah satu partai sayap kanan ekstrem Prancis yang didirikan pada tahun 1972 oleh Francois Duprat dan Francois Brigneau, namun lebih sering dikaitkan dengan sosok Jean Marie Le Pen sebagai pemimpin partai (1972-2011). Front Nasional (FN) sebelumnya adalah sebuah organisasi aktivis gerakan neo-fasis *Ordre Nouveau* (orde baru) yang dibentuk pada tahun 1969. Gerakan *Ordre Nouvean* dimaksudkan untuk menyatukan semua gerakan sayap kanan ekstrem Prancis dalam satu payung yang sama, pada saat itu dengan semangat nasionalisme Prancis untuk menentang partai politik di arena pemilihan Prancis (Saxena, 2015, p. 235). Pada tahun 1970-an, gerakan *Ordre Nouvean* telah memiliki 5000 anggota yang beroperasi di pinggiran politik sayap kanan Prancis. Hingga pada tahun 1972, semua aliansi berbagai kelompok membentuk Front Nasional (FN)

sebagai sebuah partai dengan Jean Marie Le Pen dipilih sebagai Presiden partai. Jean Marie Le Pen sendiri merupakan salah satu tokoh yang dikenal karena keterlibatannya pada perang al jazair. Serta Jean Marie Le Pen pada saat itu telah berhasil menjadi salah satu pejabat politik dalam parlemen Prancis. Dalam upaya menciptakan citra yang lebih moderat, partai mencari seorang pemimpin yang dapat meningkatkan kredibilitas elektoralnya. Sehingga Jean Marie Le pen dipilih karena dianggap telah mempunyai pengalaman politik yang cukup untuk meningkatkan suara dukungan partai (Saint-Martin, 2013, pp. 7-9).

Setelah pendirian partai FN di tahun 1972, FN mengalami sejarah sukses dan kegagalan yang sangat panjang dari jenisnya. Sebab Partai-partai sayap kanan radikal telah hampir mati di Perancis empat dekade setelah Perang Dunia II, membuat mereka kesulitan untuk membangun kembali dukungan masyarakat terhadap FN. Mereka sebagian besar berada di pinggran sistem politik yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat sampai awal 1980-an. Partai FN merayakan keberhasilan pertamanya di awal 1980-an, dimana menjadi sebuah partai yang heterogen dengan menyatukan semua gerakan diantaranya neo-fasis, anti-gaullist, aktivis, dan para intelektual sayap kanan lainnya (Louis T. , 2014, pp. 3-4). Namun pada tahun 1998, FN mengalami perpecahan ditubuh internal partai bahkan diantaranya mereka telah membuat partai saingan yang mengambil setengah pejabat partai, sehingga membuat FN semakin tidak stabil. FN tidak lagi bisa menutupi fakta bahwa partainya telah jatuh dalam krisis yang sebagian diantaranya karena retorika ekstremis dan anti-

semitnya membuat partai kurang mendapat perhatian (Crépon, Dézé, & Mayer, 2016, pp. 72-74).

Banyak diantaranya para akademisi mengkatagorikan FN sebagai partai sayap kanan populis. Memang sejak pendirian FN berkaitan erat dengan kelompok nasionalis seperti Populisme Poudjadis, kelompok rezim Vichyisme, serta kelompok yang terlibat pada perang Aljazair. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan FN tidak jauh dari retorika kelompok tersebut. Seperti halnya FN sering kali disebut sebagai partai sayap kanan populis, melihat bahwa dalam kampanye dan program yang diberikan oleh Jean Marie Le Pen erat dengan gaya populis (Davies, 2002, pp. 124-125).

Sepanjang sejarah, gaya populis memang sudah melakat pada retorika yang digunakan oleh partai Front Nasional (FN). FN selalu bermain dengan pesan populis misalnya dalam slogan “Le Pen, Le Peuple” dalam kampanye pada pemilihan Presiden Jean Marie Le Pen di tahun 1984. Populisme sendiri dapat dipahami sebagai suatu ideologi ataupun gaya politik. Secara lebih luas, populis memiliki pandangan demokrasi tertentu dan cenderung menolak institusi yang didirikan. Populisme juga mempunyai sikap anti-kemapanan dan anti-institusional, seperti halnya jelas dalam akar gerakan Jean Marie Le Pen yang sejak awal sangat menjunjung nilai nasionalisme, rasisme, fasisme, anti-imigrasi serta anti-globalisasi (Johansson, 2010, pp. 24-26).

## **2.2 Perbedaan Retorika Front Nasional (FN) Jean Marie Le Pen dan Marine Le Pen**

### **2.2.1 Kepemimpinan Partai Jean Marie Le Pen**

Kepemimpinan Jean Marie Le Pen telah memberikan unsur yang sangat penting dalam perkembangan Front Nasional (FN). Sejak berdirinya FN, Jean Marie Le Pen berusaha untuk membangun partai untuk meningkatkan suara di ranah elektoral Prancis. Sejak awal FN sangat mendukung nasionalisme serta sering dikaitkan dengan xenophobia dan anti-semitisme. Sering kali citra publik dan gaya Jean Marie Le Pen telah banyak dibandingkan dengan partai sayap kanan radikal lainnya di Eropa Barat di akhir abad ke-20. Jean Marie Le Pen adalah orang pertama yang mendirikan gerakan sayap kanan di Prancis selama memasuki Republik Kelima. Hingga di awal 1980-an, FN mulai mendapatkan kembali perhatian dari masyarakat secara perlahan. Ketika Jean Marie Le Pen menjadi pemimpin partai, Jean lebih berkonsentrasi pada perjuangan melawan sosialisme dan menggalang nilai-nilai tradisional Prancis (Anttila, 2017, pp. 7-8).

Selama perjalanan dinamika politik FN, Prestasi Jean-Marie Le Pen dalam memimpin FN dalam kanca politik Perancis baru bisa dilihat pada pemilu tahun 2002. Dimana Jean-Marie Le Pen bukan hanya berhasil memenangkan rekor 16,9% suara sebagai calon Presiden ekstrem kanan, tapi dia juga telah memenuhi syarat untuk maju dalam putaran kedua sebagai kandidat partai yang bersaing dengan Jacques Chirac. Namun pada tahun 2007, Jean Marine Le Pen harus mendapat hasil yang buruk pada pemilihan umum. Pertumbuhan basis dukungan FN menurun,

membuat Jean hanya mendapat 10,75% suara. Hasil tersebut dikatakan sebagai hasil terburuk selama dua dekade dan tersingkir pada putaran pertama. Dimana FN mendapatkan posisi keempat, dan telah kehilangan satu juta pendukung antara 2002 dan 2007 yang sebagian besar telah mendukung Sarkozy (Grabow & Hartleb, 2013, pp. 168-169).

Demi membangun kembali partai dengan normalisasi wajah baru FN, Marine berusaha untuk menjauhkan diri dari karakter ayahnya yang penuh dengan kontroversial. Setelah sekian bulan, Marine Le Pen bersitegang dengan ayahnya akhirnya ia memutuskan untuk mengusir ayahnya dari partai pada 2015. Alasannya bahwa Jean telah memberikan efek buruk terhadap citra FN, yang sering kali ia memberikan pernyataan-pernyataan terkait anti-semit Holocaust, serta sering memberikan komentar terkait sejarah Nazi. Sehingga karakter Jean yang lebih fulgar dan ekstrem sering kali memicu kebencian terhadap masyarakat Prancis. Marine Le Pen berusaha untuk menyingkirkan warisan tersebut dengan menormalisasikan partai agar dapat menarik lebih banyak popularitas dari pemilih. Bahkan Marine Le Pen akan mengusir semua anggota partai yang masih berurusan dengan pandangan ayahnya dengan citra “FN lama” yang ekstrem (Carvalho, 2017).

### 2.2.2 Kepemimpinan Partai Marine Le Pen

Marine Le Pen resmi menjadi Presiden partai FN dengan mendapat dukungan 67,65% suara pada 16 Januari 2011 di Tours kongres. Setelah mengalahkan saingannya yaitu Bruno Gollnisch yang merupakan rekan ayahnya. Marine Le Pen dipilih karena secara karakter yang lebih moderat, serta dipercayai akan memperbaharui retorik

partai dari citra lama Jean Marie Le Pen. Generasi baru pemimpin FN mencoba untuk secara bertahap menyempurnakan wacana FN dengan cara mempopulerkan ide-ide politiknya selama dekade terakhir. FN berupaya untuk melucuti partai dari elemen-elemen radikalnya dengan berfokus pada retorika yang lebih dapat diterima (Atabong, 2018, pp. 25-26) .

Tahun 2011 menjadi agenda khusus dalam strategi normalisasi partai atau yang dikenal dengan “de-demonization” Front Nasional (FN) dibawah kepemimpinan Marine Le Pen. Fokus utama setelah dia mengambil alih partai adalah memberikan kepercayaan publik terhadap FN untuk meninggalkan orientasi rasis dan anti-semit yang melekat pada partai ayahnya. Berjalan beberapa bulan setelah Marine Le Pen mengambil alih di tahun 2011, FN telah berhasil mendapatkan respon positif dari publik. Bahkan Marine Le Pen telah memperoleh dukungan dari para kaum intelektual dan para aktivis (Ivaldi, 2014, pp. 1-2). Setelah pergeseran politik FN tersebut menjadikan FN yang lebih moderat dibawah kepemimpinan Marine Le Pen. Dimana Marine Le Pen telah melunakan retorika lama dengan citra FN baru yang lebih konservatif dan partai pro rakyat. Hal tersebut membuat kepercayaan diri FN untuk dapat menjadi kekuatan politik dalam pemilu 2012 (Courmont, 2017, pp. 80-83)

Front National (FN) dibawah kepemimpinana Marine Le Pen mempunyai karakteristik berbeda dengan ayahnya. Jika Jean Le Pen selama ini menolak adanya peran dominan dari perempuan. Maka FN dibawah kepemimpinan Marine Le Pen telah mengakat isu kesetaraan gender yang begitu penting untuk menarik para

pemilih. Mengingat bahwa ia merupakan seorang wanita yang dapat menjadi seorang pemimpin, serta dapat berperan penting tanpa dibatasi oleh gender. Isu gender yang dikampanyekan oleh Marine Le Pen juga menyentuh terkait islam yang telah membatasi hak-hak perempuan dengan adanya jilbab, burqa, dan juga kekerasan seksual para imigran (Scrinzi, 2017, pp. 129-131).

Pendekatan yang agak berbeda dari Marine Le Pen terhadap isu-isu tertentu yang cukup menarik untuk memperoleh lebih banyak dukungan untuk partai. Selain adanya strategi de-demonisasi, Marine Le Pen mengangkat isu globalisasi dan atas ketidakmampuan Uni Eropa untuk dapat menemukan solusi yang memuaskan untuk isu-isu tertentu, yang telah mengakibatkan perubahan pada pemilih. FN telah dapat memperluas basis pemilihannya secara substansial. Marine Le Pen juga dianggap lebih baik dalam memasarkan partai FN. Dari pada ayahnya, Le Pen telah mampu menyamakan keyakinan dan kebijakan partai yang lebih dapat diterima. Dari strategi untuk membersihkan citra kejam yang selama ini menjadi citra khas partai dibawah pimpinan Jean Marie Le Pen. Walaupun nilai-nilai yang diambil hampir tetap sama, namun Marine Le Pen telah berhasil menambah aspek pada esensi FN dengan nilai-nilai populis (Williams, 2011, pp. 684-685).

Jean Marie Le Pen menggunakan nada populisme tertentu, sedangkan Marine Le Pen membawa populisme ke tingkat yang lebih baru. Meskipun kebijakan keduanya tidak jauh berbeda, namun strategi untuk mendekati mereka yang menjadi perbedaan dengan khasnya masing-masing. Populisme Jean belum secara tegas diucapkan dalam pidato-pidato. Hal tersebut juga bisa dilihat dalam proposal program



pemilu Jean Marie Le Pen 2007 yang mengandung 69 halaman. Program tersebut memiliki nada yang sangat netral dan tidak ada referensi secara langsung mengarah pada sasaran populisme seperti kalangan menengah kebawah. Program tersebut tidak ada usulan ukuran populis, bahkan program Jean hanya memiliki sedikit karakter anti-elit (Stockemer, 2017, pp. 7-10).

Berbeda dengan Marine Le Pen lebih menggambarkan dirinya sebagai pemimpin karismatik, seorang pemimpin yang membangun kembali Perancis sebagai negara besar. Bahkan program presiden Marine Le Pen 2012 tidak disajikan sebagai program partai, tetapi sebagai proyek pribadi Marine Le Pen. Program marine Le Pen juga lebih memiliki karakter yang sangat anti-elitis. Marine Le pen menampilkan dirinya sebagai wakil dari orang-orang jujur dan pekerja keras yang harus bersaing dengan para elit korup. Misalnya, Marine Le Pen akan memberikan kebijakan untuk menghentikan pengeluaran yang berlebih dari para elit. Dia ingin menghentikan korupsi, elitisme dan ketergantungan Prancis pada organisasi internasional (Cabanes, 2017, p. 3).

### **2.3 Peningkatan elektoral FN dibawah kepemimpinan Marine Le Pen**

Setelah Marine Le Pen mengambil alih jabatan Presiden Partai Front Nasional (FN) dengan dedemonization, strategi tersebut telah berhasil dalam ranah internal dan eksternal. Tahun 2012 menjadi tahun sejarah bagi Marine le Pen, untuk pertama kalinya setelah menjadi pemimpin partai juga sebagai kandidat dari partai yang akan maju pada pemilihan Presiden. Marine Le Pen membawa slogan *Ressemblement Bleu Marine* dalam kampanye pemilihan Presiden 2012 (Russo, 2014, p. 181). Marine

menyiapkan program baru serta memadukan beberapa isu kampanye ayahnya sebagai platform partai seperti dalam isu imigrasi, keamanan dan identitas nasional. Kampanye yang dibawakan oleh Marine Le Pen juga dengan membawa pesan populis dengan fokus para pekerja serta nasionalisasi Prancis. Pada putaran pertama, Marine Le Pen berhasil menarik suara 18% dimana hasil tersebut meningkat 8% dari hasil terakhir pemilihan presiden ayahnya di tahun 2007 (Stockemer, 2017, p. 24).

Keberhasilan lainnya juga bisa dilihat saat FN maju dalam Parlemen Eropa di tahun 2014. Dimana FN mendapatkan 25% suara dan mengamankan 24 anggota di Parlemen Eropa, sehingga dikatakan suara yang meningkat pada pemilihan sebelumnya di 2009. Pada tahun 2015, FN dalam pemilihan daerah telah mendapatkan 27% suara sehingga memenangkan lebih dari 350 kursi serta mendapat 60 kursi lokal. Front Nasional (FN) juga berhasil mendapat 2 kursi perwakilan di Majelis Nasional dan juga 2 senator di Senat. Hasil dari perkembangan partai setelah memimpin dari perluasan keanggotaan, opini publik, serta peningkatan hasil pemilu membuat dirinya bisa menjadi kandidat yang kuat dalam pemilihan Presiden di tahun 2017 (Martinelli, 2016, pp. 34-37).

Pada pemilihan Presiden 2017 pada babak pertama, telah dimenangkan oleh Emmanuel Macron yang berada pada posisi pertama dengan hasil 24%. Sedangkan posisi kedua menempatkan Marine Le Pen dengan 21,3%, disusul oleh Francois Fillon dengan 20.0%, 19.6% oleh Jean-Luc Melenchon dan terakhir oleh Benoit Hamon dengan 6.4%. Dari hasil polling tersebut menentukan bahwa Macron dan Marine Le Pen lolos dan maju pada putaran kedua mendatang. Marine Le Pen telah

berhasil menyingkirkan 3 partai lainya dengan perolehan suara tipis dengan Macron, bahkan dua diantaranya merupakan kandidat dari partai besar yang selama ini selalu berkuasa (Aisch, 2017). Kedua kandidat yang tersisa mempunyai kebijakan yang bertolak belakang. Jika Marine Le Pen yang berlatar belakang dari sayap kanan yang akan membawa perubahan secara besar-besaran diseluruh spectrum kebijakan Prancis. Maka Macron yang berasal dari partai tengah akan mewakili perubahan moderat (Wese, 2017).

Hasil pemilihan Presiden Prancis 2017, menjadi salah satu sejarah bagi kandidat partai Front Nasional (FN) yaitu Marine Le Pen. Marine Le Pen berhasil menjadikan FN partai opisisi utama, setelah menyingkirkan sainganya yang merupakan kedua partai mainstream pada hasil putaran pertama pemilihan Presiden pada april 2017. Prancis memilik dua platform partai besar yaitu partai sosialis dan partai republik, mereka selalu menjadi kekuatan yang tidak terputus selama 50 tahun. Mereka selalu menjadi partai yang memiliki banyak pemilih dikalangan masyarakat, serta selalu menjadi partai yang berkuasa di dalam tubuh parlemen Prancis (Amraoui, 2017). Sehingga hasil putaran pertama yang telah menyisahkan dua partai kecil yang bersejarah, baik Macron yang berasal dari partai En Marche yang notabane partai yang baru dibentuk 2016 silam. Sedangkan FN telah mendapatkan peningkatan suara dukungan yang lebih besar dari pemilihan Presiden sebelumnya dan dapat maju ke putaran kedua (Henley, 2017).

Setelah kedua partai besar Prancis tersingkir dari pemilihan Presiden, bisa diartikan bahwa masyarakat Prancis ingin memiliki wajah baru dalam dinamika

politik Prancis. Banyak diantara masyarakat yang selama ini mendukung kedua partai tersebut, mulai beralih mendukung Marine Le Pen dan FN. Selama ini partai-partai tradisional yang berkuasa membuat situasi Prancis semakin memburuk. Globalisasi yang semakin membuat rakyat Prancis menderita, angka pengangguran yang tinggi, imigrasi yang membludak, dan maraknya ancaman terorisme. Selama ini mereka dianggap tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi dan membela kepentingan Prancis dalam menghadapi perusahaan multinasional dan Uni Eropa (UE). Sehingga Le Pen dianggap sebagai sosok yang dapat mewakili dan melindungi kepentingan rakyat Prancis. Le Pen juga berhasil menjangkau anak-anak muda untuk mendukung partainya (Villegente, 2017).

Menguatnya dukungan partai FN tentu telah memberikan wacana-wacana yang akan merusak stabilitas Eropa, terkhusus dengan stabilitas politik Prancis. Mengingat bahwa kebijakan yang akan diterapkan oleh Prancis tentu akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan luar negeri Prancis. Siapa yang akan menjadi presiden tentu akan menentukan keputusan-keputusan negara dalam ranah domestik dan internasional. Prancis yang selama ini menjadi salah satu negara yang menganut prinsip liberalisme dan demokrasi. Menjadi negara yang menginisiasi adanya integrasi Uni Eropa (UE) dengan sistem perdagangan bebas, penerapan mata uang tunggal, zona bebas Schengen, serta kebebasan persaingan kerja dan menjadi negara yang cukup berpengaruh dalam kestabilan ekonomi Uni Eropa (UE). Selama puluhan tahun Prancis berada pada aturan-aturan yang terlibat langsung dengan integrasi UE. Sehingga jika Marine Le Pen berhasil menduduki kursi kepresidenan, maka arah

politik Prancis secara struktural akan berubah secara total dengan mereformasi semua konstitusi yang berkaitan dengan aturan yang akan merugikan negara (Berezin, 2007, pp. 11-13). Mengingat bahwa Marine Le Pen akan lebih menekankan pada kepentingan nasional, memprioritaskan warga Prancis, serta membatasi segala aktivitas internasional yang tidak menguntungkan bagi Prancis. Selayaknya pada kampanye yang dilakukan oleh Trump, Marine Le Pen juga akan membawa Prancis kembali untuk menjadi negara besar (Nossiter, 2017).

Marine Le Pen berhasil merangkul suara pemilih yang cukup tinggi. Pada putaran pertama Le Pen berhasil meraup suara 21% yaitu sekitar 7,6 juta pemilih (Rodionova, 2017). Walaupun dalam hasil final putaran kedua pemilihan Presiden, Marine Le Pen harus mendapatkan kekalahan yang hanya mendapatkan 34%, sedangkan Emmanuel Macron mendapat kemenangan telak dengan meraup suara 66% suara. Namun Marine Le Pen telah menorehkan sejarah baru bagi dinamika perpolitikan FN di ranah politik Prancis. selain telah menjadi oposisi utama yang patut diperhitungkan, FN juga telah meraup suara dukungan 34% atau sekitar hampir 11 juta pemilih yang mana merupakan jumlah tertinggi yang pernah dimiliki oleh partai (Mulholland & Samuel, 2017).

Peningkatan jumlah pemilih partai FN, juga menambah dinamika panjang gelombang partai populis sayap kanan di Eropa. Setelah banyaknya isu-isu yang menjadi kekhawatiran masyarakat Prancis, tentu menambah angka peningkatan pesimisme terhadap keberlangsungan integrasi Uni Eropa (UE). Setelah krisis ekonomi pada 2007 silam, telah membuat perekonomian Eropa tidak stabil bahkan

sampai saat ini dampak kejatuhan ekonomi tersebut masih terasa di Prancis. Gelombang imigrasi, peningkatan angka pengangguran, tingginya islamophobia dan adanya isu ancaman terorisme menambah legitimasi kelompok partai populis untuk dapat memainkan isu-isu dari kekhawatiran masyarakat Eropa. Sehingga wacana tersebut dapat menarik suara pemilih yang selama ini merasa tidak puas terhadap partai-partai arus utama yang telah berkuasa (Haris, 2018).

## **BAB III**

### **FAKTA SOSIAL DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

Prancis merupakan salah satu negara Eropa yang mempunyai nilai-nilai liberalisme yang cukup mapan. Mengingat bahwa liberalisme di Prancis sudah menjadi ideologi utama dalam pembentukan kebijakan domestic Prancis. pemerintah Prancis selama ini telah terikat oleh norma yang berlaku di internasional, seperti adanya ikatan moral dalam penerapan aturan Uni Eropa. sebagai negara anggota, Prancis mendorong adanya nilai kebebasan dari norma lembaga tersebut seperti demokrasi, kapitalisme, HAM dan ekonomi. Namun fakta sosial Prancis pada kenyataannya telah menghadapi masalah-masalah dari kekacauan ekonomi dan politik. Bahkan pemerintahan selama ini telah memberikan kebijakan-kebijakan yang dianggap telah membuat Prancis semakin memburuk.

#### **3.1 Domestik**

Pada abad ke-21, negara Prancis sedang mengalami kekacauan politik dan ekonomi yang kian memburuk. Prancis mengalami berbagai masalah yang begitu kompleks, seiring berjalanya arus globalisasi yang tidak lagi kian terbendung. Sejak masa dua dekade terakhir, Prancis mengalami kondisi lebih darurat dari negara Eropa lainnya. Setidaknya kondisi krisis ekonomi dan pengangguran yang semakin menjadi bumerang bagi pemerintahan atas tuntutan dari masyarakat Prancis. bahkan ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut telah menurunkan opini publik untuk percaya terhadap pemerintah (Chrisafis, 2012).

Gagalnya pemerintah dalam memperbaiki situasi politik Prancis terutama dalam mengurangi angka pengangguran serta memperbaiki perekonomian negara menjadi masalah utama Prancis saat ini. Bahkan dua wajah pemerintahan yang berbeda dianggap menjadi masa pemerintahan yang terburuk, baik Nicolas Sarkozy yang berada di Partai Konservatif UMP maupun Francois Hollande dari Partai Sosialis. Kedua partai tersebut selama ini telah mendominasi parlemen selama kurang lebih 50 tahun dalam dinamika politik Prancis.

Berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Sarkozy setidaknya telah memberikan warisan stagnasi ekonomi dan pengangguran yang tinggi. Sehingga kondisi buruk Prancis menjadi pekerjaan rumah Hollande untuk bekerja keras memperbaiki situasi tersebut (Chhor, 2016).

Pada masa pemerintahan Hollande, banyak dari kalangan politisi dan kalangan masyarakat yang menganggap dirinya menjadi seorang presiden yang gagal di Prancis. Sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Prancis, setelah memenangkan pemilihan Presiden pada tahun 2012 silam sering dianggap hanya sebagai batu loncatan setelah kekecewaan yang dihadapi masyarakat Prancis terhadap Nicolas Sarkozy. Sehingga kemenangan yang didapatkan oleh Hollande sebagai kandidat calon Presiden Partai Sosialis, atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap Sarkozy serta partai UMP yang dianggap tidak bisa memperbaiki situasi buruk Prancis (Chrisafis, 2012).

Sejak 2012, pada awal masa jabatannya di pertengahan 2012, angka pengangguran masih pada angka 10%. pengangguran meningkat sebanyak 500.000



orang. Perancis memiliki tingkat pengangguran pemuda yang sangat tinggi. Demikian pula, warga negara Perancis dengan latar belakang imigran, terutama kaum muda, menghadapi kesulitan besar untuk berintegrasi ke dalam pasar tenaga kerja. Walaupun Pemerintahan Hollande memang mengadopsi beberapa reformasi pasar tenaga kerja. Hingga berjalan di akhir jabatannya, pengangguran masih dalam angka yang tinggi (Murphy, 2017).

Pada masa jabatannya, Hollande meminta Perdana Menteriya untuk melakukan agenda reformis untuk memangkas utang publik dan belanja negara secara besar-besaran dan juga untuk menstimulasi bisnis yang nanti akan merangsang pertumbuhan ekonomi (Gaffney, 2015). Dalam usaha untuk mengatasi dampak krisis keuangan 2008, Hollande memberikan 2 reformasi ekonomi. Pertama, dijuluki “Macron Law” yang pada saat itu Emmanuel Macron masih menjadi menteri ekonomi, program tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah untuk memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan pembayaran dan jam kerja yang lebih fleksibel untuk para pekerja. Kedua, memberi peluang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan untuk membuat kelonggaran lebih besar tentang perekrutan, pemecatan, upah dan jam kerja sesuai dengan kondisi ekonomi, bukannya dibatasi oleh prosedur perundingan bersama (Hanley, 2016). Namun kedua reformasi tersebut menimbulkan banyak aksi protes diberbagai kalangan. Adanya Undang-undang ketenagakerjaan tersebut juga memicu demonstrasi yang ditentang oleh serikat buruh dan kalangan mahasiswa yang

mengatakan hal tersebut akan berkaitan dengan melemahnya perlindungan para pekerja (Bureau, 2016).

Dalam laporan tentang ekonomi Perancis pada tahun 2015, OECD melaporkan: "fiskal melemah, dengan defisit buruk, pengeluaran pemerintah yang cukup besar, dengan pajak tinggi dan meningkatnya utang publik." Sehingga hal tersebut yang mendorong Hollande pada akhirnya mengambil tindakan untuk penghematan yang lebih besar, juga pemotongan belanja publik (Murphy, 2017).

Sedangkan dalam Kebijakan pajak pemerintahan Hollande dianggap tidak konsisten. Menaikkan pajak baik untuk individu dan untuk perusahaan diawal sebelum mulai mengurangi beban pajak pada tahun 2015 dan 2016. Hollande juga mengisyaratkan niatnya untuk menerapkan tarif pajak penghasilan 75% atas pendapatan yang diperoleh di atas 1.000.000 euro per tahun, untuk menghasilkan penyediaan dana pembangunan bagi pinggiran kota yang terabaikan, dan untuk kembali ke defisit nol persen dari PDB pada 2017 (Samuel, 2012). Secara keseluruhan, masa Hollande telah dianggap sebagai periode pajak yang berlebihan, Namun didorong oleh situasi yang cukup dramatis yang dihadapi oleh perusahaan Prancis, pemerintah Hollande membuat langkah penting untuk menurunkan beban pajak kepada orang-orang kaya. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Hollande memberikan keringanan pajak yang cukup besar sekitar € 30 miliar untuk perusahaan (Stiftung, 2018).

Pada urusan imigrasi, Hollande memberikan kebijakan untuk siap mengambil 24.000 pengungsi sebagai bagian dari rencana Uni Eropa untuk menerima lebih dari

100.000 pengungsi yang datang. Sesuai dengan kebijakan dari UE dengan mendukung “permanent, mandatory system”, yang mewajibkan setiap anggota UE untuk setidaknya menerima 120.000 imigran. Walaupun jajak pendapat yang menunjukkan 55 persen orang Prancis menentang, dan menyatakan seharusnya Prancis mengurangi prosedur suaka untuk mengatasi krisis migrasi Uni Eropa, Namun Hollande mengatakan suaka adalah hak konstitusional dan kewajiban moral (Pineau, 2015).

Pemerintah pada saat itu juga menyadari bahwa membuka banyak imigran, maka akan banyak tentangan yang akan dihadapi. Seperti halnya fakta sosial yang terjadi di Prancis, Hollande dihadapkan dengan adanya serangkaian serangan teroris yang menyerang Paris pada November 2015, ditambah dalam kasus Nice pada Juli 2016. Krisis pengungsi yang berkelanjutan membuat gelombang imigran tidak berdokumen telah menjadi ancaman. Sejak tahun 2015, Prancis telah mengalami serangkaian terorisme secara beruntun. Dua tahun terakhir setidaknya Prancis telah menyaksikan hampir 240 orang tewas akibat serangan tersebut. Serangan teror Islam jihadis terutama berkaitan dengan ISIS telah menambah islamophobia yang berkembang di Prancis (Dearden, 2017).

### **3.2 Internasional**

Benua Eropa adalah salah satu kawasan yang menjadi tonggak sejarah dunia internasional. Dimana kawasan yang menjadi sejarah perkembangan ideologi liberalisme yang pada saat itu menjadi kekuatan dominan di dunia internasional pasca runtuhnya ideologi komunisme (Skirbekk, 2005, pp. 64-66). Secara umum,

liberalisme mencita-citakan masyarakat dengan kebebasan individu, yang dicirikan akan kebebasan berpikir dan berpendapat. Menolak adanya pembatasan yang dilakukan negara ataupun agama. Liberalisme didasari pada argument moral yang menjamin hak dari suatu individu. Sehingga kaum liberal menekankan pada kesejahteraan individu sebagai bangunan fundamental dari sistem politik yang adil. Sistem politik monarki atau kediktatoran dianggap tidak bisa melindungi kehidupan dan kebebasan warganya. Oleh karena itu perhatian utama liberalisme adalah membangun institusi yang melindungi kebebasan individu, membatasi dan memeriksa kekuatan politik negara (McGlinchey, 2017, pp. 22-23).

Sistem internasional saat ini telah terstruktur oleh tatanan dunia liberal yang dibangun setelah perang dunia kedua (1939-1945). Institusi, organisasi dan norma internasional dari tatanan dunia ini telah dibangun diatas fondasi yang sama dengan institusi dan norma liberal domestik. Sebagai salah satu keinginan untuk menahan kekuatan negara yang penuh dengan kekerasan, yang membuat kekuasaan negara lebih terbatas dalam sebuah sistem internasional. Dunia barat berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai dan praktik-praktik liberal termasuk demokrasi liberal, industri kapitalis, nasionalisme dan perdagangan bebas. Mereka berusaha untuk bekerja keras untuk memperluas jangkauan intitusi barat seperti NATO, Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan lembaga lainnya yang lahir sebagai insiatif barat yang menjadi pilar liberalisme dalam tatanan internasional (Wenger & Zimmerman, 2014, p. 3).

Terciptanya “Komunitas Eropa Terpadu” saat itu merupakan bentuk institusional liberal yang dapat membantu untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian, pertumbuhan ekonomi dan politik (Lamt, 2005, p. 213). Selama 70 tahun, dunia Barat telah mantap bergerak menuju kerjasama dalam identitas politik bersama, untuk keterikatan dan saling mengandalkan ekonomi-politik melalui integrasi Uni Eropa (UE). Pada perkembangannya, Uni Eropa (UE) telah memberi peningkatan cukup signifikan baik dalam perluasan bidang kerjasama maupun perluasan keanggotaan yang telah mencakup seluruh negara di kawasan Eropa. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa UE yang bersifat supranasional telah menyerupai konfederasi. Mengingat dunia internasional kontemporer telah melahirkan aktor-aktor baru seperti MNC ataupun organisasi internasional lainnya yang membuat negara bukan lagi aktor utama (Lefebvre, 2012, pp. 1-3).

Pembentukan *European Economic Community* (EEC) perjanjian Roma pada 1957, yang ditanda tangani oleh 6 negara Eropa, yang bertujuan untuk kerja sama dalam bidang batu bara dan baja Eropa. Selain itu juga sebagai kesadaran terhadap dampak negatif atas peperangan yang telah terjadi di masa lalu, yaitu pancaknya pasca perang dunia ke-II. Perang yang terjadi di Eropa menyebabkan negara-negara Eropa harus melakukan usaha-usaha untuk penyelamatan dari kemungkinan-kemungkinan peperangan di masa yang akan datang. Penyatuan Eropa ini juga sebagai gerakan perdamaian terhadap negara-negara besar yang telah berperang terkhusus untuk mencegah hegemoni Jerman, hingga melakukan perluasan pengembangan kelembagaan dan kebijakan. Sejak itu, lembaga ini terus berevolusi

dengan beberapa agenda yang lebih luas, bahkan dalam keanggotaannya telah melebar hingga mencakup 28 negara, termasuk negara-negara komunis sebelumnya di Eropa Tengah dan Timur (Wilkinson, 2016, pp. 10-12).

Pembentukan Uni Eropa (UE) adalah sebuah organisasi yang menjadi pendukung paling kuat dari tatanan liberalisme global. Uni Eropa sebagai produk yang dibentuk dalam suatu integrasi yang menyatukan negara-negara dalam satu sistem internasional, sehingga hal ini telah membentuk institusi dengan prinsip identitas bersama dengan menjalankan norma multilateral, pasar terbuka, kebebasan perdagangan, keamanan, hak asasi manusia, dan norma hukum internasional (Mcnamara, 2007, p. 1). Para pendirinya mengumpulkan kedaulatan di sektor-sektor tertentu dalam integrasi yang akan menumbuhkan rasa saling ketergantungan dan tidak memunculkan perang lain di masa yang akan datang. Serta sebagai resolusi dalam menekan kekuatan dan kekuasaan negara, dengan memulai kebijakan yang lebih diplomatis yaitu membentuk komunitas kerja sama yang lebih menguntungkan (Telò, 2014, pp. 2-3).

Dalam kesepakatan Uni Eropa (UE), setidaknya terdapat 3 pilar kerjasama UE yang telah disepakati oleh anggota yaitu Komunitas Eropa (EC), Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP), dan Peradilan dan Dalam Negeri (JAH). Pilar pertama, komunitas Eropa (EC) merupakan pilar yang sangat besar bagi lembaga tersebut karena telah mencakup berbagai aspek yang lebih luas. Pilar pertama ini juga berkaitan langsung dengan aturan kerjasama ekonomi, imigrasi dan pengungsi.

Sehingga pilar-pilar tersebut sangat krusial bagi penerapan tujuan nilai-nilai liberalisme dan demokrasi sebagai tujuan utama lembaga tersebut (Olsson, 2009).

Uni Eropa telah dibangun melalui serangkaian perjanjian-perjanjian yang mengikat, serta memiliki karakteristik dari entitas supranasional dan organisasi antar pemerintah. Pasca perang, negara-negara anggota berusaha untuk menyelaraskan undang-undang dan mengadopsi kebijakan secara umum untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Eropa. Anggota Uni Eropa bekerja sama untuk melaksanakan serikat pabean (*custom union*), pasar tunggal untuk barang, jasa, modal dan orang (*four freedom*), kebijakan perdagangan untuk dapat bergerak bebas, kebijakan pertanian, mata uang (*euro*). Serta mereka bekerja sama untuk berpartisipasi dalam wilayah gerakan bebas *Schengen* yang artinya memungkinkan orang-orang dapat berpergian tanpa pemeriksaan paspor. Selain itu UE berusaha untuk mengambil langkah-langkah untuk membangun kerja sama keamanan internal (Archick, 2017, p. 1). Sistem Politik Uni Eropa bisa dibagi 2 inti dimana mereka menganut prinsip liberalis dengan berusaha untuk menjamin hak-hak individu, termasuk juga dengan hak kaum minoritas yang tidak terwakilkan. Serta mereka menganut demokrasi dikarenakan lembaga mereka seharusnya menerjemahkan pandangan kedalam kebijakan publik.

Setelah Uni Eropa (UE) mengalami krisis Ekonomi pada 2007 silam, membuat negara-negara menjadi tidak stabil. Jatuhnya ekonomi Yunani tentu telah memberikan dampak yang cukup buruk kepada seluruh anggota UE dengan euro sebagai mata uang tunggal. Sehingga dampak krisis tersebut masih belum pulih oleh

sebagian negara-negara di zona euro untuk dapat memperbaiki ekonomi nasional (Copelovitch, Frieden, & Walte, 2016, p. 2). Namun masalah yang terjadi di Eropa bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi banyak masalah yang lain yang sangat kompleks sehingga menjadi tantangan UE sebagai organisasi regional. Prinsip yang diterapkan oleh UE dengan nilai demokrasi dan keterbukaan telah menjadi bumerang bagi negara-negara anggota. Komunitas UE sebagai kawasan liberal yang terbuka terhadap imigran serta UE yang beranggotakan negara-negara maju, telah menjadi tujuan tepat bagi para pengungsi untuk mendapatkan suaka politik di negara Eropa. Tidak heran jika Eropa telah mengalami pertumbuhan jumlah pengungsi yang melambung tinggi dikarenakan serangkaian perang regional di Timur Tengah (Florentina, 2017, pp. 174-175). Pada tahun 2015, Eropa mengalami runtutan serangan terorisme di beberapa negara salah satunya serangan mengejutkan di kota Paris. Bahkan tercatat jumlah teror di tahun 2015, merupakan teror dengan jumlah yang sangat tinggi yaitu 211 serangan terorisme (White, 2016). Hingga di tahun 2016, masalah yang terjadi di Eropa tidak berhenti dalam isu pengungsi dan terorisme saja. Namun, untuk pertama kalinya Eropa telah kehilangan salah satu negara anggota UE yaitu Inggris sebagai hasil referendum Brexit (Erlanger, 2016).

Gelombang imigran yang terjadi di Eropa telah menimbulkan ketidakstabilan di ranah internal UE. Satu sisi masalah tersebut bersinggungan langsung dengan krisis politik di dalam UE, namun disisi lain telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh dunia. Sedangkan Prinsip kebijakan UE yang menerapkan nilai-nilai fundamental dalam menghormati hak manusia dan hak sipil, kebebasan,



kesetaraan, perdamaian dan keadilan mengharuskan UE untuk memperhatikan situasi krisis politik yang terjadi. Implementasi proses penerimaan kewarganegaraan imigran dan suaka tentu memberikan kontradiksi terhadap kepentingan negara anggota yang mempertanyakan legitimasi kedaulatan setiap negara. Bahkan krisis pengungsi telah menimbulkan masalah baru dan mengganggu hubungan timbal balik antara negara anggota dengan UE. Pada saat yang sama, masalah tersebut telah mendorong pilihan politik nasionalis, radikalisme, xenofobia, dan intoleransi terhadap penerimaan imigran, sehingga krisis pengungsi saat ini tercermin sebagai krisis nilai dan krisis struktural terhadap prinsip Uni Eropa (Maldini & Takahashi, 2017, p. 55).

## **BAB IV**

### **PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS HOLISTIK TERHADAP KEBIJAKAN POPULIS FRONT NASIONAL (FN)**

Pradigma yang tepat dalam analisis studi kasus ini adalah menggunakan pendekatan Konstruktivisme Holistik yang merupakan salah satu varian atau cabang utama konstruktivisme. Penekanan pada struktur normative pada unit level dan sistemik bisa menjelaskan perilaku dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai Front Nasional sebagai aktor yang akan menciptakan sebuah kebijakan luar negeri Prancis. Berdasarkan konstruktivisme holistik, dimana pemikiran FN di ranah domestik yang akan menciptakan identitas korporasi dan identitas sosial. Artinya bahwa holistik dapat menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan populis dalam penekanan pada prioritas nasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Prancis. Kebijakan tersebut dijelaskan dalam proposal Marine Le Pen 2017, sehingga komitmen tersebut akan menjadi program Presiden. Walaupun program tersebut belum menjadi kebijakan luar negeri Prancis saat ini, akibat kekalahan yang didapatkan oleh Le Pen namun *collective identity* FN telah berhasil mendapatkan dukungan yang sangat signifikan. Fakta bahwa retorika populis yang tercantum pada proposal kebijakan kampanye Le Pen, telah berhasil mempengaruhi dinamika politik masyarakat Prancis. FN sebagai identitas Korporasi juga akan mempengaruhi perilaku negara dalam menentukan kebijakan luar negeri Prancis.

#### **4.1 Teori Konstruktivisme**

##### **4.1.1 Konstruktivisme**

Konstruktivisme adalah sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang muncul sebagai pendekatan baru yang menjadi penengah terhadap teori sebelumnya. Para pakar konstruktivis HI meyakini bahwa adanya signifikansi struktur ideasional dalam sistem internasional. Struktur ideasional dan materil saling bergantung dalam pembentukan sebuah sistem. Konstruktivis melihat bahwa perubahan yang terjadi di dunia internasional bukan hanya didasari oleh fakta materil tetapi juga ada peran dari kekuatan Ide. Walaupun para pakar lebih menunjukkan bahwa kekuatan ide menjadi kekuatan dominan dari pada materi. Konstruktivis mengakui bahwa keduanya memiliki kedudukan ontologis yang setara. Realitas dalam dunia hubungan internasional yang bersifat materil tidak berarti apa-apa tanpa adanya peran dari ide (pemaknaan). Sebaliknya, ide tidak akan berfungsi menjadi sebuah pemaknaan jika tidak direpresentasikan dalam bentuk huruf atau bentuk simbol lainnya atau dalam bentuk fisikal. Selain itu, konstruktivis juga mendoktrin tentang struktur internasional yang merupakan hasil dari distribusi kapabilitas ide, sehingga negara-negara lah yang bertindak sesuai dengan pola persebaran ide. Pola persebaran material lalu yang dimaknai sesuai dengan pola persebaran ide tersebut (Wendt A. , 1999, pp. 93-96) .

Konstruktivis juga melihat bahwa sejauh mana struktur dapat membentuk sebuah perilaku sosial dan aktor politik, baik individu maupun suatu negara, mengingat bahwa konstruktivis meyakini bahwa aspek normatif dan ideasional sama pentingnya. Konstruktivisme telah dibagi menjadi 3 varian yaitu konstruktivisme sistemik, konstruktivisme unit level dan konstruktivisme holistik. Pertama, Konstruktivisme sistemik yang berfokus pada struktur ideasional dan normatif dalam

lingkungan internasional, serta mengabaikan segala bentuk perubahan yang terjadi dalam ranah politik domestik. Fokus kajiannya adalah bagaimana munculnya norma, nilai dan identitas bersama dalam proses interaksi antar negara seperti kerja sama bilateral, regional, organisasi internasional lainnya. Kedua, Konstruktivisme unit level adalah kebaikan dari konstruktivisme sistemik, yang lebih berfokus pada ranah domestik, yaitu hubungan antara entitas sosial dengan nilai, norma-norma, hukum, identitas dan kepentingan suatu negara. Ketiga, Konstruktivisme holistik yang tidak memisahkan sektor domestik maupun internasional. Prespektif ini saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam pembentukan sebuah identitas dan kepentingan suatu negara (Reus-Smit, 2005, pp. 199-201).

#### 4.1.2 Konstruktivisme holistik

Konstruktivisme Holistik adalah varian ketiga, dimana varian ini berbeda dengan varian yang sebelumnya. Jika analisis konstruktivisme sistemik lebih menekankan pada interaksi antar negara, sedangkan analisis konstruktivisme unit level yang menekankan pada pembentuk norma dan identitas di ranah domestic. Maka konstruktivisme holistik menjembatani kedua ranah tersebut, artinya bahwa prespektif ini melihat domain domestik dan internasional adalah sebuah kesatuan yang tidak dipisahkan. Varian ini melihat bahwa baik domestik dan ranah internasional saling berinteraksi satu sama lain dalam proses pembentukan identitas dan kepentingan negara (Reus-Smith, 1999, pp. 165-166).

Perspektif konstruktivisme holistik juga melihat bahwa varian sistemik dan level unit telah menciptakan dikotomi antara faktor domestik dan internasional,

artinya varian holistik menyatakan kedua varian tersebut memiliki peran yang sama dalam pembentukan perilaku negara. Asumsi Holistik mempercayai bahwa faktor domestik akan mempengaruhi identitas korporasi (corporate identity) sebuah negara, sementara faktor internasional akan mempengaruhi (social identity) negara. Penjelasan dari identitas korporasi dimaksudkan bahwa bagaimana sebuah negara akan memandang dirinya sendiri, sedangkan identitas sosial menjelaskan bagaimana sebuah negara akan memandang dirinya dalam sistem internasional. Holistik meyakini bahwa identitas korporasi sebuah negara akan mempengaruhi identitas sosialnya, begitupun akan sebaliknya. Sehingga kedua identitas ini akan berinteraksi untuk membentuk perilaku sebuah negara. Bisa dianalogikan bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara, bisa dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang berkembang di tingkat domestik, sehingga nilai tersebut menjadi prinsip dalam pembentukan identitas korporasi negara. Oleh karenanya identitas tersebut akan menjadi konsepsi negara dalam memilih siapa yang akan dijadikan 'teman; dan 'musuh' negara tersebut. Dari perspektif konstruktivisme holistik, perlakuan kebijakan luar negeri dari suatu negara merupakan konsekuensi dari interaksi antar kedua identitas baik identitas korporasi (tingkat domestik) dan identitas sosial (tingkat internasional) (Reus-Smith, 2005, p. 201).

Perspektif holistik, melihat bahwa transformasi yang terjadi dalam identitas korporasi suatu negara tentu sebagai konsekuensi dari kondisi domestik, yang akhirnya akan mempengaruhi formasi di tingkat internasional dimana negara akan berusaha untuk mengatur ulang prioritas sesuai dengan identitas yang telah dibentuk.

Sehingga pendekatan ini menyoroti bagaimana pentingnya gagasan dan norma yang dianut baik domestik dan internasional dalam membentuk perilaku dalam membentuk sebuah kebijakan.

#### **4.2 Partai Front Nasional (FN) sebagai Identitas dalam membentuk Wacana Populisme Proposal “Marine Le Pen 2017”**

Konsep identitas di konseptualisasikan dan ditekankan dalam teori HI oleh para ilmuwan konstruktivis. Konstruktivisme telah bergerak dalam mengatasi masalah dengan membangun “cross-level models”, serta penekanan pada interaksi antar agen, perkembangan sosial dan struktur di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam menjelaskan hubungan antar negara menjadi penting dalam menganalisa bagaimana ide itu diciptakan dan berevolusi sehingga mempengaruhi persepsi negara dalam merespon situasi yang ada. Konstruktivisme juga menekankan pada kekuatan ide dan norma dalam menciptakan identitas serta dalam merumuskan kepentingan suatu negara sesuai dengan sosial masyarakat yang berkembang. Sehingga konstruktivis memegang kunci dengan prinsip bagaimana cara dunia material terbentuk dan dibentuk oleh aksi dan interaksi manusia tergantung pada interpretasi normative dalam berjalanya dunia material yang mengalami perubahan dinamis (Checkel, 2008, p. 78).

Setelah Marine Le Pen mengambil alih partai dari ayahnya dari 2011 lalu, dengan strategi ‘de-demonization’ telah membuat perkembangan secara signifikan. Marine Le Pen berhasil memperluas jaringan partai yang mampu merekrut lebih banyak anggota serta melipat gandakan suara elektoral partai. Menghilangkan label

ekstrem yang melekat selama ini, dengan lebih menggantikan retorika lebih dekat dengan rakyat Prancis. Marine Le Pen telah mengubah wajah FN dengan lebih populis, dengan menggunakan isu-isu dari kekhawatiran masyarakat Prancis secara aktif. Walaupun populis sendiri sudah melekat dari awal terbentuknya partai, namun tidak secara aktif diprioritaskan (KFCRIS, 2017, p. 11). Marine juga aktif dalam politik Eropa, bahkan dia menjadi salah satu sosok yang mendorong terbentuknya partai kelompok sayap kanan '*Europe of Nations and Freedom (ENF)*' di Parlemen Eropa bersama Geert Wilders. Pembentukan aliansi partai sayap kanan ini sebagai strategi untuk memberikan kehadiran yang lebih dalam tingkat Uni Eropa (Rettman, 2015).

Slogan yang menjadi dasar Marine Le Pen adalah "atas nama rakyat" sebagai pilar utama dalam pembuatan kebijakan (Sandford, 2017). Banyak para analisis melihat bahwa figur yang dilakukan oleh Marine Le Pen adalah untuk membangun kembali Perancis yang akan mengembalikan kehebatan Perancis, seperti halnya yang sering dikampanyekan oleh Presiden AS yaitu Trump yang telah berhasil menarik para pemilih (Vinocur, 2017). Kampanye yang dilakukan oleh Marine Le Pen sesuai dengan slogan "rakyat" yang artinya menjadi tujuan pertama dengan mengembalikan suara-suara kepada orang-orang (rakyat). Sebagai suatu strategi untuk menjamin langkah tersebut, Le Pen membuat kebijakan yang akan sering mengadakan referendum, diantaranya juga memungkinkan mengubahnya konstitusi Perancis juga terhadap referendum keanggotaan Perancis di UE. Hal tersebut direncanakan Le Pen untuk menarik rakyat dan memberikan penentuan arah yang harus ditempuh oleh

negara dengan keputusan yang diambil rakyat. Tentu setiap akan dilakukan referendum selalu akan mempengaruhi reputasi Presiden yang dipertahuhkan (Bénard, 2017).

Marine Le Pen menampilkan sebagai seorang pemimpin yang mewakili rakyat sebagai anti-elit, ia akan memperjuangkan pelayanan publik hanya untuk warga pribumi. Serta dirinya menampilkan gaya pemimpin yang melindungi kelas pekerja dan petani yang selama ini menjadi rakyat yang terpinggirkan dan tidak terwakili. Le Pen meyakinkan rakyat bahwa globalisasi saat ini sangatlah liar dan anarki sehingga perlu adanya penanganan secara menyeluruh untuk kembali keprioritas untuk warga asli Perancis (Nowak & Branford, 2017).

Dokumen proposal tersebut disampaikan pada konferensi besar di Lyon, dimana proyek tersebut berisikan 144 komitmen Le Pen terhadap janji jabatannya. Proposal yang dikeluarkan oleh Front National dalam ‘Marine 2017’ (Platiau, 2017).





**Gambar 1:** Front National (FN) “144 Engagements Presidentiels” (Pen, 2017)

Proposal kebijakan Marine Le Pen yang dipublikasikan, secara keseluruhan menekankan pada hak-hak populis yang artinya sebagian diprioritaskan untuk kepentingan warga Prancis dan kepentingan negara. Sesuai dengan apa yang dikampanyekan oleh Le Pen yang selama ini berada pada pinggiran politik untuk mewakili suara dari masyarakat yang merasa terancam akan keberadaan arus globalisasi. Dalam hal ini terdapat beberapa poin penting yang menjadi kebijakan Le Pen yang sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris di media milik Prancis, serta telah dirumuskan dalam beberapa sektor. Penulis akan menggunakan terjemahan ini untuk merepresentasikan dan menjabarkan poin-poin dalam artikel tersebut, yang dibuat dalam tabel-tebel (McNicoll & Davis, 2017).

#### 4.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Prinsip politik luar negeri yang digunakan oleh Front Nasional (FN), telah mempublikasi 144 manifesto program kampanye Marine Le Pen 2017. Program tersebut sebagai bentuk dari representasi dari nilai dan norma yang menjadi landasan utama dalam pembentukan identitas partai. Sehingga dalam konteks ini Marine Le Pen sebagai kandidat Presiden Prancis, telah merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan menjadi agenda program pemerintahannya jika berhasil memenangkan kursi Presiden (Melander, 2017).

Dari proposal yang dikeluarkan Marine Le Pen, yang sebagian besar lebih menekankan pada prioritas nasional. Penerapan hak-hak populis yang disajikan dalam program kampanyenya ternyata memberikan banyak dukungan dari masyarakat Prancis, terutama dalam mewakili suara para pekerja kelas menengah kebawah yang tidak mampu menghadapi tren globalisasi. Keberhasilan konstruk dari wacana partai, khususnya Marine Le Pen telah berhasil mempengaruhi dinamika politik masyarakat Prancis (KFCRIS, 2017, p. 12). Kebijakan Populisme pada faktanya telah berhasil meraup dukungan yang signifikan. Kebijakan populisme yang secara keseluruhan berada pada poin-poin penting kebijakan Marine Le Pen 2017, menjadikan negaranya lebih selektif dalam memilih keterlibatan Prancis dalam dunia internasional seperti halnya keterlibatan Prancis dalam Uni Eropa. Bahkan isu Frexit sempat membuat banyak perhatian media dan para akademisi, karena keputusan tersebut harus mendorong Prancis untuk mengubah konstitusi negara (McKirby, 2017).

Kandidat Presiden dari partai Front Nasional (FN), Marine Le Pen telah memberikan program-program mengenai kedaulatan nasional dan kebebasan Prancis.

Salah satu kebijakan yang cukup mendapat banyak perhatian adalah adanya kebijakan Le Pen untuk mengadakan referendum terhadap keanggotaan Prancis di Uni Eropa. Setelah adanya Brexit, kini isu Frexit telah menjadi isu utama dalam dinamika politik Uni Eropa (Evans-Pritchard, 2017). Manifesto terkait kebijakan Frexit terdapat dalam proposal asli yang dipublikasi langsung oleh partai Front Nasional (FN) dalam “*Engagements présidentiels Marine 2017*” yang menjadi poin utama dalam program Presiden.

*“1) To give France its national sovereignty back. Towards a Europe of independent nations at the service of its peoples. To regain our freedom and mastery of our destiny by restoring sovereignty to the French people (monetary, legislative, territorial and economic). For this, a negotiation will be initiated with our European partners followed by a referendum on our membership of the European Union. The objective is to achieve a European project respecting the independence of France and of national sovereignties and serving the interests of the peoples.”*

(European Movement International, 2017)

Pertama, Le Pen akan mengambil langkah untuk menegosiasikan reformasi dengan Uni Eropa selama 6 bulan. Hal tersebut bertujuan untuk mengubah aturan UE agar lebih memberikan kelonggaran bagi Prancis sebagai negara anggota dengan tidak ada lagi mata uang tunggal (euro), keluar dari wilayah bebas perbatasan (Schengen), aturan anggaran UE dan dalam keunggulan hukum UE. Jika perubahan tersebut tidak bisa didapatkan maka solusi yang diberikan oleh Le Pen adalah melaksanakan referendum keanggotaan Prancis “Frexit” dalam komunitas Uni Eropa (Melander, 2017). Walaupun banyak pengamat yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi dalam jangka pendek saat ini, dikarenakan Marine Le Pen harus mempunyai

koalisi mayoritas di Parlemen. Sedangkan dalam kampanyenya, Marine Le Pen berencana menggunakan pasal 11 konstitusi Prancis yang akan memberikan ruang yang lebih besar untuk mengajukan referendum tanpa melalui parlemen (Stothard, 2017).

Melalui ideologi Front Nasional (FN) sebagai partai sayap kanan, membentuk 3 pilar dalam menentukan kebijakan luar negeri Prancis yaitu kemerdekaan, identitas, dan ketertiban. Le Pen mengambil ide-ide Prancis tradisional terkait tempat dan peran negara di dunia dan mengembalikan ketundukan mereka terhadap Prancis. Pilar pertama “kemerdekaan” artinya bahwa walaupun Prancis berdiri diantara negara-negara besar di dunia, negara harus tetap mampu melindungi kepentingannya. Bukan hanya bergantung pada sejarah tetapi juga pada kekuatannya di panggung internasional. Sesuai dengan tujuan tersebut Le Pen akan menguatkan militer Prancis, ia ingin memberikan 3% dari produk domestik bruto (PDB), termasuk juga dengan dana untuk memodernisasi penangkalan nuklir Prancis (Lafont Rapnoil & Shapiro, 2017).

Selama ini Prancis telah terbuka dengan organisasi internasional besar seperti NATO, UE, dan juga PBB. Namun kebijakan Le Pen secara tegas menolak dua lembaga tersebut yaitu NATO dan UE, dimana organisasi tersebut dianggap menghambat Prancis untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Saat ini Le Pen akan menerima kerja sama internasional yang hanya atas dasar kesetaraan kedaulatan yang ketat dan secara langsung melayani kepentingan Prancis. Dengan demikian Prancis tidak perlu lagi menerima kewajiban hukum yang membatasi kemerdekaan

Prancis, sehingga tidak perlu berpartisipasi dalam perang di negara lain atau ikut serta dalam aliansi tersebut (Melander, 2017).

Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam Kebijakan Luar Negeri, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017 :

Table 1: Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam kebijakan luar negeri

“Command respect for France.”	
<p><b>Europe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renegotiate all European treaties within six months. After that period, it will be up to the French people to validate or reject the result of the negotiations by referendum</li> <li>• Withdraw from the euro and the Schengen Agreement</li> <li>• Denounce all free trade accords, such as CETA between the EU and Canada</li> <li>• Eliminate the European directive on workers from one country posted to jobs in another (280,000 of whom are posted in France, or the equivalent of 40,000 full-time positions, out of a total of 18 million employees)</li> </ul>	<p><b>World</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In favour of a rapprochement with Moscow</li> <li>• Increase French aid to Africa to 0.7 percent of GNP. Prioritise countries in the Sahel region</li> <li>• Withdraw from NATO’s integrated command</li> <li>• Oppose intervention in Syria<sup>1</sup></li> </ul>

Sumber : Berita Media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

#### 4.2.2 Reformasi Lembaga

##### A. Prioritas Nasional

Dalam lembar halaman program Marine Le Pen, terdapat kebijakan reformasi konstitusional yang akan diusulkan kepada rakyat Perancis. Setelah dirinya berhasil

<sup>1</sup> Beberapa poin-poin yang terdapat pada proposal ‘144 komitmen Marine Le Pen’ yang dipublikasi langsung oleh partai Front Nasional (FN). Artikel proposal tersebut di terjemahkan dari bahasa Prancis-Inggris melalui ‘France 24’ yang merupakan website media Prancis. Bagian poin-poin dalam sektor kebijakan luar negeri

memenangkan kursi Presiden, Le Pen akan menyerukan referendum untuk mengadopsi serangkaian amandemen konstitusi yang dianggap akan mengembalikan kebesaran konstitusi 1958. Dengan program konstitusi ini bertujuan untuk secara mendalam mereformasi organisasi negara Perancis dan lembaga-lembaganya.

Salah satunya juga untuk memasukan konsep “prioritas nasional” yang akan memberikan prioritas terhadap warga Perancis dalam beberapa sector seperti dalam pekerjaan, perumahan, dan kesejahteraan sosial. Walaupun reformasi semacam itu tentu akan bertentangan dengan identitas konstitusional Perancis yang sebagaimana dalam pasal 1 dari konstitusi yang menyatakan bahwa “persamaan semua warga negara dihadapan hukum tanpa membedakan asal, ras dan agama dan penghormatan semua keyakinan” (Fournier, 2018, p. 6).

## B. Referendum Amandemen Konstitusi

Marine Le Pen bersumpah untuk mengadakan referendum tentang amandemen konstitusi, dengan memasukan ketentuan bahwa semua perubahan konstitusi di masa depan hanya dilakukan melalui referendum. Referendum tersebut dapat diatur dan dilakukan jika mendapat dukungan setidaknya 500.000 warga (Klimenty, 2017). Dimana juga sesuai dengan janji utama, Marine Le Pen akan melakukan referendum terhadap keanggotaan Perancis di UE, artinya juga akan meninggalkan Pengadilan Hak Asasi manusia Eropa dan lembaga serupa lainnya yang bertentangan dengan konstitusi tersebut (Hakimi, 2018). Marine Le Pen juga akan menggunakan referendum untuk "mengembalikan keunggulan hukum nasional" dengan penghapusan Judul Bab 15 Konstitusi, yang menyelenggarakan hubungan

antar Negara Perancis dan lembaga-lembaga Uni Eropa. Pasal 55 juga akan dihapuskan dalam rangka membangun kembali otoritas hukum nasional pada perjanjian internasional serta keunggulan lembaga peradilan nasional selama pengadilan supra-negara (Fournier, 2018, p. 7).

### C. Perpanjang masa jabatan dan pemotongan anggota parlemen

Marine Le Pen juga akan mengunsulkan konstitusi mengenai masa jabatan kepresidenan, yang mana ia menginginkan perpanjangan masa jabatan untuk Presiden yang semula 5 tahun menjadi 7 tahun. Poin selanjutnya dia akan mengusulkan konstitusi untuk pengurangan setengah dari jumlah total anggota parlemen (dari 500 menjadi 300 untuk *National Assembly*, dan untuk *senat* dari 348 menjadi 200 orang) (Fournier, 2018, p. 8). Marine Le Pen juga akan mengurangi tingkat administrasi dari 6 menjadi 3, yaitu tingkat komune, departemen dan negara (Klimentyl, 2017).

Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam bidang reformasi institusional, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017:

**Table 2 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam sektor reformasi konstitusi**

<p>“Let the people speak and establish a democracy that is close to the people.”</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hold a referendum on widespread institutional reform that introduces proportional representation</li><li>• Allow referenda based on public initiative once at least 500,000 voters have signed on to a request</li><li>• Inscribe “the defence of our people’s identity and our cultural and historical heritage” as national priorities in the constitution</li><li>• Reduce the number of parliamentarians</li><li>• Increase the length of a presidential term from five to seven years and make it non-renewable</li><li>• Limit elected officials’ ability to hold multiple offices at the same time<sup>2</sup></li></ul>
--

Sumber : Berita media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

#### 4.2.3 Kebijakan Ekonomi

##### A. Proteksi Ekonomi

Dalam kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam manifesto Le Pen, dia akan menerapkan kebijakan proteksionisme ekonomi. Dimana Marine Le Pen akan lebih menekankan pada keuntungan dan kepentingan negara Perancis. Proteksi tersebut akan ada tarif baru, pemberian pajak pada pekerja asing, adanya tawaran untuk meninggalkan mata uang tunggal (euro) dan mengembalikan mata uang nasional (franc). Dia akan mendukung para pengusaha kecil dari pada perusahaan global, bahkan ia akan mendiskusikan terkait nasionalisasi bank-bank Perancis serta memastikan tidak akan adanya kendala dari negara lain maupun Uni Eropa (UE). (Llorente, 2017).

---

<sup>2</sup> Beberapa poin-poin yang terdapat pada proposal ‘144 komitmen Marine Le Pen’ yang dipublikasi langsung oleh partai Front Nasional (FN). Artikel proposal tersebut di terjemahkan dari bahasa Prancis-Inggris melalui ‘france 24’ yang merupakan website Prancis. Bagian poin-poin dalam sektor Kelembagaan



Marine Le Pen dalam kampanyenya selalu menyalahkan kebijakan ekonomi oleh pemerintah selama ini yang jauh dari kepentingan warga negara Perancis. Dimana hal tersebut dikarenakan arus globalisasi, organisasi internasional seperti Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia yang membuat krisis saat ini. Sehingga solusi yang diberikan oleh Le Pen adalah menutup pasar Perancis dari persaingan global dan mengembalikan mata uang nasional. Dimana dibawah kepemimpinannya, ia ingin menekankan statisme tradisional Perancis yang akan memperkuat peran pemerintah untuk mengintervensi dalam aspek-aspek tertentu dalam perekonomian (Stockemer & Barisione, 2016, p. 6). Marine Le Pen menginginkan sebuah negara yang melindungi pasar internal Prancis dari kompetisi asing. Le Pen juga ingin mengatur industri keuangan dan menanamkan itu dengan nilai moral. Bahkan Le Pen tidak akan memiliki keraguan tentang nasionalisasi lembaga keuangan yang bermasalah, mengembalikan mereka ke pasar nanti (Clercq, 2011, p. 4).

#### B. Kembali ke Mata Uang Nasional “Franc”

Arus globalisasi yang tidak terbendung, membuat sebagian masyarakat Perancis merasa kesulitan dengan adanya mobilisasi manusia yang semakin bebas. Adanya aturan yang melekat pada Integrasi Uni Eropa dianggap telah menjadi kendala sebagian orang dengan penghasilan rendah yang tidak terwakilkan suaranya. Front Nasional (FN) merupakan salah satu partai yang menjadi pelindung bagi orang-orang kecil, bahkan mempunyai program kebijakan bagi para pekerja kelas menengah kebawah. Mereka sudah tidak lagi percaya terhadap program pemerintah dengan

ekonomi terbuka yang lebih berpihak pada Uni Eropa (Clercq, 2011). Mereka tidak lagi bisa menopang mata uang tunggal, serta harus bekerja melalui persaingan global yang hanya menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Sedangkan Marine Le Pen telah menawarkan solusi, yang berjanji untuk membawa Prancis keluar dari euro, menerapkan proteksionis dan mengaskan kembali negara supremasi atas kekuatan pasar. Front Nasional menolak semua ide yang menjadi aturan dalam Uni Eropa, globalisasi, perdagangan bebas dan dominasi pelayanan dan industri keuangan (McAuley, 2017).

Sesuai dengan yang dikampanyekan, Marine Le Pen melihat euro yang hampir pecah selama krisis utang pada 2010-2012. Marine Le Pen mengatakan bahwa saat ini euro yang selama ini menjadi mata uang tunggal Eropa telah gagal total. Mata uang yang mulai diperkenalkan pada 2002 silam, telah memicu kenaikan harga secara umum dan secara substansial mengikis daya beli rumah tangga. Marine Le Pen menginginkan Prancis kembali menggunakan mata uang nasional yaitu 'franc' tanpa lagi menggunakan euro. Le Pen mengatakan bahwa sesuai dengan data IMF, euro Prancis mengalami "overvalued" berada pada sekitar 15% artinya mata uang tunggal dianggap telah membunuh Prancis. Le Pen juga menambahkan bahwa Prancis akan terbuka dengan negosiasi untuk memulai kerjasama ekonomi yang baru dengan negara Eropa lainnya hanya dalam fokus untuk perusahaan dan pemerintah. Kemudian Marine Le Pen menyarankan Eropa untuk kembali ke mata uang nasional yang diakui, yang akan dihubungkan melalui sistem mata uang umum seperti

*European Currency Unit* (ECU) dalam upaya melunakan dampak ekonomi (McGuinness, 2017).

Kebijakan Janji untuk mengenalkan kembali mata uang Prancis yaitu Franc cukup menjadi perhatian kalangan politisi, mengingat bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan mata uang bersama euro pada tahun 2002. Keputusan keluarnya Prancis di Uni Eropa, tentu akan berdampak bagi negara Prancis serta masa depan UE. Banyak pengamat yang meramalkan kondisi Prancis jika keluar dari UE dan meninggalkan euro akan berdampak buruk bagi ekonomi Prancis yang juga akan memicu jatuhnya Uni Eropa. mengingat bahwa Prancis merupakan negara yang menyimpan bank terbesar kedua di Eropa, serta perusahaan besar lainnya yang tentu hal tersebut akan memicu krisis ekonomi global. Namun Marine Le Pen mengatakan bahwa meninggalkan Uni Eropa adalah keputusan yang terbaik, yang akan membantu negara menjadi 'grande nation' atau negara besar. Baginya kerjasama bilateralisme adalah keputusan di masa depan, dan multilateralisme adalah kebijakan di masa lalu. Dia mengingatkan akan bahaya yang ditimbulkan adanya globalisasi saat ini yang telah membuat jalan bagi imigran yang mencuri hak-hak warga pribumi, serta adanya teror Islam radikal yang mengancam. Sehingga solusi yang terbaik adalah mendapatkan kembali kedaulatan, serta mengakhiri perjanjian perdagangan bebas dan kembali ke sistem proteksionis (Louis L. , 2017).

Proposal Marine Le Pen tahun 2017, memberikan kontribusi di sektor ekonomi dengan 'prioritas nasional' serta menerapkan proteksi cerdas untuk

mendukung para pekerja dan ekonomi nasional. Berikut poin-poin dalam artikel sesuai dengan proposal Marine Le Pen :

**Table 3 :** Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Ekonomi

<p><b>Employment</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeal the Labour Law known as the El Khomri Law</li> <li>• Maintain the 35-hour workweek</li> <li>• Tax the hiring of foreign employees in order to favour French nationals</li> <li>• Hire 21,000 public servants for the police, customs service and in hospitals</li> <li>• Preserve the status of public servants and increase their salaries</li> <li>• Introduce a “First job” plan that would completely exempt a first job for a young person under 21 from social contributions</li> </ul> <p><b>Businesses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transform the Tax Credit for Competitiveness and Employment (CICE) into a reduction of social and employer contributions</li> <li>• Reduce corporate taxes</li> <li>• Introduce a 35 percent tax on products manufactured by companies that have outsourced their production</li> <li>• Return to a national (not EU) agricultural policy</li> <li>• Exempt overtime hours from taxation</li> </ul>	<p><b>Purchasing power</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establish a purchasing-power bonus for people earning less than €1,500 per month</li> <li>• Nationalise highways</li> <li>• Reduce the price of gas, electricity and train journeys by 5 percent</li> <li>• Reduce taxes on oil in order to push down the price of gas at the pumps</li> </ul> <p><b>Taxation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduce a 10 percent reduction on the three first income-tax tranches</li> <li>• Freeze residency tax</li> <li>• Exempt family gifts from taxes: Donations from parents to their children under €100,000 euros per child every five years and €50,000 euros for grandchildren would not be taxed <sup>3</sup></li> </ul>
--	---

Sumber : Berita Media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

<sup>3</sup> France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor Ekonomi”

#### 4.2.4 Kebijakan Keamanan

##### A. Imigrasi

Setelah berjanji untuk keluar dari zona euro, Le Pen juga berjanji untuk mengambil kembali perbatasan Prancis untuk keluar dari zona Schengen. Hal tersebut sebagai langkah awal dalam kebijakan keamanan yang diagendakan Marine Le Pen setelah memerintah. Bagi Le Pen Islam dan imigrasi adalah ketakutan yang menjadi inti dari platform nativisme Le Pen. Baik keduanya sangat bertentangan dengan budaya dan identitas Prancis yang sekuler. Platform Marine Le Pen menyalurkan kegelisahan yang meluas di Prancis yang dipicu atas serangan yang terjadi di Prancis selama ini. Serangan teroris yang menyerang Paris pada November 2015, ditambah dalam kasus Nice pada Juli 2016. Krisis pengungsi yang berkelanjutan membuat gelombang imigran tidak berdokumen telah menjadi ancaman di seluruh Eropa (Wildman, 2017). Zona Schengen sendiri merupakan salah satu kerjasama Uni Eropa yang menerapkan UU terkait perjalanan bebas paspor di 27 negara Eropa. Sehingga perjanjian tersebut telah tumbuh menjadi kebijakan yang mengancam keamanan negara-negara Eropa, terkhusus bagi Prancis yang telah mengalami serentetan serangan teror (Bayliss, 2017).

Le Pen mencantumkan 3 alasan utama mengapa imigrasi harus dihentikan. Pertama, imigrasi digunakan sebagai bisnis besar untuk memberi tekanan pada upah dan hak sosial pekerja Prancis. Imigrasi dirasakan bukan program humanis yang selalu diklaim oleh MEDEF, Komisi Eropa, dan perusahaan CAC tetapi sebagai proyek senjata pelayanan modal besar. Kedua, imigrasi merupakan biaya yang

signifikan bagi masyarakat nasional yang diperkirakan mencapai 70 miliar euro per tahun oleh ekonom Yves-Maarie Lalan (Waters, 2016). Ketiga, imigrasi yang tidak terkendali merupakan sumber ketegangan bagi masyarakat karena sudah tidak mampu mengasimilasi pendatang baru di Prancis. Marine Le Pen berpendapat bahwa banyak imigran yang telah merusak identitas Prancis, seperti adanya imigran muslim yang semakin banyak yang datang.

Dalam program kampanye 2017, Marine Le Pen telah mengusulkan serangkaian tindakan anti-imigrasi, yang di kampanyekan berbulan-bulan dalam program khususnya dalam memulihkan perbatasan Prancis. Le Pen menjanjikan dalam sebuah proposal programnya, menjanjikan untuk “moratorium” imigrasi, pengusiran imigran ilegal serta memotong bantuan medis untuk imigran ilegal. Setidaknya banyak masyarakat Prancis yang resah terhadap keberadaan imigran yang dianggap telah mencuri hak mereka. Terutama terhadap imigran muslim yang jelas sangat berbeda dengan budaya mereka, bahkan tidak mampu menyesuaikan dengan cara hidup orang Prancis. Prancis memiliki catatan jumlah pencari suaka tahun lalu sekitar 85.700 dan sekitar 227.500 orang asing diberi izin tinggal yang mana meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Program yang ditawarkan Marine Le Pen adalah untuk membatasi secara drastis imigran legal menjadi 10.000 orang per tahun (Nositter, 2017).

Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam bidang Imigrasi, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017:

**Table 4 :** Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Imigrasi

<p>Imigran</p> <p>“Get back to borders that protect us and end out-of-control immigration.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-establish border inspections and withdraw from the Schengen Agreement</li> <li>• Limit the number of legal admissions onto French territory to 10,000 per year. The average number of legal admissions per year between 2004 and 2012 is estimated at 200,000</li> <li>• Limit conditions for asylum: instead of requiring that an asylum-seeker be present on French soil in order to apply, applications should be filed at French embassies and consulates in an asylum-seeker’s country of origin or its neighbouring countries</li> <li>• Toughen family reunification rules</li> <li>• Limit the arrival of foreign workers to sectors where finding new hires has proven difficult</li> </ul>	<p>Nationality</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminate the principle of jus soli ( the right of the soil): French nationality will be obtained through ancestry or by naturalisation at the age of majority</li> <li>• Ban French dual nationality for non-Europeans</li> <li>• Ban the naturalisation of undocumented foreigners</li> <li>• Establish a national preference: eliminate State Medical Aid (AME), which benefits numerous foreigners; make French citizens a priority for social housing; minimum welfare payments should go solely to French nationals<sup>4</sup></li> </ul>
--	--

Sumber : Website pemerintah Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

## B. Terorisme dan Pertahanan

Kebijakan Marine Le Pen yang akan mengikis imigrasi hingga 10.000 pertahun, bukan hanya berkaitan dengan melindungi para pekerja asli Prancis tetapi juga untuk menjaga keamanan Prancis dari orang asing. Sejak tahun 2015, Prancis telah mengalami serangkaian terorisme secara beruntun. Dua tahun terakhir setidaknya

<sup>4</sup> France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor imigrasi”

Prancis telah menyaksikan hampir 240 orang tewas akibat serangan tersebut. Serangan terror islam jihadis terutama berkaitan dengan ISIS telah menambah islamophobia yang berkembang di Prancis. Sehingga dalam agenda utama masa kepemimpinannya, Marine Le Pen akan membawa Prancis keluar dari perbatasan Schengen dan juga mengembalikan prosedur untuk pengecekan paspor untuk negara Eropa lainnya (Dearden, 2017).

Kebijakan keamanan Le Pen juga memperkuat kontrol internal dan eksternal. Kebijakan Marine Le Pen dalam membuat agenda program untuk memproteksi keamanan Prancis, Le Pen akan menambah 50.000 pos militer dan akan merekrut 15.000 petugas polisi. Serta akan ada hukuman yang lebih keras dan membuat tambahan 40.000 tempat penjara, menghilangkan hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup. Tentu hal tersebut perlu adanya dukungan untuk Prancis agar dapat mengendalikan secara penuh perbatasannya, dengan keluar dari perjanjian Schengen. Le Pen juga bertujuan untuk merekrut tambahan 6.000 polisi perbatasan. kebijakan dengan melawan para terorisme juga di mulai dengan adanya pembentukan badan anti-terorisme baru (Liz Alderman, 2017). Dalam kebijakan pertahanannya, kandidat Presiden sayap kanan Marine Le Pen berjanji untuk meningkatkan anggaran pembelanjaan pertahanan Prancis. Marine Le Pen berjanji di tahun 2018, anggaran pertahanan di Prancis akan berjumlah 2 persen dari PDB. Setelahnya Le Pen akan meningkatkan pembelanjaan pertahanan Prancis menjadi 3% dari PDB pada tahun 2022 (Saget, 2017) .



Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam bidang terorisme dan pertahanan, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017 :

**Table 5** : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Terorisme dan Pertahanan

<b>Domestic</b>	<b>Defence</b>
<p>“Eradicating terrorism and breaking the Islamic fundamentalist network.”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinforce spending on domestic and foreign intelligence</li> <li>• Ban and dissolve all Islamist fundamentalist organisations</li> <li>• Reinstate WWII-era penal codes to strip convicted terrorists of their civic rights</li> <li>• Create an anti-terrorism agency that would report directly to the prime minister</li> <li>• Deport all non-citizens on the official Fiche S terror watch list; strip nationality from dual citizens convicted of terrorism offences</li> <li>• Repeal the “Dati” and “Taubira” prison reform laws which reduce some sentences, in order to end “judicial laxity”</li> <li>• Build an additional 40,000 places in prison</li> <li>• “Disarm” France’s poor suburbs by targeting 5,000 gang leaders identified by the Interior Ministry</li> <li>• Establish mandatory life imprisonment for the most serious cases</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fix the defence budget at 2 percent of GDP immediately, and increase it to 3 percent (or €60 billion) by 2022 (compared to €40 billion in 2017)</li> <li>• Re-establish a compulsory military service of at least three months</li> <li>• Build a second aircraft carrier at a cost of €4.5 billion</li> <li>• Increase the number of police and gendarmes by 15,000</li> <li>• Consolidate the army and add 24,000 new recruits<sup>5</sup></li> </ul>

Sumber : Berita media Prancis ‘France 2’ (McNicol & Davis, 2017)

<sup>5</sup> France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor Keamanan”

#### 4.2.5 Kebijakan Sosial

##### A. Ketenagakerjaan

Program Marine Le Pen memiliki karakter anti-elitis yang cukup kuat. Marine Le Pen membuat dirinya menjadi perwakilan dari orang-orang jujur dan bekerja keras yang tidak hanya menghadapi persaingan asing yang tidak adil, tetapi juga diatur oleh elit politik dan sosial yang korup. Le Pen juga tidak hanya berjanji untuk menghentikan pengeluaran mewah atas penggantian biaya yang berlebihan dari para elit partai, tapi dia juga mengidentifikasi gaya hidup mewah elit politik Perancis sebagai penyebab utama krisis utang Perancis. Dia ingin menyingkirkan korupsi, dominasi elit dan ketergantungan Perancis di organisasi internasional (Chrisafis, 2017).

Peningkatan angka pengangguran menjadi salah satu isu utama bagi para pemilih partai Front Nasional (FN). Tingkat pengangguran Prancis berjalan sekitar 10%, yang mana angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari Jerman dan Inggris bahkan lebih tinggi dari rata-rata zona euro. Angka tersebut juga belum turun dibawah 9% sejak krisis ekonomi global tahun 2008. Marine Le Pen memberikan solusi untuk industrialisasi yang di pimpin negara dan memberikan pajak yang lebih besar terhadap pekerja asing hal tersebut dimaksudkan bisa memberikan lapangan kerja bagi para warga Perancis yang belum mendapat pekerjaan. Bisa dilihat bahwa isu pengangguran menjadi dasar ketakutan masyarakat. Faktor tersebut juga menjadi dorongan dari Partai Kebebasan Inggris (UKIP) yang meyakinkan solusi untuk perbatasan yang lebih kuat, mencegah imigran ekonomi yang mencuri peluang warga

asli Inggris sehingga dapat mengurangi angka pengangguran (Safdar & El Amraoui, 2017).

Dalam hal pasar ketenagakerjaan Prancis, Le Pen telah mengkampanyekan secara efektif untuk melestarikan perlindungan yang ada bagi para pekerja dengan preferensi untuk alokasi pekerjaan kepada warga negara Prancis. Adanya akses layanan di berbagai sector dengan memprioritaskan kepada warga Perancis seperti sector kesehatan, pendidikan, perumahan dan sector lainnya. Le Pen akan menjamin perlindungan sosial pada pekerja seperti adanya perbaikan usia pensiun pada usia 60 tahun yang semula 62 tahun (Bowden, 2017).

**Table 6 :** Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Sosial

<b>Secularism</b>	<b>Family</b>	<b>Retirement</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toughen the 2004 law against wearing religious symbols in public places</li> <li>• Impose “secularity, but also neutrality and security” by re-introducing school uniforms, and by banning the Muslim headscarf at university</li> <li>• Expand secularism to cover all public spaces, making it part of the Labour Law</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Re-establish universal social welfare for all French families</li> <li>• Ban in vitro fertilisation for single women and lesbian couples</li> <li>• Increase benefits for disabled people</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lower the retirement age to 60</li> <li>• Increase the minimum pension and limit it to those with French nationality or a minimum of 20 years residency in France<sup>6</sup></li> </ul>

Sumber : Berita Media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

<sup>6</sup> France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor Sosial”

### **4.3 Analisis Holistik Dalam Pembentukan Wacana Kebijakan Proposal Marine Le Pen 2017**

Front Nasional (FN) sejak didirikan telah menjadi politik identitas utama sayap kanan ekstrem di Eropa. Sejarah pendiriannya sebagai partai yang mewakili suara semua gerakan yang menentang pemerintah, hingga menyatukan identitas bersama dalam satu payung yaitu partai FN. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana perkembangan partai FN dalam pencapaian dukungan masyarakat Prancis. Sejak awal FN telah mengadopsi nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip liberalisme dan demokrasi seperti fasis, xenophobia, rasisme dan antisemitisme. Sehingga FN sudah berada dipinggiran politik Prancis bersamaan dengan semangat penyatuan identitas Uni Eropa pasca perang. Bahkan latar belakang penyatuan gerakan dalam partai FN juga didasari atas penggalangan dukungan untuk menyambut pemilihan legislatif di Prancis pada saat itu (Anttila, 2017, pp. 11-12). Front Nasional (FN) telah mengalami dinamika politik yang sangat panjang, sebagai politik sayap kanan tertua di Eropa. Sejak berdirinya FN menekankan pada nilai-nilai nasionalisme Prancis, sehingga FN menolak atas keberadaan kelembagaan Uni Eropa yang membuat FN selalu mengkampanyekan wacana ekstrem (Willsher, 2018).

Latar belakang sejarah pembentukan FN, dari penyatuan *collective identity* yang dibangun menjadi landasan utama gerakan partai tersebut dalam menentukan wacana-wacana strategi. Walaupun secara perkembangannya terdapat transformasi partai dengan kepemimpinan baru, dimana pengalihan partai yang dipegang oleh Marine Le Pen dimulai sejak 2011. Marine Le Pen mengubah nilai dan norma

‘ekstrem’ yang selama ini melekat dalam partai dengan wacana yang lebih lunak. Strategi yang dibuat Le Pen dengan strategi ‘de-demonization’ yang artinya mengubah FN menjadi partai yang menggunakan retorika wacana lebih dekat dengan orang-orang (populis). Walaupun transformasi tersebut dikatakan mengubah wajah partai dengan menghilangkan nilai ekstrem, namun secara tidak langsung partai tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai yang menjadi dasar utama partai seperti nasionalisme dan anti-imigrasi yang tetap menimbulkan penentangan terhadap nilai kelembagaan yang ada (Nielsen, 2017, pp. 31-32).

Gagasan politik identitas yang dibangun oleh FN, sebagai prinsip menjadikan sumber utama atau dasar pembentukan wacana dalam mendefinisikan kepentingan dan identitas negara. FN yang merupakan salah satu partai yang mewakili partai sayap kanan jauh Prancis, membentuk program dan wacana sesuai dengan identitas korporasi. Sehingga identitas korporasi yang dibangun akan mempengaruhi perilaku negara dalam menentukan kebijakan atau keputusan negara dalam arah politiknya baik dibangun dalam ranah domestik ataupun internasional.

Pada tahun 2017, Marine Le Pen maju dalam pemilihan Presiden yang mana berhasil lolos dalam putaran kedua dan menjadi oposisi utama. Keberhasilan tersebut menjadi momentum kedua, setelah ayahnya Jean Marie Le Pen sukses maju ke putaran kedua yaitu pada tahun 2002. Hingga kepemimpinan Marine Le Pen, dimulai tahun 2011 yang secara signifikan terus mengalami peningkatan baik dalam anggotaan partai, basis dukungan hingga peningkatan jumlah perwakilan yang berhasil menjabat. Hingga pada pemilihan terakhir 2017, FN berhasil meraup

dukungan masyarakat 33% atau hampir 11 juta suara yang menjadi suara terbanyak sepanjang sejarah elektoral FN (Adu, 2017).

Pada pemilihan Presiden putaran pertama, Le Pen berhasil menyingkirkan dua partai *mainstream* yang selama ini mendominasi parlemen dengan meraup basis dukungan masyarakat. Kemenangan suara babak pertama partai Emmanuel Macron dan Marine Le pen menjadi sejarah dinamika pemilihan Presiden Prancis, mengingat kedua partai tersebut notabene bukan partai besar (Mcintosh, 2017). Walaupun dalam hasil putaran terakhir Le Pen tidak bisa memenangkan kursi Presiden, namun hasil dukungan terakhir menjadi kemenangan bagi dinamika politik partai sayap kanan Prancis. Hasil dari peningkatan suara tersebut menjadikan fakta bahwa FN telah berhasil mempengaruhi politik masyarakat Prancis. Wacana yang dibangun oleh FN yang berasal dari kekhawatiran dari masyarakat Prancis pada nyatanya berhasil meningkatkan pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Front Nasional (FN) sebagai aktor dari domestik yang membentuk identitas korporasi dengan membawa ideologi partai dalam bentuk wacana yang ada. Sehingga wacana tersebut menginterpretasikan identitas dan kepentingan yang dibangun untuk membentuk perilaku negara. Sedangkan dalam wacana tersebut juga didukung melalui interaksi sistemik, artinya bahwa terdapat faktor struktur dari sistem internasional yang mempengaruhi pembentukan perilaku negara. Sesuai dengan pandangan holistik, baik faktor domestik dan internasional keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk sebuah kebijakan negara (Reus-Smith, 1999, p. 167). Pembentukan lembaga Uni Eropa ternyata telah memberikan

banyak batasan terhadap negara untuk mengatur tindakanya sendiri, UE dianggap telah memberikan banyak ancaman-ancaman bagi masyarakat Prancis. Adanya krisis yang disebabkan struktur tersebut telah membuat peningkatan dukungan FN di Prancis, lambatnnya pemerintah yang selama ini berkuasa membuat masyarakat kian skeptis dengan lembaga tersebut (Wisniewska & Ehrenberg-Shannon, 2017). Sehingga wacana yang dibentuk oleh FN melalui proposal ‘144 engagement Marine Le Pen 2017’ dibentuk karena ada pengaruh dari interaksi level unit dan level internasional.

**gambar 2** : Penerapan Logika Konstruktivisme Holistic



Dari prespektif Holistik, bisa dipahami bahwa baik faktor domestik dan faktor internasional akan membentuk identitas korporasi dan identitas sosial negara yang saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga interaksi tersebut akan membentuk sebuah definisi baru bagaimana negara memandang dirinya dan memandang orang lain. Dapat dianalogikan jika Marine Le Pen berhasil menang dan menjadikan FN partai yang berkuasa, maka FN sebagai aktor domestik dengan membawa nilai-nilai yang membentuk identitas korporasi. Serta identitas FN membentuk identitas sosial yang mana sebagai penentu dalam membentuk suatu kebijakan negara. Wacana yang

dibentuk FN sebagai suatu identitas akan menentukan prioritas kepentingan dari Prancis. Sehingga pembentukan kebijakan proposal Marine Le Pen yang dipublikasi oleh FN, menjadi konsekuensi terhadap interaksi domestic dan interaksi internasional (Auth, 2005, pp. 50-51).

**Faktor ranah domestik**, juga didasari pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang selama ini berkuasa. Selama 50 tahun, Partai Sosialis dan partai Les republican selalu menjadi partai dominan di Parlemen Prancis. Keduanya selalu menjadi partai dengan perolehan dukungan yang besar dari masyarakat. Pada pemilihan Presiden 2017 yang lalu, kedua partai tersebut secara mengejutkan tersingkir pada hasil pemilihan pada putaran pertama. Kedua partai tersebut dikalahkan oleh partai Enn Marche dan FN, yang berhasil mendapat dukungan terbesar dari kalangan masyarakat. Partai arus utama yang selama ini berkuasa dianggap tidak memberikan perubahan apapun terhadap masalah yang terjadi pada masyarakat kelas menengah kebawah atau kalangan para pekerja. Sehingga para akademisi melihat bahwa masyarakat Prancis kecewa dengan kedua partai mainstream tersebut, sehingga masyarakat Prancis menginginkan wajah baru untuk memberikan perubahan terhadap masyarakat yang lebih nyata (Alessandri, Auers, & Balcere, 2017, pp. 127-128). Baik partai sosialis ataupun partai UMP, keduanya tidak bisa secara tegas menentukan kepentingan nasional yang selalu bergantung pada aturan dan hukum Uni Eropa tanpa melihat masyarakat asli Prancis. Sehingga krisis internal yang terjadi seperti efek jatuhnya euro, krisis pengungsi dan imigrasi, terorisme, dan pengangguran menjadi pengaruh dalam pembentukan wacana FN



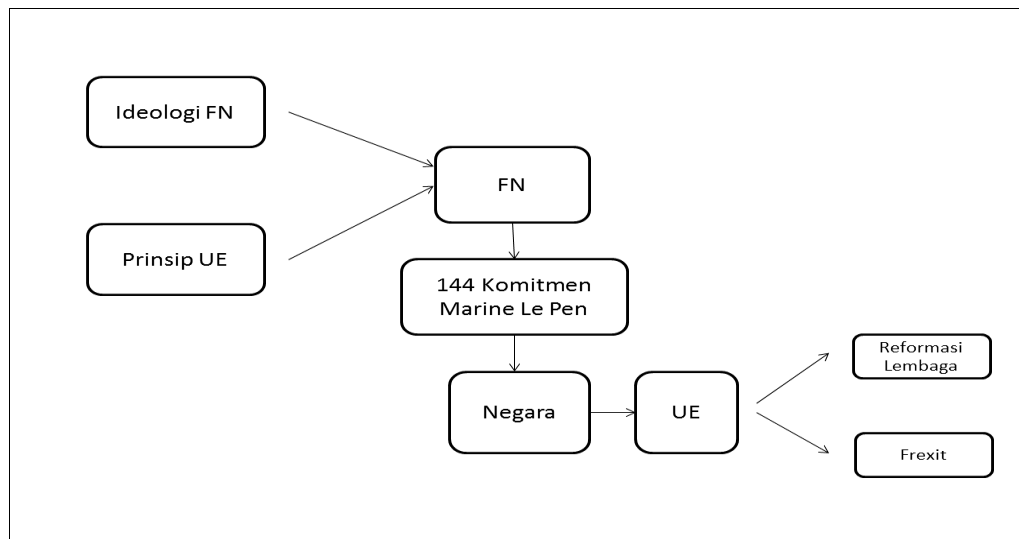
dalam menentukan kebijakan kampanye pemilihan Presiden Marine Le Pen. Akibat dampak dari banyaknya konflik internal tersebut juga mendorong peningkatan dukungan FN (Perrineau, 2017) .

**Dalam interaksi sistemik**, Idealitas yang dibangun dalam lembaga Uni Eropa (UE), faktanya dianggap tidak lagi sesuai dengan realitasnya. Banyaknya masalah yang terjadi di Prancis yang disebabkan lembaga tersebut mendorong skeptisme, sehingga proposal kebijakan FN tersebut dapat menjelaskan perilaku FN yang akan menentukan negara dalam membentuk kebijakan domestik dan internasional. Struktur Uni Eropa yang menerapkan nilai dan norma yang berlaku secara dominan, terkadang memaksakan negara untuk terlibat langsung dalam aturan tersebut. Prinsip UE dengan penerapan ekonomi pasar tunggal harus membuka modal, barang, jasa dan mobilisasi orang-orang untuk dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Sedangkan dalam prinsip HAM, membuat anggota Uni Eropa harus membuka negara dalam menerima pengungsi dan pencari suaka dari negara lain seperti dari Timur Tengah. Bahkan banyaknya imigran muslim di Eropa terus dihantui dengan ancaman islam fundamental dan terorisme. Akses persaingan ketenagakerjaan di negara harus disandingkan dengan masalah pengangguran di ranah domestik. Banyaknya keputusan yang diambil sering mengesampingkan kepentingan nasional, UE dianggap lebih pada posisi yang memberikan solusi untuk menimbulkan masalah yang baru (Proud, 2017, pp. 16-18).

Pengaruh dari hasil sistemik dapat dicontohkan kebijakan luar negeri yang dibuatkan oleh FN melalui Marine Le Pen dengan adanya kampanye Frexit.

Kebijakan tersebut tentu menjadi kebijakan yang mencuri banyak perhatian kalangan akademisi dan media, melihat bahwa Prancis adalah negara yang menginisiasi pembentukan UE dan juga sebagai negara besar yang sangat berpengaruh terhadap UE. FN menjadi partai yang mewakili masyarakat dengan hak-hak populis, artinya disini populisme dapat dipahami adanya antagonistik orang-orang dengan elit politik yang selama ini tidak memihak kepada mereka. Wacana populis yang diimplementasikan program Le Pen diantaranya akan mengembalikan hak suara rakyat umum secara lebih luas, dengan mengadakan hak referendum baik dalam perubahan konstitusi Prancis maupun dalam institusi kelembagaan internasional diantaranya juga referendum terkait keanggotaan UE (Cincu, 2017).

**Gambar 3 :** Siklus Perilaku Negara Berbasis Norma



Dalam analogi basis norma sesuai dengan gambar diatas, interaksi level unit dan sistemik dapat bersama-sama membentuk siklus pembentukan perilaku negara dalam membentuk kebijakan. Adapun dalam kasus ini, aktor negara diwakili oleh FN (level unit) sebagai partai politik yang berkembang di Prancis. Sedangkan dinamika

perkembangan FN didasari atas norma yang berlaku dari latar belakang FN, serta norma sistemik lembaga struktur UE menambah radikalitas FN dalam menentukan wacana. Identitas politik FN yang akan membentuk (identitas korporasi) wacana domestik, kemudian adanya interaksi hubungan Prancis dengan komunitas internasional (UE) yang membentuk (identitas sosial) di ranah sistemik.

#### 4.3.1 Pengaruh Norma dan Ideologi Front Nasional (FN) sebagai basis identitas dalam membentuk wacana kebijakan

Dalam proses pembentukan identitas sangat berperan besar dalam merepresentasikan kepentingan nasional serta sangat berkaitan erat dengan pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Pentingnya identitas sebagai hasil dari fakta bahwa mereka melakukan dua fungsi penting. Pertama, bagaimana negara memiliki identitas tertentu yang menentukan preferensi terkait mengenai pilihan tindakan dalam berbagai keadaan dan ketika menghadapi keterlibatan aktor yang berbeda. Oleh karenanya identitas negara menciptakan kepentingan dan memprediksi perilaku selanjutnya terhadap negara lain dalam situasi yang terkait dengan sistem internasional. Kedua, menyiratkan bahwa bagaimana suatu negara memandang negara lain sesuai dengan identitas yang di atributkan kepada mereka, sementara itu secara bersamaan negara tersebut membentuk identitasnya sendiri melalui interaksi sosial dan pratiknya.

Dalam analisis level unit yang lebih memfokuskan pada analisis di ranah domestik dengan adanya nilai dan norma sosial di tingkat individu.

Asumsinya bahwa nilai dan norma yang dibangun oleh individu dapat membentuk sebuah identitas dan kepentingan nasional negara. FN yang merupakan partai dengan nilai dan norma diterapkan dalam *collective identity*, yang dibangun bersama dengan gerakan partai sayap kanan menjadi basis dalam pembentukan wacana politik. Sehingga wacana yang dibangun tentu melalui prinsip dasar dari ideologi partai yang telah berkembang. Norma-norma ini akan memberi tahu aktor tentang siapa mereka, apa tujuan mereka, serta peran apa yang akan di mainkan.

Pada pembahasan sebelumnya di BAB II, menjelaskan detail bagaimana FN telah berdiri dan berkembang serta menghadapi pasang surut dalam meraup dukungan suara dari masyarakat Prancis. Latar belakang sejarah FN sebagai partai sayap kanan ekstrem, dengan beberapa aliran gerakan yang menjadi basis norma untuk menciptakan sebuah wacana. Bagaimana identitas politik yang dibangun FN dapat mempengaruhi politik masyarakat Prancis, serta akan mempengaruhi agen yang akan membentuk perilaku agen dalam membentuk kebijakan luar negeri.

Basis identitas dan kepentingan yang telah dibangun oleh agen melalui FN sebagai identitas korporasi, dengan nilai dan norma sosial yang telah berkembang di dalam agen. FN yang telah mempengaruhi politik masyarakat Prancis melalui wacana yang diibangun tentu akan mempengaruhi identitas sosial di ranah sistemik. Adapun bisa juga sebaliknya bahwa interaksi sosial yang telah dibangun oleh Prancis di ranah sistemik bisa menciptakan sebuah

pengaruh tersendiri terhadap perilaku negara dalam menentukan kebijakannya (Nossiter, 2017).

#### 4.3.2 Pengaruh Norma dan Prinsip Lembaga Uni Eropa (UE) dalam membentuk kebijakan wacana FN

Di analogikan dalam kasus ini sesuai pada bab III, bahwa UE sedang mengalami berbagai tantangan yang mengancam stabilitas regional. Fakta gelombang populisme telah menjadi tren dan telah mendapat dukungan suara yang meningkat di beberapa negara Eropa, Populisme telah terbukti mampu merebut kekuasaan di sejumlah besar negara, begitupun dengan Prancis. Bahkan sebagian mereka berasal dari partai sayap kanan jauh yang akan menghadapi serangkaian pemilu. Tentu terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi peningkatan dukungan gerakan tersebut, terkhusus Prancis yang merupakan negara yang cukup berpengaruh selama pendirian UE (Eiermann, 2017).

Norma dan nilai yang diadopsi oleh lembaga Uni Eropa (UE) telah menjadi pertentangan, sejalan dengan dinamika perubahan dunia globalisasi saat ini. Uni Eropa (UE) sebagai identitas politik Eropa menjadi bentuk institusi yang sering disebut sebagai sistem supranasional, sering kali menjadikan negara-negara anggota harus dibatasi dengan aturan dalam struktur tersebut. Walaupun beberapa pilar kebijakan UE masih diberikan pada kedaulatan negara anggota, namun moralitas dari UE sebagai organisasi regional dengan prinsip demokrasi dan liberalisme menjadi suatu pemaksaan

negara untuk menerima aturan yang ada (Grönlund, 2017, p. 27). Sehingga seringkali krisis yang terjadi di Eropa meligitimasi keberadaan institusi tersebut sebagai sebab terjadinya masalah yang ada seperti adanya krisis ekonomi Yunani, krisis imigrasi dan pengungsi, terorisme, pengangguran serta penurunan ekonomi nasional. Arus globalisasi yang tidak terbatas telah membentuk sebuah jarak antara kedaulatan negara dengan lembaga UE. Sehingga tekanan terhadap dampak lembaga tersebut, serta melihat lingkungan yang ada dan ancaman terhadap kebijakan lembaga dapat membuat efek radikalisme identitas dari FN (EPC, 2017).

Kekuatan norma dan nilai yang dibangun secara dominan didalam struktur, pada nyatanya bisa mempengaruhi negara untuk mempertimbangan kepentingan nasional mereka. Adapun FN sebagai aktor di dalam unit level dapat mempengaruhi nilai dan norma yang selama ini dipegang oleh negara-negara sebagai komitmen di dalam sistem internasional. Nilai-nilai demokrasi dan liberalisme UE yang selama ini dipegang oleh negara Eropa khususnya Prancis mengalami konflik akibat populisme yang berkembang. Banyaknya ancaman dan konflik akibat globalisasi di Eropa, telah mendorong hak populis berkembang di berbagai negara Eropa. banyaknya isu yang berulang dan tidak terselesaikan dengan baik hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit politik yang selama ini mendominasi di negaranya. Kasus dalam dinamika politik Prancis, dengan tersingkirnya kedua partai mainstream menjadi pukulan berat bagi elit liberal (ISA, 2017).

#### 4.3.3 Wacana politik populisme dalam kebijakan “144 komitmen” Marine Le Pen

Ranah domestic yang dibentuk melalui politik identitas FN melalui latar belakang, sejarah, politik dan sosial yang berkembang dalam masyarakat Prancis. Basis wacana populisme yang dibawakan oleh FN sebagai strategi dalam mewakili kehendak rakyat umum, telah menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan kampanye Marine Le Pen. Kebijakan tersebut digambarkan jelas dalam proposal yang dipublikasi oleh website resmi FN (FN, 2017).

Terdapat 144 program yang diberikan oleh Le Pen dari berbagai sektor baik ekonomi, politik, keamanan, imigrasi dan kebijakan luar negeri. Secara tidak langsung semua kebijakan yang tertera dalam proposal tersebut menghasilkan sebuah kebijakan yang saling berpengaruh baik kebijakan internal maupun eksternal. Misalkan dalam kebijakan ekonomi Le Pen yang menerapkan prioritas nasional, dimana program tersebut tertuju pada perlindungan perekonomian masyarakat Prancis baik dalam para pekerja, perusahaan nasional, produk maupun dalam modal. Hal tersebut tentu telah berpengaruh pada kerjasama Prancis yang selama ini dibangun dalam komunitas Uni Eropa dengan kebijakan ekonomi *The four Freedom* yang membebaskan barang, jasa, modal, dan orang-orang (Laurie Buonanno, 2013, p. 142). Adapun kebijakan lain yang bertolak dengan prinsip UE adalah keinginan untuk keluar dari zona euro, sebagai solusi untuk perbaikan ekonomi melalui pengenalan kembali mata uang nasional (franc), serta zona

bebas Schengen sebagai memperkuat keamanan negara Prancis (Robert Schütze, 2018, p. 861).

Wacana yang dibangun oleh FN setidaknya telah menghasilkan dua bagian, dimana bagian kebijakan domestik dan kebijakan luar negerinya. Kebijakan domestik yang dibuat secara tidak langsung menyentuh aturan yang selama ini berlaku terhadap kerjasama antara Prancis dan lembaga UE. Penerapan prioritas nasional FN, akan mengubah arah politik Prancis yang selama ini kebijakan nasional selaras dengan kebijakan luar negerinya. FN melakukan perubahan secara struktural terhadap kebijakan domestik Prancis, secara radikal FN akan mereformasi segala aturan yang tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional (Harris, 2018).

Pertama, Marine Le Pen menetapkan kebijakan untuk mereformasi lembaga UE dengan negosiasi kelonggaran aturan UE terhadap posisi Prancis terutama dalam zona euro, zona Schengen, serta hukum UE. Kedua, jika negosiasi tersebut tidak bisa menghasilkan keputusan yang diinginkan maka Marine Le Pen akan melakukan referendum terhadap keanggotaan Prancis dalam UE. Setidaknya Le Pen menggunakan negosiasi lembaga tersebut untuk meloloskan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan nasional Prancis, bahkan jika harus mengubah konstitusi nasional secara keseluruhan untuk dapat melaksanakan program. Sehingga kebijakan Marine Le Pen memberikan pilihan antara mengubah nilai-nilai lembaga UE atau keluar dari keanggotaan (l'Ifri, 2017).



Fakta wacana yang telah dibangun melalui proposal 144 komitmen Marine Le Pen, telah mendapat dukungan yang sangat signifikan. Berjalannya kepemimpinan yang telah dibangun sejak 2011 silam, hingga mendapat suara terbanyak dalam hasil pemilihan Presiden 2017 yang meraup jumlah suara berkali-kali lipat dari suara yang pernah didapat oleh Jean Marie Le Pen. Selama 6 tahun silam, partai ini terus meningkatkan suara elektoralnya, membuat keuntungan dalam setiap pemilihan lokal, Eropa dan regional. Bahkan fakta hasil tersebut juga menjadikan FN bukan hanya partai atau gerakan protes pemerintah, tetapi sebagai oposisi utama yang akan mewakili masyarakat Prancis. Pada kenyataan bahwa norma dan nilai yang dipegang oleh FN yang selama ini bertentangan dengan prinsip UE, telah mendapat perhatian dan dukungan lebih dari masyarakat Prancis. Sehingga keberhasilan wacana yang telah dibangun FN, menjadi fakta bahwa FN berhasil mempengaruhi (konstruksi) politik masyarakat Prancis yang skeptis terhadap partai politik arus utama yang pro dengan UE (Chrisafis, 2017).

**Table 7 : Poin Kebijakan Domestic dan Kebijakan Luar Negeri FN**

Kebijakan Domestic	Kebijakan luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kembalikan mata uang nasional Franc</li> <li>• Proteksi ekonomi</li> <li>• French First</li> <li>• melindungi perbatasan Perancis (keluar dari Schengen &amp; memperketat akses imigrasi)</li> <li>• pemotongan imigrasi 10.000 pertahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• negosiasi lembaga UE (zone euro dan zona Schengen)</li> <li>• Referendum keanggotan UE</li> <li>• Keluar dari Nato</li> <li>• Intensitas kerjasama dengan Russia</li> <li>• Memperbesar anggaran pertahanan</li> <li>• Stop imigrasi</li> </ul>

**Table 8 : Kebijakan Marine Le Pen yang bertolak belakang dengan prinsip UE**

Proposal Le Pen VS Prinsip UE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reindustrialisasi Prancis</li> <li>• Kedaulatan moneter, menolak perjanjian perdagangan bebas</li> <li>• Menolak impor dan produk asing yg tdk sesuai prosedur</li> <li>• Investasi asing (jika sesuai dengan kepentingan nasional)</li> <li>• Estabilitas pertahanan, menambah anggaran pertahanan</li> <li>• Keluar dari Nato</li> <li>• Mengurangi imigrasi legal menjadi 10.000 per tahun</li> <li>• keluar dari zona schengen</li> </ul>	<p>Tiga pilar kerjasama UE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunitas Eropa (EC)</li> <li>• CFSP</li> <li>• Peradilan dan masalah dalam negeri (JHA)</li> </ul>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini, terdiri dari beberapa bagian yang menjadi asumsi dasar dari analisis penerapan teori holistik yang sudah diteliti oleh penulis. Pada bagian BAB II, kesimpulan ini terdiri dari profil partai Front Nasional (FN) dan Marine Le Pen sebagai identitas politik yang dibentuk melalui norma dan nilai yang dibangun melalui latar belakang historis partai. Hingga dapat menjelaskan, sebab norma dan nilai tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan wacana kebijakan Marine Le Pen. Pada BAB III, penulis mengidentifikasi fakta sosial yang terjadi di Prancis serta ruang lingkup idealitas internasional dengan lembaga UE. Dimana penekanan pada norma dan prinsip UE yang dominan, menjadi faktor utama peningkatan dukungan partai FN. Selanjutnya pada BAB IV, penulis menganalisis penerapan teori konstruktivisme holistik menggunakan wacana kebijakan FN “144 enggagmen” sebagai hasil dari ranah level unit (domestic) dan ranah sistemik (internasional) berpengaruh dan berkesinambungan dalam membentuk perilaku negara.

Pertama pada level unit, Front Nasional (FN) sebagai aktor pembentukan identitas politik melalui nilai dan norma yang dibangun dalam dinamika Prancis. Front Nasional (FN) merupakan partai sayap kanan yang sejak lama berada di pinggiran politik Prancis, dan menjadi politik sayap kanan tertua yang berada di

Eropa. FN berdiri pada tahun 1972, dengan Jean Marie Le Pen sebagai Presiden pertama partai tersebut. Mengawali sebagai kelompok sayap kanan dari semua aliran dan gerakan di Prancis, hingga menjadi sebuah partai dari penyatuan *collective identity* dengan semangat nasionalisme Prancis. Latar belakang partai yang menjadi payung dari berbagai gerakan menjadikan label 'ekstrem' telah melakat, seperti xenophobia, anti-semitisme, rasisme dan fasisme. Sehingga partai tersebut sejak awal menjunjung nilai-nilai nasionalisme Prancis, sejalan dengan pembentukan lembaga Uni Eropa (UE).

Selama berjalannya dinamika politik Prancis, FN mengalami perkembangan yang dinamis. Ketika FN dibawah kepemimpinan Jean Marie Le Pen, partai tersebut fokus untuk membangun dukungan partai yang cukup sulit. Partai tersebut belum mendapatkan perhatian yang lebih, karena pada saat itu masyarakat sedang menikmati masa dimana mereka menaruh keuntungan terhadap pemerintah atas pembentukan identitas politik lembaga Uni Eropa. Hingga pada tahun 2002, Jean Marie Le Pen berhasil lolos ke putaran kedua dalam pemilihan Presiden dengan mendapat 16,5%. Pada pemilihan Presiden 2007, Jean kembali kehilangan dukungan dengan hanya mendapat 10,75% yang merupakan hasil terburuk dalam dua dekade terakhir. Setidaknya FN telah kehilangan sekitar 1 juta dukungan masyarakat Prancis.

Pada tahun 2011, Marine Le Pen mengambil alih partai dari ayahnya yaitu Jean Marie Le Pen. Setelah mendapatkan dukungan dari internal partai FN, segera FN mereformasi partai yang lebih moderat. Sejak lama FN dibawah kepemimpinan Jean Marie Le Pen melabelkan 'ekstrem' pada partainya, sehingga Marine Le Pen

menganggap hal ini menjadi sebab kurangnya dukungan masyarakat. sehingga Marine Le Pen menggunakan strategi 'de-demonization', artinya Le Pen akan menggunakan retorika yang lunak terhadap wacana yang dibentuk. Marine Le Pen juga lebih menggunakan retorika populis sebagai penekanan terhadap krisis yang terjadi dalam domestik.

Strategi populisme yang dibangun Marine Le Pen, pada akhirnya telah membuat partai mengalami perkembangan yang meningkat. Selama 6 tahun kepemimpinannya, Marine Le Pen telah berhasil memperbaiki citra partai terhadap pandangan publik, peningkatan keanggotaan partai serta peningkatan dalam electoral partai. Menuju pemilihan Presiden 2017, FN telah mempublikasi kebijakan kampanye pada '144 engagement' Marine Le Pen. Kebijakan tersebut berisikan wacana program-program baik kebijakan domestic maupun kebijakan luar negeri FN. Hingga pada pemilihan presiden 2017, Marine Le Pen sebagai kandidita presiden FN telah berhasil menyingkirkan kedua partai mainstream dan berhasil maju ke putaran kedua. Pada putaran pertama, Marine Le Pen berhasil meraup dukungan 21,3% suara atau sekitar 7,6 juta suara. Hingga pada hasil final, Marine Le Pen hanya mendapat 34% kalah atas perlehan Macron yang mendapat 66%. Hasil yang didapatkan oleh Marine Le Pen dengan mendapatkan 34% atau sekitar 11 juta suara, merupakan jumlah perolehan tertinggi yang pernah didapatkan oleh FN selama perkembangannya. Fakta bahwa wacana yang dibuat oleh FN sebagai partai sayap kanan populis berhasil mempengaruhi politik masyarakat Prancis melalui peningkatan hasil dukungan yang telah dicapai.

Dalam level sistemik, Benua Eropa telah menjadi kiblat dalam memandang sistem internasional dalam tatanan dunia liberal. Sebagai benua yang telah menciptakan paham liberal dengan mengadopsi langsung sistem tersebut melalui pembentukan institusi, organisasi dan hukum yang dibangun secara langsung sesuai dengan norma liberalisme. Secara umum liberalisme mengadopsi nilai-nilai kebebasan masyarakat dengan kebebasan individu, yang dicirikan sebagai kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Liberalisme juga mendasari atas argument moral yang menjamin hak dari suatu individu. Sehingga perhatian utama liberalisme adalah membangun institusi yang melindungi kebebasan individu, membatasi dan memeriksa kekuatan politik negara. Dalam praktiknya, Eropa berusaha untuk menyebarkan paham tersebut termasuk demokrasi liberal, kapitalis, identitas nasional, serta menjunjung nilai Hak Asasi Manusia (HAM).

Lembaga Uni Eropa telah dibangun dalam serangkaian perjanjian-perjanjian yang mengikat, memiliki karakteristik dari entitas supranasional dan intergovernmental. Negara anggota berusaha untuk menyelaraskan undang-undang kebijakan secara umum, untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah sesuai dengan kepentingan bersama. Hingga UE memiliki 3 pilar kerjasama yaitu Komunitas Eropa (European union), Kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri (CFSP), Peradilan dan masalah dalam negeri (JHA). Sehingga saat ini UE telah menerapkan serangkaian kerjasama dari mengadopsi pilar tersebut seperti adanya kerjasama ekonomi dengan menghilangkan hambatan (four freedom), adanya kerjasama Schengen, mata uang tunggal euro dan kebijakan lainnya.

Memasuki abad ke 21, dinamika politik Eropa tengah mengalami ketidakstabilan akibat tren gelombang populisme yang kian mengancam masa depan demokrasi dan liberalisme di kawasan tersebut. Setelah paham liberalisme menjadi dominan seiring dinamika globalisasi yang semakin dinamis, UE mengalami serangkaian konflik dan masalah yang terjadi dalam situasi politik regional. Dampak dari krisis ekonomi Yunani 2007 silam, fakta tersebut menjadi salah satu faktor yang kuat terhadap dorongan peningkatan gerakan populis. Dampak krisis ekonomi yang belum pulih telah menambah daftar masalah lainnya, seperti angka pengangguran, krisis pengungsi dan imigran, serta isu terorisme. Efek adanya globalisasi yang tidak terkendali membuat banyak masyarakat internasional sadar akan bahaya dan ancaman aturan lembaga terhadap kepentingan nasional negara.

lambatnya penanganan UE terhadap masalah yang ada membuat banyak pandangan negative terhadap lembaga tersebut. Banyaknya aturan lembaga membuat negara anggota mempertimbangkan prinsip moral identitas, sehingga memaksa negara untuk dapat menerima dan menerapkan kebijakan tersebut demi kepentingan bersama. Sehingga banyak diantaranya masyarakat mulai melihat bahwa lembaga tersebut tidak lagi bisa memberikan keuntungan, dan hanya bisa meleburkan kedaulatan negara untuk dapat memutuskan kebijakan sesuai dengan prioritas nasional. Meningkatnya gerakan populisme di belahan benua Eropa, terus mendorong semangat nasionalisme masyarakat terhadap negara bukan lagi terhadap identitas UE. Serta keputusan Brexit yang telah dilakukan melalui referendum, tanpa dipungkiri menambah kepercayaan diri terhadap skeptisme lembaga UE.

Faktor sistemik tersebut juga telah menjadi faktor pendorong radikalisisasi wacana FN dalam mempengaruhi dinamika politik masyarakat Prancis. Globalisasi kian berjalan tanpa ada batas, sejalan dengan keberlangsungan lembaga UE dengan prinsip kebebasan faktanya dianggap hanya menguntungkan kalangan para elit. Dampak globalisasi telah mengancam kehidupan kaum menengah kebawah, kalangan pekerja kerah biru, perusahaan kecil dan ancaman terhadap produk Prancis. Sehingga partai sayap kanan front nasional (FN) berusaha mewakili hak orang-orang secara umum, khususnya melindungi warga asli Prancis dari kepentingan lembaga.

Hasil dari wacana yang dibangun oleh partai FN yaitu terhadap publikasi kebijakan kampanye “144 komitmen” Marine Le Pen 2017. Wacana tersebut telah berhasil mempengaruhi (konstruk) politik masyarakat Prancis, dengan menggunakan hasil peningkatan suara pada pemilihan Presiden 2017 sebagai tolak ukur. Hasil tersebut merupakan jumlah tertinggi yang pernah didapatkan oleh partai tersebut, yaitu sekitar 11 juta suara. Komitmen kebijakan kampanye Marine Le Pen juga berisikan terkait kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri Prancis.

Pada bab analisis konstruktivisme holistik, sesuai dengan asumsinya bahwa varian sistemik dan unit level telah menciptakan dikotomi antara faktor domestic dan aktor internasional. Holistik melihat bahwa kedua varian tersebut memiliki peran yang sama dalam pembentukan perilaku negara. Holistik mempercayai bahwa faktor domestic mempengaruhi identitas korporasi sebuah negara, sedangkan faktor internasional akan mempengaruhi sosial identitas negara. Kedua identitas tersebut akan mempengaruhi satu sama lainnya dalam menentukan wacana prioritas negara.



Sehingga FN sebagai aktor telah membentuk sebuah identitas korporasi yang dibangun melalui norma dan nilai yang selama menjadi latar belakang pembentukannya. Sehingga identitas korporasi tersebut menentukan bagaimana pembentukan identitas sosial Prancis dalam menentukan kebijakan luar negeri FN.

Dalam kebijakan kampanye Marine Le Pen melalui 144 komitmen yang telah dipublikasikan oleh FN, terdapat beberapa kebijakan baik ekonomi, pekerja dan sosial, keamanan, imigran, dan kebijakan luar negeri. Kebijakan yang dijelaskan dalam bentuk artikel tersebut secara tidak langsung berkesinambungan dimana kebijakan domestic yang lebih penekanan pada prioritas nasional berpengaruh pada aturan kebijakan luar negeri yang selama ini dibangun. Seperti halnya dalam kebijakan reindustrialisasi, kedaulatan moneter, menolak perjanjian perdagangan bebas, menolak impor dan produk asing yg tidak sesuai prosedur sehingga kebijakan prioritas nasional dalam ekonominya tidak sesuai dengan pilar pertama komunitas UE. Bahkan dalam kebijakan imigran dengan pemotongan jumlah menjadi 10.000 pertahun tentu harus berhadapan dengan resolusi yang akan bertentangan dengan prinsip UE dan kepentingan bersama lembaga tersebut.

Seperti dalam substansi yang tertera dalam kebijakan tersebut, sesuai dengan program-program terkait kebijakan domestic dan kebijakan internasional. Setidaknya bisa ditarik kesimpulan bahwa Le Pen berusaha mengubahnya dalam dua hal. Pertama, mereformasi dan mengubah nilai-nilai yang terdapat pada struktur UE dengan beberapa negosiasi yang akan dilakukan antara Prancis dan UE. Kedua, jika

negosiasi yang dilakukan tersebut tidak memberikan solusi maka Prancis akan melakukan referendum terkait keanggotaan Prancis.

## **5.2 Saran dan Rekomendasi**

Saran serta rekomendasi sesuai dengan penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis kasus ini lebih spesifik lagi. Misalnya dalam kebijakan Marine Le Pen setidaknya terdapat 144 komitmen Marine Le Pen yang menjadi agenda kampanyenya. Penelitian lainnya bisa menganalisis salah satu kebijakan Marine Le Pen. Terdapat beberapa sektor seperti sektor ekonomi, sosial, keamanan dan kebijakan luar negeri. Sehingga penelitian ini lebih bisa diperdalam lebih lanjut, sehingga penelitian bisa dijadikan literature atau referensi pada penelitian yang sejenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adu, A. (2017, Mey 8). *lLe Pen 'THIRD in election as spoiled ballots & abstentions beats votes for anti-EU pick'*. Retrieved from Express:  
<https://www.express.co.uk/news/world/801567/Emmanuel-Macron-Marine-Le-Pen-France-election-French-voters-abstained-Front-National>
- Aisch, G. (2017, April 23). *How the Election Split France*. Retrieved Maret 10, 2018, from The New York Time:  
<https://www.nytimes.com/interactive/2017/04/23/world/europe/french-election-results-maps.html>
- Aldelman, L. (2014, Agustus 21). *France Acknowledges Economic Malaise Blaming Austerity*. Retrieved from The New York Time:  
<https://www.nytimes.com/2014/08/21/business/international/france-acknowledges-economic-malaise-blaming-austerity.html>
- Alden, E. (2016, Juni 29). What Brexit Reveals About Rising Populism. *Council Foreign Affairs* . (J. McBride, Interviewer)
- Alessandri, J.-L., Auers, D., & Balcerre, I. (2017). *The Rise of Populism: Lessons for the European Union and the United States of America*. Lutvia: the European Parliament and the Konrad Adenauer Foundation.
- Algan, Y. (2017). The European Trust Crisis and the Rise of Populism. *Brooking Papers on Economic Activity (BPEA)*, (p. 1).
- Amraoui, A. S. (2017, Mei 7). *Five things you need to know about France's vote*. Retrieved from Al Jazeera:  
<https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/05/france-vote-170506055703263.html>
- Anttila, S. (2017). The Rise of The Front National. *Bachelor's Thesis, School of Business and Governance, Tallin University of Technology* 7-8.
- Anttila, S. (2017). The Rise of The Front National. *Bachelor's Thesis, Tallin University of Technology*, 11-12.
- Archick, K. (2017). *The European Union: Current Challenges and Future Prospects*. CSR Report, Prepared for Members and Comittes of Congress.
- Ashkenas, J., & G.Aisch. (2016, Desember 5). *European Populism in the Age of Trump*. Retrieved from New York Times:  
<https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/05/world/europe/populism-in-age-of-trump.html>

- Association, P. (2017, May 7). *French president-elect Emmanuel Macron hails 'new page of our history'*. Retrieved January 2018, 27, from Dailymail: <http://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-4482464/Emmanuel-Macron-course-new-French-president.html>
- Atabong, N. N. (2018). Immigration and the Revival of Nationalist Sentiments in France: A Nationalistic Rhetoric of Marine Le Pen. *Spring Publish*, 25-26.
- Atabong, N. N. (2018). Immigration and the Revival of Nationalist Sentiments in France: A Nationalistic Rhetoric of Marine Le Pen. *Spring*, 25.
- Auth, G. (2005). *International Society and the Making of International Order: Outline of a*. UK: LIT Verlag Münster.
- Balfour, R. (2017). The (Resistable) Rise of Populism in Europe and its Impact on European and International Cooperation. *IEMed Mediterranean*, 56-57.
- Barnett, M. (2001). *Social Constructivism*. New York: Oxford University Press.
- Bayliss, C. (2017, April 12). *FREXIT? Marine Le Pen promises 'EU referendum WITHIN SIX MONTHS' should she win election*. Retrieved from Express: <https://www.express.co.uk/news/world/790846/marine-le-pen-promises-eu-referendum-frexit-within-six-months-french-presidential-election>
- Bell, D. (2014). What is Liberalism? *SAGE Journals Publications*, 42(6), 5.
- Bénard, L. (2017, April 23). *What France Would Look Like Under President Marine Le Pen*. Retrieved from Fice France : [https://www.vice.com/en\\_us/article/jpzipwd/what-france-would-look-like-under-marine-le-pen](https://www.vice.com/en_us/article/jpzipwd/what-france-would-look-like-under-marine-le-pen)
- Bengtsson, H. (2016, Mei 25). *Across Europe, distrust of mainstream political parties is on the rise*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2016/may/25/across-europe-distrust-of-mainstream-political-parties-is-on-the-rise>
- Berezin, M. (2007). Between Zollverein and Patrie: The French National Front, the "New" April 21 and the Rejection of the European Constitution. *Mario Einaudi Center for International Studies*, 12-13.
- Bildt, C. (2017, Januari 18). *The six issues that will shape the EU in 2017*. Retrieved November 13, 2017, from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/the-six-issues-that-will-shape-the-eu-in-2017/>
- Bossetta, M., & Husted, E. (2017). Introduction: Populism in the 21st Century: Critical reflections on a global phenomenon. *politik tidsskrift.dk*, 20, 2.

- Bowden, G. (2017, 04 24). *Marine Le Pen 2017 Policies: What Her French Presidential Manifesto Promises*. Retrieved from huffington post: [https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/marine-le-pen-2017-manifesto-what-her-french-presidential-plan-promises\\_uk\\_58fdbba8e4b018a9ce5c6e19](https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/marine-le-pen-2017-manifesto-what-her-french-presidential-plan-promises_uk_58fdbba8e4b018a9ce5c6e19)
- Briegel, F. (2016, Mei 03). *Political developments in Europe: Multiple challenges put EU's future to the test*. Retrieved from Rabo Research Global Economics & Market: <https://economics.rabobank.com/publications/2016/may/political%2Ddevelopments%2Din%2DEurope/>
- Budiarjo, M. (1989). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bugaric, B. (2017). *The Populists at the Gates: Constitutional Democracy Under Siege? Public Law and the New Populism* (p. 1). new york : The International Journal of Constitutional Law (I-CON).
- Burchill, S. (2001). *Theories of International Relations*. UK: Palgrave Macmillan.
- Cabanes, A. d. (2017, November). *The Front National and the 2017 Electoral Cycle: Mixed Fortunes*. *ransform-network.net*, 5-6.
- Cabanes, A. d. (2017). *The Front National and the 2017 Electoral Cycle: Mixed Fortunes*. *transform! european*, 3.
- Campione, A. (2015). *Revolution of the right: explaining the rise of the front national in light of the 2008 financial crisis*. *College of Liberal Arts & Social Sciences Theses and Dissertations*, 33-42.
- Carvalho, J. (2017). *The French mainstream and the Front National's electoral fortune*. *ResearchGate*.
- Caton, V. (2015). *France and the Politics of European Economic and Monetary Union*. UK: Palgrave Macmillan.
- Checkel, J. T. (2008). *Constructivism and Foreign Policy*. In A. H. Steve Smith, *Foreign Policy: Theories. Actors. Cases* (p. 78). Oxford: Oxford University Press,.
- Chesnot, T. (2014, Agustus 25). *Hollande Orders a New French Government*. Retrieved from Stratfor Worldview: <https://worldview.stratfor.com/article/hollande-orders-new-french-government>
- Chhor, K. (2016, Desember 14). *The spectacular rise and fall of Hollande's Socialist Party*. Retrieved from France24: <https://www.france24.com/en/20161209-hollande-rise-fall-future-france-socialist-party-macron-valls>

- Chrisafis, A. (2012, Juli 2). *François Hollande struggles to rebrand austerity as French budget looms*. Retrieved from The Guardian :  
<https://www.theguardian.com/world/2012/jul/02/francois-hollande-french-budget>
- Chrisafis, A. (2012, November 01). *Why François Hollande's popularity has plummeted*. Retrieved from The Guardian :  
<https://www.theguardian.com/world/2012/nov/01/why-francois-hollande-popularity-plummeted-france>
- Chrisafis, A. (2017, Mei 7). *Marine Le Pen defeated but France's far right is far from finished*. Retrieved from The guardian:  
<https://www.theguardian.com/world/2017/may/07/marine-le-pen-defeated-front-national-far-from-finished>
- Chrisafis, A. (2017, April 21). *'The real misery is in the countryside': support for Le Pen surges in rural France*. Retrieved from The Guardian:  
<https://www.theguardian.com/world/2017/apr/21/countryside-marine-le-pen-forgotten-france-presidential-election-2017>
- Cincu, A.-E. (2017). Far Right Populist Challenge in Europe. *Alternative For Germany and The National Front. EUROPOLITY, 04(1)*, 38-40.
- Clercq, G. d. (2011). *marine le pen's economic cure*. France: Thomson Reuters.
- Connolly, K. (2017, Januari 21). *After the US, far right says 2017 will be the year Europe wakes up*. Retrieved november 14, 2017, from The Guardian :  
<https://www.theguardian.com/world/2017/jan/21/koblenz-far-right-european-political-leaders-meeting-brexit-donald-trump>
- Copelovitch, M., Frieden, J., & Walte, S. (2016). The Political Economy of the Euro Crisis. *Sage Journal, 49(7)*, 2.
- Corre, P. L. (2017). France: a Critical Player in a Weakened Europe. *Center on the United States and Europe (CUSE) at Brookings*, 3-6.
- Courmont, B. (2017). The “Marine” Factor: What the Lепенisation of French Politics Really Means. *The Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS), 11(4)*, 80-83.
- Crépon, S., Dézé, A., & Mayer, N. (2016). Marine Le Pen’s Challenge. *Cairro Review, 72-74*.
- Darmawan, A. (2017). Gerakan Populis sebagai Tren Global: Dari Amerika Latin sampai Occupy Movement. *INSIGNIA Journal of International Relations, 4*, 2-3.

- Davies, P. (2002). *The Extreme Right in France, 1789 to the Present*. London: Taylor & Francis e-Library.
- Dearden, L. (2017, April 18). *French elections: Marine Le Pen vows to suspend immigration to 'protect France'*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-elections-latest-marine-le-pen-immigration-suspend-protect-france-borders-front-national-fn-a7689326.html>
- Durham, E. H. (2017). *The Political Spectrum & Genopolitics: Primer & Reference Guide*. United States: Mcdonnely & Sons Publishing.
- Eiermann, Y. M. (2017, Desember 29). *2017 Was the Year of False Promise in the Fight Against Populism*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2017/12/29/2017-was-the-year-of-false-promise-for-populism/>
- EPC. (2017). *The Impact of Populism on Europe's external relations*. Brussels: European Policy Centre.
- Erlanger, S. (2016, June 23). *Britain Votes to Leave E.U.; Cameron Plans to Step Down*. Retrieved from Nytimes: <https://www.nytimes.com/2016/06/25/world/europe/britain-brexiteuropean-union-referendum.html>
- European Movement International. (2017). Europe in France: Top 5 French Political Party Programmes. *European Movement International* , 8.
- Evans-Pritchard, A. (2017, May 21). *Marine Le Pen abandons Frexit crusade 'error'*. Retrieved from The Telegraph : <https://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/21/marine-le-pen-abandons-frexit-crusade-error/>
- Florentina, A. (2017). Current challenges of the European security caused by the refugee crisis. The EU's fight against terrorism. *CES Working Papers*, 9(3), 174-175.
- FN. (2017). *Les 144 engagements présidentiels*. Retrieved from Rassemblement Nationa: <https://www.rassemblementnational.fr/le-projet-de-marine-le-pen/>
- Fournier, T. (2018). Rhetoric to Action – a Constitutional Analysis of Populism. *European University Institute, Department of Law*, 6.
- Gaffney, J. (2015). *France in the Hollande Presidency: The Unhappy Republic*. UK: Pgrave Macmillan.

- Galston, W. A. (2018, Maret 08). *The rise of European populism and the collapse of the center-left*. Retrieved from Brookings:  
<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/03/08/the-rise-of-european-populism-and-the-collapse-of-the-center-left/>
- Golder, M. (2016). Far Right Parties in Europe. *Annual Review of Political Science* , 19, 477-497.
- grabow, K., & Hartleb, F. (2013). *Right-wings and National Populist Parties Europe*. German: The Centre for European Studies (CES), Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
- Grönlund, J. (2017). Drivers of Euroscepticism In France and The United Kingdom *Telling University of Technology*, 27.
- Gultchin, L. (2017, desember 29). *European Populism: Trends, Threats, and Future Prospects*. Retrieved January 24, 2017, from Tony Blair Institute:  
<https://institute.global/insight/renewing-centre/european-populism-trends-threats-and-future-prospects>.
- Hakimi, H. (2018, Maret 3). *Could Marine Le Pen's Potential Election Have Threatened France's Democracy?* Retrieved from Democratic Erosion a cross-university collaboration: <http://democratic-erosion.com/2018/03/13/could-marine-le-pens-potential-election-have-threatened-frances-democracy-by-heloise-hakimi-le-grand-ucla/>
- Hanley, J. (2016, Mei 26). *Why have France's labour reforms proved so contentious?* Retrieved from The Guardian:  
<https://www.theguardian.com/world/2016/may/26/why-france-labour-reforms-proved-so-contentious>
- Haris, C. (2018, 8 Maret). *Explained: the rise and rise of populism in Europe*. Retrieved from Euro News: <http://www.euronews.com/2018/03/15/explained-the-rise-and-rise-of-populism-in-europe>
- Harris, C. (2018, Februari 20). *Explained: how France's newest party is copying Farage in a bid for Frexit*. Retrieved from euronews:  
<http://www.euronews.com/2018/02/20/explained-how-france-s-newest-party-is-copying-farage-in-a-bid-for-frexit>
- Henley, J. (2016, Maret 29). *Why is support for Europe's mainstream political parties on the wane?* Retrieved from The Guardian:  
<https://www.theguardian.com/world/2016/mar/29/support-europes-mainstream-political-parties-parliaments>



- Henley, J. (2017, April 21). *French elections: all you need to know*. Retrieved from the Guardian : <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/04/french-elections-all-you-need-to-know>
- Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural. *Faculty Research Working Paper Series, Harvard Kennedy School*.
- ISA. (2017, November 2017). *Populism In Europe*. Retrieved from International Strategic Analysis (ISA): [http://www.isa-world.com/news/?tx\\_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx\\_ttnews%5Btt\\_news%5D=366&cHash=075a64d88c0e392602e6f37e19d3553e](http://www.isa-world.com/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=366&cHash=075a64d88c0e392602e6f37e19d3553e)
- Ivaldi, G. (2014). A new course for the French radical-right? *HAL archives-ouvertes*, 1-2.
- Ivaldi, G. (2014). A new course for the French radical-right? : The Front National and de-. *HAL archives-ouvertes.fr*, 1-4.
- J Heinö, A. (2017). Authoritarian Populism Index 2017. *European Policy Information Center (EPICENTER)*.
- J Heinö, A., Caccavello, G., & Sandell, C. (2017). *Authoritarian Populism Index 2017*. Brussels: European Policy Information Center.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2007). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. London: Oxford University Press.
- Johansson, K. M. (2010). How Populist Parties. *The PESO Research Report, School of Social Science, Södertörn University*, 24-26.
- Jr, S. M. (2018). Understanding and Subverting Contemporary Right-wing Populism: preliminary notes from a critical agrarian perspective. *ERPI 2018 International Conference* (pp. 1-3). Netherlands: International Institute of Social Studies (ISS) in The Hague.
- Kentish, B. (2017, Mei 07). *Nearly half of young French voters backed Marine Le Pen, projections suggest*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/nearly-half-young-french-voters-marine-le-pen-emmanuel-macron-french-election-2017-a7723291.html>
- KFCRIS. (2017). The Rise of French Populism: An Election in a Most Fractured Landscape. *King Faisal Center for Research and Islamic Studies*, 11.
- Klimentyl, M. (2017, Mey 06). *What Future Marine Le Pen Wants for France*. Retrieved from Sputniknews:

<https://sputniknews.com/politics/201705061053343662-marine-le-pen-france-policies-144-committments/>

- Lacalle, D. (2017, Februari 22). *France exiting the euro would be the largest sovereign default in history with serious contagion effects*. Retrieved from CNBC Newsletters: <https://www.cnbc.com/2017/02/22/france-exiting-the-euro-would-be-the-largest-default-in-history-with-serious-contagion-effects.html>
- Lafont Rapnoil, M., & Shapiro, J. (2017, April 19). *Marine Le Pen's Bait-and-Switch Foreign Policy*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/2017/04/19/marine-le-pens-bait-and-switch-foreign-policy/>
- Lamt, S. (2005). *Contemporary Mainstream Approaches: Neo-Realism and Neo-Liberalism in Baylis*. Oxford: Oxford University Press.
- Langenbacher, N., & Schellenberg, B. (2011). *IS EUROPE ON THE : Right-wing extremism and populism in Europe*. Berlin: The Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Laurie Buonanno, N. N. (2013). *populist marine le pen is based on the principle of the European Union*. UK: Palgrave Macmillan .
- Lefebvre, M. (2012, July 10). Can the European Union become Major a Power? *Fondation Robert Schuman*, 1-3.
- Leng, R. J. (2002). *Evaluating Methodologies in International Studies*. Michigan: The University of Michigan Press.
- l'Ifri, É. d. (2017). *Foreign Policy Challenges for the Next French President*. Brussels: Institute Francais des Relations Internationales.
- Llorente, J. L. (2017, April 30). *Le Pen won't win, but the Front National will not disappear*. Retrieved from Cherwell: <http://cherwell.org/2017/04/30/le-pen-wont-win-but-the-front-national-will-not-disappear/>
- Louis, L. (2017, Maret 03). *Marine Le Pen and the spectre of Frexit*. Retrieved from Lowy Institute : <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/marine-le-pen-and-spectre-frexit>
- Louis, T. (2014). The Far Right in Europe. *Rosa Luxemburg Stiftung : Brussels Office*, 3-4.
- Maldini, P., & Takahashi, M. (2017). Refugee Crisis and the European Union: Do the Failed Migration and Asylum Policies Indicate a Political and Structural Crisis of European Integration? *Communication Management Review*, 02, 55.

- Martinelli, A. (2016). *Populism on the Rise: Democracies Under Challenge?* Milan: The Italian Institute for International Political Studies (ISPI).
- Masarat. (2017). The Rise of French Populism: An Election in a Most Fractured Landscape. *King Faisal Center For Research and Islamic Studies*, 10-12.
- Matthew, G. (2017, October 20). *European Populism Is Here to Stay*. Retrieved January 24, 2018, from NYTimes: <https://www.nytimes.com/2017/10/20/opinion/european-populism-is-here-to-stay.html>
- McAuley, J. (2017, April 22). *Marion Maréchal-Le Pen: 'We've won the battle of ideas*. Retrieved from The Washington News: [https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/22/marion-marechal-le-pen-weve-won-the-battle-of-ideas/?noredirect=on&utm\\_term=.5602382ef312](https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/22/marion-marechal-le-pen-weve-won-the-battle-of-ideas/?noredirect=on&utm_term=.5602382ef312)
- McGlinchey, S. (2017). *International relations theory*. Bristol, England: E-International Relation Publishing.
- Mcguinness, R. (2017, Januari 25). *'The euro is KILLING US' Marine Le Pen vows to pull France OUT of the eurozone*. Retrieved from Express: <https://www.express.co.uk/news/world/758827/Marine-Le-Pen-vow-pull-France-out-eurozone-Euro-killing-us-European-Union>
- Mcintosh, J. (2017, April 24). *Macron and Le Pen go to run-off after winning French presidential first-round vote*. Retrieved from DW News: <https://www.dw.com/en/macron-and-le-pen-go-to-run-off-after-winning-french-presidential-first-round-vote/a-38554972>
- McKirdy, J. M. (2017, May 4). *Head to head: How Le Pen and Macron compare*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2017/04/24/europe/how-le-pen-and-macron-compare/index.html>
- Mcnamara, S. M. (2007). *The State of the European Union, Making History: European Integration and Institutional Change at Fifty* (Vol. 8). New York: Oxford University Press.
- McNicoll, T., & Davis, A. (2017). *Macron- Le Pen, Presidential Platform Comparison*. Retrieved from France 24: <http://graphics.france24.com/macron-le-pen-platform-comparison-presidential/>
- Melander, I. (2017, Februari 04). *France's Le Pen sets out presidential election manifesto*. Retrieved from Reuters: <https://uk.reuters.com/article/uk-france-election-fn-manifesto-factbox/frances-le-pen-sets-out-presidential-election-manifesto-idUKKBN15J00B>

- Melander, I. (2017, Februari 4). *France's Le Pen sets out presidential election manifesto*. Retrieved from Reuters: <https://uk.reuters.com/article/uk-france-election-fn-manifesto-factbox/frances-le-pen-sets-out-presidential-election-manifesto-idUKKBN15J00B>
- Melander, I. (2017, Februari 04). *Le Pen kicks off campaign with promise of French 'freedom'*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-france-election-fn/le-pen-kicks-off-campaign-with-promise-of-french-freedom-idUSKBN15J007>
- Michel, E. (2017). French presidential election: An expected surprise. *Center Italiano Studi Elettorali (CISE)*, 87-88.
- Mudde, C. (2016). Europe's Populist Surge: A Long Time in the Making. *Foreign affairs (Council on Foreign Relations)*, 25.
- Mudde, C. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. UK: Oxford University Press.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2012). *Populism in Europe and the Americas: Threat Or Corrective for Democracy?* New York: Cambridge University Press.
- Mulholland, R., & Samuel, H. (2017, Mei 8). *French election results: Emmanuel Macron says France facing 'immense task' to rebuild European unity as he defeats Marine Le Pen*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/07/french-election-live-marine-le-pen-emmanuel-macron-presidency/>
- Müller, J.-W. (2016). *What Is Populism?* Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
- Murphy, H. (2017, maret 09). *The economy that France's next president will inherit*. Retrieved from Financial Time: <https://www.ft.com/content/c33bafde-fe68-11e6-8d8e-a5e3738f9ae4>
- National, F. (2017). *Les 144 engagements présidentiels*. Retrieved from Rassemblement National: <https://www.rassemblementnational.fr/>
- Nia, M. M. (2011). Title: A Holistic Constructivist Approach to Iran's Foreign Policy. *International Journal of Business and Social Science*, 02(4), 282.
- Nielsen, M. S. (2017). The framing of Euroscepticism in DF, AfD and FN: Contemplating Euroscepticism in the European right-wing. *Master Thesis, Aalborg University*, 31-32.

- Nositter, A. (2017, April 20). *Marine Le Pen Leads Far-Right Fight to Make France 'More French'*. Retrieved Maret 06, 2018, from The New York Times : <https://www.nytimes.com/2017/04/20/world/europe/france-election-marine-le-pen.html>
- Nossiter, A. (2017, Februari 5). *Marine Le Pen Echoes Populasi Orang Jelek Trump dalam Kampanye Perancis Kickoff*. Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2017/02/05/world/europe/marine-le-pen-trump-populism-france-election.html>
- Nossiter, A. (2017, April 20). *Marine Le Pen Leads Far-Right Fight to Make France 'More French'*. Retrieved from The New York Time: <https://www.nytimes.com/2017/04/20/world/europe/france-election-marine-le-pen.html>
- Nowak, M., & Branford, B. (2017, Februari 10). *France elections: What makes Marine Le Pen far right?* Retrieved from BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-38321401>
- NWE. (2018, Juni 12). *history of France*. Retrieved from New world encyclopedia: <http://www.newworldencyclopedia.org/entry/France#>
- O'Reilly, M. (2018, Juni 02). *Why populism is on the rise*. Retrieved from Gulf News : <https://gulfnews.com/news/europe/italy/why-populism-is-on-the-rise-1.2230423>
- Olsson, S. (2009). *Crisis Management in the European Union: Cooperation in the Face of Emergencies*. Berlin: Springer Publishing.
- Oltermann, P. (2017, Desember 18). *Muted Protests in Vienna as Far Right Ministers enter Austria's Government* . Retrieved from The Guardian : <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/18/thousands-protest-as-far-right-ministers-enter-government-in-austria>
- Onuf, N. G. (1989). *World of Our Making*. Colombia: University of South California Press.
- Pen, M. L. (2017). *Engagements présidentiels Marine 2017*. Perancis : Front Nasional (FN).
- Penketh, A. (2014, Agustus 25). *France thrown into political turmoil after government dissolved*. Retrieved from The Guardian : <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/25/french-government-resigns-francois-hollande-manuel-valls>

- Perrineau, P. (2017, April 25). *The French Election Marks The End Of France's Traditional Parties*. Retrieved from huffington post:  
[https://www.huffingtonpost.com/entry/french-election-traditional-parties\\_us\\_58fe7a3be4b00fa7de16eb79](https://www.huffingtonpost.com/entry/french-election-traditional-parties_us_58fe7a3be4b00fa7de16eb79)
- Perrineau, P. (2017, April 25). *The French Election Marks The End Of France's Traditional Parties*. Retrieved from Huffington Post :  
[https://www.huffingtonpost.com/entry/french-election-traditional-parties\\_us\\_58fe7a3be4b00fa7de16eb79](https://www.huffingtonpost.com/entry/french-election-traditional-parties_us_58fe7a3be4b00fa7de16eb79)
- Pineau, E. (2015, September 07). *Hollande opens French doors to refugees despite opposition*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-france-idUSKCN0R70WC20150907?mod=related&channelName=worldNews>
- Platiau, C. (2017, Mei 06). *What Future Marine Le Pen Wants for France*. Retrieved from Routers: <https://sputniknews.com/politics/201705061053343662-marine-le-pen-france-policies-144-committments/>
- Price, R., & Reus Smit, C. (2014). Dangerous Liaisons? Critical International Theory and Constructivism. *European Journal of International Relations*, 4, 262-269.
- Proud, R. H. (2017). *Populist-Nationalism and Foreign Policy: Cultural Diplomacy, International Interaction and Resilience* (Culture and Foreign Policy ed.). Stuttgart, Jerman: Institut für Auslandsbeziehungen (IFA).
- Rettman, A. (2015, Juni 15). *Far-right parties form group in EU parliament*. Retrieved 02 28, 2018, from Euobserver:  
<https://euobserver.com/political/129129>
- Reus-Smit, C. (2005). Konstruktivism. In S. Burchill, *theories of International Relations* (pp. 199-201). New York: Palgrave Macmillan.
- Reus-Smit, C. (2005). *Theories of International Relations "Constructivism"* (3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Reus-Smith, C. (1999). *The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional Rationality in International Relations*. United Kingdom:: Princeton University Press.
- Reus-Smith, C. (2005). Konstruktivism. In A. L. Scott Burchill, *Theories of International* (p. 201). New York: Palgrave Macmillan.
- Robert Jackson, G. S. (2010). *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. UK: Oxford University Press.

- Robert Schütze, T. T. (2018). *Oxford Principles of European Union Law*. UK: Oxford University Press.
- Rodionova, Z. (2017, Mei 7). *French election: Le Pen crushed by Macron as he becomes president*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-election-result-exit-poll-macron-le-pen-france-president-national-front-latest-a7723056.html>
- Rohr, M. v. (2013, Juni 05). *The Economic and Political Decline of France*. Retrieved from Spiegel : <http://www.spiegel.de/international/europe/economic-decline-in-france-the-failed-leadership-of-hollande-a-903732.html>
- Russo, L. (2014). France: The historic victory of the Front National. *CISE*, 181.
- Safdar, A., & El Amraoui, A. (2017, May 1). *Populism : The French election's big winner*. Retrieved February 28, 2018, from Al Jazeera.
- Saget, J. (2017, Maret 21). *Le Pen Vows to Boost France's Defense Spending to 3% of GDP by 2022*. Retrieved from Sputniknews: <https://sputniknews.com/europe/201703211051793554-le-pen-increase-defence-spending/>
- Said-Moorhouse, L. (2018, Maret 5). *Italy's voters choose populists, deliver stinging rebuke to Europe*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2018/03/05/europe/italy-elections-intl/index.html>
- Saint-Martin, E. (2013). The Front National: Model For The Radical Right? *School of Political Studies, University of Ottawa*, 1-6.
- Saint-Martin, E. (2013). The Front National: Model For The Radical Right? *uO Research*, 7-9.
- Samuel, H. (2012, Januari 26). *François Hollande outlines manifesto for French presidency challenge*. Retrieved from The Telegraph : <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9042741/Francois-Hollande-outlines-manifesto-for-French-presidency-challenge.html>
- Samuel, H. (2017, April 24). *French election 2017: Emmanuel Macron and Marine Le Pen through to presidential run off*. Retrieved from The Telegraph: <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/23/french-election-live-results-exit-polls/>
- Sandford, A. (2017, Desember 29). *Rise of populism in Europe 'a real threat to democracy'*. Retrieved Januari 24, 2018, from Euronews :

<http://www.euronews.com/2017/12/29/rise-of-populism-in-europe-a-real-threat-to-democracy->

Sandford, A. (2017, Februari 09). *What do We Know About Marine Le Pens Policies ?* Retrieved from Euronews: <http://www.euronews.com/2017/02/09/what-do-we-know-about-marine-le-pen-s-policies>

Saxena, S. (2015). *Dictatorship, Fascism, and Totalitarianism*. New York: Britannica Educational Publishing.

Schmid, J. (1999). Liberalism and Enlightenment in Eighteenth-Century Germany. *Taylor & Francis, 12*(1 ), 32.

Scrinzi, F. (2017). A 'New' National Front? Gender, Religion, Secularism and the French Populist Radical Right. In R. B. M. Köttig, *Gender and Far Right Politics in Europe* (pp. 129-131). London: Palgrave Macmillan,.

Skirbekk, S. (2005). *Dysfunctional Culture. The Inadequacy of Cultural Liberalism as a Guide to Major Challenges of the 21st Century*. Lanham: University Press of America.

Stadelmann, M. (2014). The Marinisation of France Marine Le Pen and the French National Front. *International Journal of Humanities and Social Science, 4*, 1-3.

Stiftung, B. (2018). *Perancis. Jerman : sustainable governaince indicators (SGI)*.

Stockemer, D. (2017). The "new" ideology of the Front National (FN) under Marine Le Pen: A slight change with a big impact. *SAGE Journals, 32*(2), 7-10.

Stockemer, D. (2017). *The Front Nation in France : Continuity amd Change Unde Jean-Marie Le Pen and Marine Le Pen*. Canada: Springer International Publishing.

Stockemer, D., & Barisione, M. (2016). The 'new' discourse of the Front National Under Marine Le Pen : A slight Change with a big impact. *European Journal of Communication SAGE, 2*-6.

Stockemer, D., & Barisione, M. (2016). The 'new' discourse of the Front National under Marine Le Pen: A slight change with a big impact. *European Journal of Communication, 10*, 6.

Stothard, M. (2017, Maret 14). *Could France's Marine Le Pen deliver Frexit?* Retrieved from Financial Time: <https://www.ft.com/content/d37b6d90-fdd1-11e6-8d8e-a5e3738f9ae4>



- sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tamaki, T. (2015). *Level of analysis of the international system*. Ashgate Publishing, 14.
- Taub, A. (2017, September 26). *What the Far Right's Rise May Mean for Germany's Future*. Retrieved from Nytimes: <https://www.nytimes.com/2017/09/26/world/europe/germany-far-right-election.html>
- Telò, M. (2014). *Introduction: Globalization, New Regionalism and the Role of the European Union*. London: Routledge.
- Upadhyay, D. K. (2017). French Presidential Election 2017: Political Trends and Impact on EU's Prospective Orientation. *ICWA Issue Brief*, 2-3.
- Villepinte, C. F. (2017, Mei 1). *France's millennials on why they're supporting Marine Le Pen: 'We are the future and this is what we want'*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/politics/french-presidential-election-latest-marine-le-pen-supporters-millennials-campaign-rally-france-paris-a7712391.html>
- Vinocur, N. (2017, April 02). *Marine Le Pen's plan to make France great again*. Retrieved from Politico: <https://www.politico.eu/article/marine-le-pens-plan-to-make-france-great-again/>
- Wall, I. (2014). *France Votes: The Election of François Hollande*. UK: Palgrave Macmillan.
- Waters, L. (2016). French or Muslim? "Rooted" French Perceptions of the Muslim Community in France. *Undergraduate Honors Theses, authorized administrator of CU Scholar*, 36-37.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. New York: Cambridge University Press.
- Wenger, A., & Zimmerman, D. (2014). *Liberal Order in a Post-Western World*. Washington: Transatlantic Academy.
- Wese, B. (2017, April 27). *Le Pen vs. Macron: Where they stand*. Retrieved Maret 10, 2018, from Deutsche Welle : <http://www.dw.com/en/le-pen-vs-macron-where-they-stand/a-38609240>

- White, D. (2016, Juli 20). *Europe Sees Record Number of Terror Attacks in 2015*. Retrieved from Time: <http://time.com/4414478/europe-sees-record-number-of-terror-attacks-in-2015/>
- Wildman, S. (2017, Februari 07). *Marine Le Pen, the far-right politician topping the French polls, is thirsting for a Frexit*. Retrieved from VOX Media: <https://www.vox.com/world/2017/2/6/14522856/marine-le-pen-islam-populism-nativism-trump-frexit-brexit>
- Wilkinson, M. A. (2016). The Reconstitution of Postwar Europe: Lineages of Authoritarian Liberalism. *LSE Law, Society and Economy Working Papers*, 10-12.
- Williams, M. H. (2011). A new era for French far right politics? Comparing the FN under two Le Pens. *Análise Social*, 201, 683-685.
- Williams, M. H. (2011). A new era for French far right politics? Comparing the FN under two Le Pens. *Anilisi Social a Revista*, 201, 684-685.
- Willsher, K. (2018, Mey 11). *Marine Le Pen marks Front National leadership win with rebrand proposal*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2018/mar/11/marine-le-pen-marks-front-national-leadership-win-with-rebrand-proposal>
- Wisniewska, A., & Ehrenberg-Shannon, B. (2017, April 21). *Why Marine Le Pen is the choice of 'unhappy France*. Retrieved from Financial Times: <https://www.ft.com/content/3eef140e-25ce-11e7-a34a-538b4cb30025>
- Yılmaz, E. S. (2014). Political Identity Building in the EU: A Constructivist. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 9, 50-67.